

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional, global dan tetap berada dalam tatanan sistem administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dinyatakan sistem perencanaan pembangunan nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, menengah dan tahunan yang dilakukan oleh unsur penyelenggara pemerintahan pusat dan daerah dengan melibatkan masyarakat.

Perencanaan Pembangunan meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dimaksudkan untuk memberikan acuan dan dasar hukum bagi pembangunan jangka menengah daerah dalam lima tahun mendatang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan secara berkelanjutan, optimalisasi sumberdaya dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan daerah sesuai dengan kewenangan dan kewajiban dalam penyelenggaraan otonomi daerah secara terencana dan terukur untuk mewujudkan pembangunan yang berdaya guna dan berhasil guna.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pemerintah Kabupaten Klungkung Tahun 2020 ini, mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Klungkung Tahun 2018-2023, Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Klungkung, Rencana Kerja

Pembangunan Daerah Kabupaten Klungkung Perubahan Tahun 2020, serta Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2020.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Klungkung Tahun 2018-2023 merupakan dokumen perencanaan strategis yang disusun dan dirumuskan oleh bupati dan wakil bupati yang merupakan perencanaan jangka menengah yang menggambarkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan Daerah. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), secara sistematis mengedepankan isu-isu lokal yang diterjemahkan kedalam bentuk strategi kebijakan dan rencana pembangunan yang terarah, efektif dan berkesinambungan sehingga dapat diimplementasikan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran pembiayaan.

2.1.1. Visi

Visi pembangunan daerah Kabupaten Klungkung dalam 5 (lima) tahun mendatang yaitu:

“TERWUJUDNYA KLUNGKUNG YANG UNGGUL DAN SEJAHTERA”

Klungkung Yang Unggul merupakan tekad untuk mewujudkan Klungkung sebagai pusat pengembangan kegiatan ekonomi, pariwisata, sosial dan budaya di kawasan Bali Timur, yang didukung oleh pengembangan kualitas sumber daya manusia dan sumber daya alam daerah. Keunggulan lokal yang akan dikembangkan meliputi pengembangan Klungkung sebagai pusat pasar Bali Timur, menjadikan RSUD Klungkung sebagai pusat rujukan Bali Timur dan pengembangan potensi sosial ekonomi Nusa Penida sebagai kawasan Wisata terpadu. Keunggulan lokal ini dapat dicapai melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pengelolaan alam lingkungan secara bijaksana. Peningkatan kualitas sumber daya manusia ditempuh melalui pembangunan pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta sosial budaya dan kesenian. Pengelolaan alam lingkungan secara bijaksana ditempuh melalui pemanfaatan sumber daya alam yang memperhatikan batas daya dukung dan daya tampung lingkungan yang disertai dengan pelestarian aset-aset lingkungan yang strategis, seperti terumbu karang, hutan bakau, dan flora-fauna langka.

Klungkung yang Sejahtera merupakan dampak lanjutan dari pencapaian Klungkung yang Unggul. Dengan tercapainya keunggulan sumber daya manusia dan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana, maka daya saing Kabupaten Klungkung akan meningkat. Hal ini akan bermuara pada peningkatan kesejahteraan sosial dan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Hal ini akan terefleksikan dalam bentuk perbaikan indikator kesejahteraan masyarakat seperti peningkatan pendapatan perkapita, penurunan angka kemiskinan, dan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (yang terdiri dari peningkatan derajat kesehatan, mutu pendidikan dan paritas daya beli). Klungkung yang Sejahtera juga memiliki arti berkurangnya ketimpangan antara yang kaya dan yang miskin. Hal ini dapat ditempuh melalui pemerataan pembangunan, penanggulangan kemiskinan, serta perhatian khusus pada wilayah terpencil dan tertinggal seperti desa-desa di Kecamatan Nusa Penida. Penurunan ketimpangan pembangunan ini terefleksikan dalam bentuk perbaikan indikator ketimpangan pendapatan, yakni penurunan rasio gini.

Klungkung yang Unggul dan Sejahtera mengandung pengertian kondisi yang ingin dicapai, yakni Kabupaten Klungkung yang mampu mengoptimalkan segala sumber daya yang dimiliki untuk mencapai tujuan pembangunan dengan capaian yang di atas rata-rata provinsi Bali.

Terwujudnya Klungkung yang Unggul dan Sejahtera mengandung pengertian upaya berkelanjutan untuk menciptakan keunggulan di berbagai bidang guna menciptakan masyarakat yang cukup pangan, sandang, papan dan kualitas hidupnya untuk mencapai kesejahteraan lahir dan batin sehingga tercipta suatu generasi masyarakat Klungkung di masa depan yang unggul secara sosial, ekonomi, mental dan kebudayaan.

2.1.2. Misi

Dalam upaya mewujudkan visi tersebut di atas, perlu dirumuskan misi yang menjelaskan ruang lingkup prioritas dalam melaksanakan kegiatan pembangunan. Hal ini dimaksudkan agar setiap program dan kegiatan menjadi jelas dan terarah serta dapat menciptakan kondisi yang memungkinkan (*enabling conditions*) bagi pencapaian visi Kabupaten Klungkung.

RPJMD Semesta Berencana ini berorientasi pada pembangunan berkebudayaan dan berkelanjutan, guna mencapai kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan perekonomian yang berbasis kemitraan. Oleh karena itu, misi Kabupaten Klungkung terdiri dari 5 misi dirumuskan sebagai "**PANCA SANTI**" yang pelaksanaannya dilandasi semangat **GEMA SANTI** (gerakan masyarakat santun dan inovatif), yaitu :

1. Memperkuat dan meningkatkan eksistensi adat dan budaya.
Melalui misi ini, Pemerintah Kabupaten Klungkung berupaya menemukannya kembali adat dan budaya Bali di Kabupaten Klungkung untuk membangkitkan kembali Kabupaten Klungkung sebagai pusat pengembangan adat dan budaya Bali sebagaimana di masa lalu pada saat Kerajaan Klungkung menjadi pusat kekuasaan di Bali.
2. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.
Melalui misi ini, Pemerintah Kabupaten Klungkung berupaya meningkatkan derajat pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan masyarakat Klungkung sehingga menjadi pribadi-pribadi yang berkualitas dan berdaya saing.
3. Memperkuat perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat melalui pemberdayaan dengan konsep kemitraan.
Melalui misi ini, Pemerintah Kabupaten Klungkung mendorong partisipasi aktif masyarakat melalui pemberdayaan dengan konsep kemitraan sehingga mereka secara kreatif, inovatif dan produktif dapat mengembangkan usaha-usaha ekonomi yang mampu meningkatkan kesejahtraannya.
4. Terwujudnya pemerintahan yang responsif, transparan, santun dan inovatif dengan menjaga kepastian hukum dan stabilitas politik.
Melalui misi ini, Pemerintah Kabupaten Klungkung berupaya mewujudkan sistem pemerintahan yang bersih dan berwibawa, tanggap terhadap kebutuhan/keluhan masyarakat, terus memperbaiki diri melalui penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta menjunjung tinggi supremasi hukum, Hak-hak Asasi Manusia, hak-hak politik dan kebebasan berdemokrasi bagi masyarakat.
5. Mewujudkan sarana dan prasarana wilayah yang seimbang dengan tetap menjaga kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Melalui misi ini, Pemerintah Kabupaten Klungkung berupaya memenuhi kebutuhan akses, sarana-prasarana, dan fasilitas kebutuhan dasar masyarakat dengan menerapkan prinsip pelestarian lingkungan hidup melalui perlindungan/konservasi tanah, air, udara, laut dan perairan, serta flora dan fauna langka.

2.1.3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Adapun tujuan dan sasaran RPJMD adalah sebagai berikut :

2.1.3.1. Tujuan Pembangunan Daerah

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada analisis isu-isu strategis. Tujuan dalam hal ini merupakan implementasi pernyataan misi yang akan dicapai, sedangkan sasaran merupakan penjabaran dari tujuan. Adapun tujuan pembangunan daerah adalah sebagaimana dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.1
Visi, Misi dan Tujuan RPJMD Tahun 2018-2023

Visi	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Kondisi Awal	Target Tahun 2023
Terwujudnya Klungkung Yang Unggul Dan Sejahtera	1. Memperkuat dan meningkatkan eksistensi adat dan budaya	1.1. Lestari dan berkembang nya kebudayaan daerah	Cakupan budaya daerah yang dilestarikan (%)	22,34%	26%
	2. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.	2.1. Terwujudnya pembangunan manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	70,13	75,13
	3. Memperkuat perekonomian dan meningkatkan	3.1. Menurunnya angka kemiskinan dari 6,29% menjadi 3%	Persentase Penduduk Miskin (%)	6,29%	3,00%

Visi	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Kondisi Awal	Target Tahun 2023
	kesejahteraan sosial masyarakat melalui pemberdayaan dengan konsep kemitraan.	3.2. Terwujudnya laju pertumbuhan ekonomi sebesar 6% setiap tahun	Laju pertumbuhan PDRB	5,34%	6,00%
	4. Terwujudnya pemerintahan yang responsif, transparan, santun dan inovatif dengan menjaga kepastian hukum dan stabilitas politik.	4.1. Terciptanya penyelenggaraan pemerintah daerah yang Profesional, responsif, transparan, santun dan inovatif	Indeks Reformasi Birokrasi	54	61
		4.2. Terwujudnya ketentraman, ketertiban umum dan stabilitas politik yang mantap	Indeks Demokrasi Daerah	n/a	80,1
	5. Mewujudkan sarana dan prasarana wilayah yang seimbang dengan tetap menjaga kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup.	5.1. Berkurangnya ketimpangan infrastruktur antar wilayah	Indeks Ketimpangan Infrastruktur	60	45
		5.2. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	80	89

Sumber : RPJMD Kab. Klungkung Tahun 2018-2023

2.1.3.2. Sasaran Pembangunan Daerah

Kesesuaian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran dalam RPJMD menjadi tuntutan yang perlu diperhatikan. Konsistensi penjabaran Visi dan Misi ke dalam Tujuan dan Sasaran menentukan efektivitas pembangunan daerah sesuai dengan amanat pembangunan yang tertuang dalam Visi dan Misi Bupati terpilih. Berangkat dari tuntutan tersebut, maka dapat dijabarkan konsistensi Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran tersebut ke dalam matriks berikut ini



Tabel 2.2

Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Cara Pengukuran	Kondisi Awal	Target Capaian					Kondisi Akhir		
				2017	2019	2020	2021	2022	2023			
Visi: Terwujudnya Klungkung yang Unggul dan Sejahtera												
Misi 1: Memperkuat dan meningkatkan eksistensi adat dan budaya												
1.	Lestari dan berkembangnya kebudayaan daerah	1.1.	Terjaga dan berkembangnya kelestarian kebudayaan benda (tangible) dan tak benda (intangible)	Cakupan Budaya tak benda yang lestari	Jumlah budaya tak benda yang dilestarikan/jumlah data budaya tak benda yang hampir punah x 100%	22,66	18,89	38,41	58,41	78,89	100,00	100,00
				Cakupan Budaya benda yang lestari	Jumlah budaya benda yg ditata/jumlah data budaya yang didata x 100%	1,70	19,61	39,22	58,82	78,43	100,00	100,00
Misi 2: Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing												
2.	Terwujudnya pembangunan manusia yang berkualitas dan berdaya saing	2.1.	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup (AHH)	Data BPS	70,45	70,82	71,10	71,37	71,65	71,93	71,93
			Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	Angka Rata-rata Lama Sekolah	Data BPS	7,46	7,60	7,80	8,00	8,20	8,40	8,40
				Angka Harapan Lama Sekolah	Data BPS	12,94	13,00	13,25	13,80	14,00	14,20	14,20
			Meningkatnya daya saing masyarakat	Tingkat Pengangguran Terbuka	Data BPS	0,94	1,14	1,06	0,98	0,92	0,86	0,86



Pemerintah Kabupaten Klungkung
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2020

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Cara Pengukuran	Kondisi Awal	Target Capaian					Kondisi Akhir	
				2017	2019	2020	2021	2022	2023		
Misi 3: Memperkuat perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat melalui pemberdayaan dengan konsep kemitraan											
3. Menurunnya angka kemiskinan dari 6,29% menjadi 3%	3.1. Meningkatkan kemandirian PMKS	Cakupan PMKS mandiri	Jumlah PMKS mandiri dibagi jumlah PMKS x 100%	41,00	45,00	49,00	53,00	57,00	60,00	60,00	
		3.2. Meningkatkan Kesetaraan Gender	Pengangguran Perempuan	Data BPS	249,00	231,00	215,00	202,00	195,00	183,00	183,00
			Angka Rata Rata Lama Sekolah Perempuan	Data BPS	7,46	7,52	7,63	7,72	7,81	7,89	7,89
		3.3. Terpenuhinya hak anak	Capaian Kabupaten Layak Anak tingkat madya	Jumlah kriteria Kabupaten Layak Anak yang tercapai / jumlah seluruh kriteria x 100%	20,00	40,00	60,00	80,00	100,00	100,00	100,00
		3.4. Terwujudnya masyarakat desa yang mandiri	Persentase Desa berstatus swasembada	Jumlah desa berstatus swasembada/jumlah seluruh desa x 100%	7,00	15,00	23,00	32,00	41,00	53,00	53,00
		3.5. Terwujudnya pertumbuhan penduduk yang berkualitas dan seimbang	Tercapainya TFR (2,1), NRR (1), LPP (1,1)	Data BPS	95,84	97,86	97,90	98,00	98,56	98,86	98,86
4. Terwujudnya pertumbuhan ekonomi sebesar 6% setiap tahun	4.1. Meningkatkan investasi daerah	PMA (US\$)	Nilai realisasi investasi asing dalam dolar US	3.000	565.621	659.891	754.161	848.431	942.701	942.701	
		PMDN (Milyar Rp)	Nilai realisasi investasi dalam negeri dalam juta rupiah	0,65	1,05	1,23	1.402,00	1.577,00	1.752,00	1.752,00	



Pemerintah Kabupaten Klungkung
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2020

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Cara Pengukuran	Kondisi Awal	Target Capaian					Kondisi Akhir
				2017	2019	2020	2021	2022	2023	
4.2.	Meningkatnya peran usaha ekonomi rakyat	Kontribusi lapangan usaha perdagangan terhadap PDRB (%)	Jumlah PDRB Sektor Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor/Jumlah PDRB x 100%	8,13	8,13	8,13	8,13	8,13	8,13	8,13
		Kontribusi lapangan usaha industri pengolahan terhadap PDRB (%)	Jumlah PDRB Sektor industri pengolahan/Jumlah PDRB x 100%	9,33	9,46	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
		Kontribusi lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum terhadap PDRB (%)	Jumlah PDRB Sektor penyediaan akomodasi dan makan minum/Jumlah PDRB x 100%	14,44	15,80	16,00	17,00	18,00	19,00	19,00
		Nilai kontribusi lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan alam PDRB (juta Rp.)	Nilai kontribusi lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan alam PDRB (juta Rp.)	1.122.400	1.195.331	1.228.599	1.259.158	1.288.402	1.313.221	1.313.221
4.3.	Meningkatnya Keragaman Pola Konsumsi Pangan	Skor Pola Pangan Harapan	Hasil Penilaian	84,3	86,98	87,64	88,21	88,73	89,20	89,20



Pemerintah Kabupaten Klungkung
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2020

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Cara Pengukuran	Kondisi Awal	Target Capaian					Kondisi Akhir		
				2017	2019	2020	2021	2022	2023			
Misi 4: Terwujudnya pemerintahan yang responsif transparan, santun dan inovatif dgn menjaga kepastian hukum dan stabilitas politik												
5.	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang responsif, transparan, santun dan inovatif	5.1.	Terwujudnya akuntabilitas kinerja dan transparansi pemerintah daerah	Tingkat akuntabilitas kinerja Pemkab	Hasil Penilaian AKIP	63,54	66,00	68,20	71,00	73,40	76,00	76,00
		5.2.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks kualitas pelayanan publik	Hasil penilaian	3,34	3,35	3,37	3,38	3,39	3,40	3,40
6.	Terciptanya ketentraman, ketertiban umum dan stabilitas politik yang mantap	6.1.	Meningkatnya kesadaran demokrasi	Tingkat partisipasi pemilih (Pileg, Pilpres, Pilkada dan Pilkel)	jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih dibagi jumlah DPT x 100%	74,57	74,70	75,10	76,70	77,50	78,90	78,90
		6.2.	Menurunkan potensi konflik	Penurunan Potensi Konflik sosial	Angka potensi konflik sosial	27,00	22,00	17,00	15,00	12,00	6,00	6,00
		6.3.	Menurunnya tingkat risiko bencana	Indeks Risiko Bencana (%)	Hasil Penilaian	181,60	172,04	167,42	163,94	160,45	156,96	156,96
		6.4.	Meningkatnya ketaatan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan	Jumlah pelanggaran perda	Jumlah pelanggaran Perda	422	360	340	330	310	300	300
Misi 5: Mewujudkan sarana dan prasarana wilayah yang seimbang dgn tetap menjaga kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup												
7.	Berkurangnya ketimpangan infrastruktur antar wilayah	7.1.	Meningkatnya kualitas infrastruktur layanan dasar	Cakupan desa/kelurahan yang terpenuhi infrastruktur layanan dasar		60,00	64,41	66,10	67,80	69,49	71,19	71,19
8.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	8.1.	Menurunnya beban pencemaran air, tanah dan udara	Indeks kualitas air	Hasil pengukuran	8	7	7	7	7	7	7

Sumber : RPJMD Kab. Klungkung Tahun 2018-2023



2.2. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih pada akhir periode masa jabatan. Indikator Kinerja Utama ini merupakan indikator utama pembangunan daerah yang dicapai melalui sasaran-sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan di bab-bab sebelumnya.

Indikator Kinerja Utama Kabupaten Klungkung Tahun 2018-2023 yang disajikan merupakan Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Tahun 2018-2023 yang disajikan dalam Tabel 2.3. berikut.



Tabel 2.3
Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Klungkung

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja (tujuan/Impact/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				2019	2020	2021	2022	2023	
1	Lestari dan berkembangnya kebudayaan daerah	Cakupan Budaya yang lestari (%)	22,34	23,5	24	24,5	25	26	26,00
2	Terwujudnya pembangunan manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	70,13	71,13	72,13	73,13	74,13	75,13	75,13
3	Menurunnya angka kemiskinan dari 6,29% menjadi 3% di Tahun 2023	Persentase Penduduk Miskin	6,29	4,91	4,34	3,84	3,39	3	3
4	Mempertahankan pertumbuhan ekonomi sebesar 6% setiap tahun	Laju Pertumbuhan PDRB	5,34	6	6	6	6	6	6
5	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang Profesional, responsif, transparan, santun dan Inovatif	Indeks reformasi birokrasi	54	55	56	58	60	61	61
6	Terciptanya ketentraman, ketertiban umum dan stabilitas politik yang Mantap	Indeks demokrasi daerah	n/a	76,1	77,1	78,1	79,1	80,1	80,1
7	Mengurangi ketimpangan infrastruktur antar wilayah	Indeks ketimpangan infrastruktur	60	55	54	50	47	45	45
8	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks kualitas lingkungan	80	85	86	87	88	89	89

Sumber : RPJMD Kab. Klungkung, 2018-2023



2.3. Rencana Kinerja Tahunan

Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan Rencana Kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Penyusunan Rencana Kinerja dilaksanakan seiring dengan agenda penyusunan kebijakan anggaran serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Di dalam Rencana Kinerja ditetapkan Rencana Capaian Kinerja Tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran, program dan kegiatan melalui Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2020 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Klungkung Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2019 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Tahun 2020. Dokumen Rencana Kinerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, Indikator Kinerja Sasaran, dan Rencana Capaiannya, hasil evaluasi tahun sebelumnya serta program dan kegiatan pendukungnya.

2.4. Perjanjian Kinerja Tahun 2020

Perjanjian kinerja merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai oleh para pejabat di setiap instansi pemerintah. Dengan demikian perjanjian kinerja menjadi kontrak kinerja yang harus diwujudkan oleh para pejabat tersebut sebagai penerima amanah dan pada akhir tahun dijadikan dasar evaluasi kinerja dan penilaian terhadap pejabat tersebut. Dengan perjanjian kinerja diharapkan para pimpinan instansi tidak hanya pandai mendapatkan dan menghabiskan anggaran saja, tapi juga harus mampu menunjukkan serta mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada pimpinannya dan kepada masyarakat. Perjanjian kinerja sebagai bagian tidak terpisahkan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan upaya dalam membangun manajemen pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi hasil, yaitu peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat. Perjanjian kinerja ini merupakan amanah yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi



Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Perjanjian Kinerja Tahun 2020 ditetapkan setelah ditetapkannya Peraturan Bupati Klungkung tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan telah disesuaikan kembali dalam Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2020 yang ditetapkan pada tanggal 1 Nopember 2020 setelah ditetapkannya Peraturan Bupati Nomor 87 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Bupati Nomor 90 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2020 sebagai berikut :

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2020

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2020
1	Lestari dan berkembangnya kebudayaan daerah	Cakupan Budaya yang lestari (%)	24
2	Terwujudnya pembangunan manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	72,13
3	Menurunnya angka kemiskinan dari 6,29% menjadi 3%	Persentase Penduduk Miskin (%)	4,34
4	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi	Laju Pertumbuhan PDRB (%)	6
5	Terwujudnya Birokrasi yang Profesional, responsif, transparan, santun dan inovatif	Indek Reformasi Birokrasi	56
6	Terwujudnya ketaatan masyarakat terhadap peraturan perundangan	Indeks Demokrasi Daerah	77,1
7	Mengurangi ketimpangan infrastruktur antar wilayah	Indeks Ketimpangan Infrastruktur	54
8	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan	86

Sumber: Perjanjian Kinerja Bupati Klungkung, Perubahan 2020



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Konsep dasar akuntabilitas didasarkan pada klasifikasi tanggung jawab manajerial pada lingkungan dalam organisasi yang bertujuan untuk pelaksanaan kegiatan pada tiap bagian. Masing-masing individu pada setiap jajaran aparatur bertanggung jawab atas kegiatan yang dilaksanakan pada bagiannya. Konsep inilah yang membedakan adanya kegiatan yang terkendali dengan kegiatan yang tidak terkendali. Kegiatan-kegiatan yang terkendali merupakan kegiatan yang secara nyata dapat dikendalikan oleh seseorang atau suatu pihak. Ini berarti, kegiatan tersebut benar-benar direncanakan, dilaksanakan dan dinilai hasilnya oleh pihak yang berwenang.

Akuntabilitas sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan misi dan visi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan.

Pemerintah Kabupaten Klungkung selaku pengemban amanah masyarakat, melaksanakan kewajiban akuntabilitas melalui penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Klungkung yang dibuat sesuai dengan ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2018-2023. Untuk tingkat kabupaten fokus pelaporan kinerja adalah pencapaian tujuan/sasaran strategis yang bersifat dampak (*benefit*).

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab



tercapainya atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan. Pemerintah Kabupaten Klungkung pada tahun 2020 memperjanjikan kinerja melalui Perjanjian Kinerja yang ingin dicapai terdiri dari 8 sasaran dengan 8 indikator kinerja.

3.1. Pengukuran Kinerja

Pemerintah Kabupaten Klungkung secara umum telah berupaya melaksanakan pembangunan di berbagai bidang dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018-2023 yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Tahun 2018-2023. Tingkat capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Klungkung tahun 2019 berdasarkan hasil pengukurannya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.1
Pengukuran Kinerja Pemerintah Kabupaten Klungkung
Tahun 2020

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Cap (%)
1	2	3	4	5	6
1	Lestari dan berkembangnya kebudayaan daerah	Cakupan Budaya yang lestari (%)	24.00	31.42	130.92
2	Terwujudnya pembangunan manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	72.13	71.73	99.45
3	Menurunnya angka kemiskinan dari 6,29% menjadi 3%	Persentase Penduduk Miskin (%)	4.34	4.87	87.79
4	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi	Laju Pertumbuhan PDRB (%)	6.00	-6.35	-105.83
5	Terwujudnya Birokrasi yang Profesional, responsif, transparan, santun dan inovatif	Indek Reformasi Birokrasi	56.00	57.85	103.30
6	Terwujudnya ketaatan masyarakat terhadap peraturan perundangan	Indeks Demokrasi Daerah	77.10	81.38	105.55
7	Mengurangi ketimpangan infrastruktur antar wilayah	Indeks Ketimpangan Infrastruktur	54.00	20.26	162.48
8	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan	86.00	63,09	73,36
Capaian Rata-Rata Kinerja Sasaran					82,13

Sumber : Data diolah



Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa pada tahun 2020, sasaran kinerja Pemerintah Kabupaten Klungkung sebanyak 8 sasaran dengan 8 indikator kinerja dan capaian rata-rata kinerja sasaran adalah 82,13%. Dari 8 sasaran tersebut terdapat 4 sasaran dengan capaian diatas 100% dan 4 sasaran dengan capaian dibawah 100 persen.

3.2. Analisis Capaian Kinerja

Analisa atas pencapaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2020, sesuai dengan perjanjian kinerja yang ditetapkan berupa Dokumen Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Klungkung, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan rencana kerja Pemerintah Daerah tentang prioritas dan sasaran pembangunan Daerah Tahun 2020. Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel dan berorientasi pada hasil, Pemerintah Kabupaten Klungkung bersama-sama dengan segenap masyarakat telah berupaya mencapai tujuan dan sasaran tersebut.

Analisa atas capaian indikator – indikator sasaran ini adalah sebagai berikut:

Sasaran 1 **Lestari dan Berkembangnya Kebudayaan Daerah**

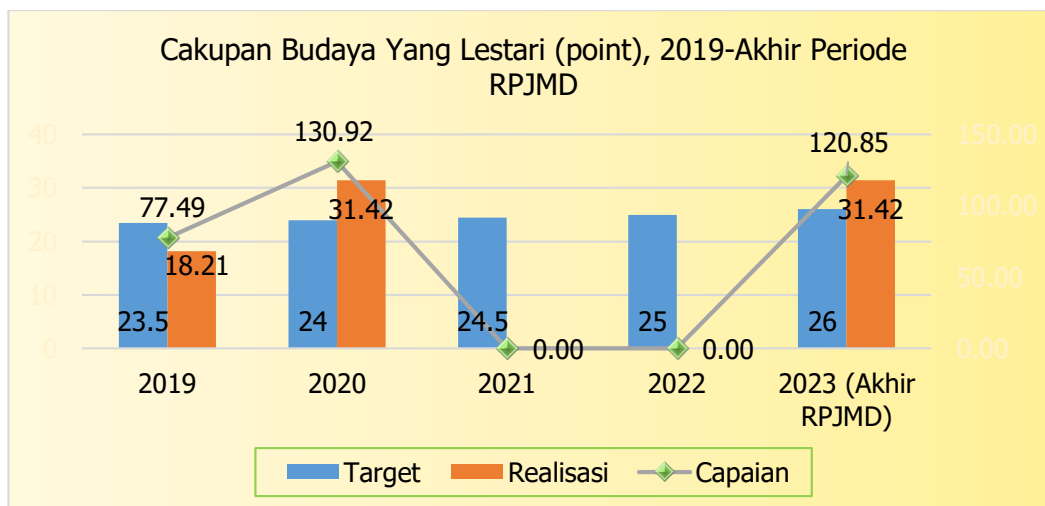
Bukti perkembangan kebudayaan masyarakat dapat dilihat dari warisan budaya tak benda dan benda yang terus dapat dilestarikan sehingga dapat lestari sampai ke generasi berikutnya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan, karena itu penting bagi Pemerintah Kabupaten Klungkung untuk terus melestarikan kebudayaan daerah Kabupaten Klungkung baik yang bersifat kebendaan maupun yang tidak bersifat kebendaan. Warisan budaya bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya, dan kawasan cagar budaya di darat dan/atau di air perlu dilestarikan keberadaannya. Hasil perbuatan dan pemikiran yang terwujud dalam identitas, ideologi, mitologi, ungkapan konkrit dalam bentuk suara, gerak, maupun gagasan yang termuat dalam benda, sistem perilaku, sistem kepercayaan, dan adat istiadat Kabupaten Klungkung merupakan bentuk warisan budaya tak benda. Mengetahui, menyadari dan mengenali adalah cara yang bisa dilakukan sehingga terbangun rasa memiliki dan



menghargai warisan budaya tak benda tersebut.

Dalam menunjukkan komitmen melestarikan kebudayaan Daerah di Kabupaten Klungkung, Pemerintah Kabupaten Klungkung menetapkan sasaran Lestari dan Berkembangnya Kebudayaan Daerah yang diukur dengan indikator kinerja Cakupan Budaya Yang Lestari. Cakupan Budaya Yang Lestari dihitung dengan membandingkan antara Budaya Yang Lestari (benda dan tak benda) dengan Budaya Daerah Yang Terdata di Kabupaten Klungkung (benda dan tak benda). Budaya tak benda meliputi : sekaa teruna, subak sawah, subak abian, tradisi dan budaya takbenda lain di Kabupaten Klungkung, sementara Budaya Benda mencakup Cagar Budaya, Situs Budaya dan berbagai budaya kebendaan yang lain. Dalam melakukan pengumpulan data, Pemerintah Kabupaten Klungkung menetapkan bahwa budaya benda yang lestari adalah budaya benda yang telah ditetapkan dan dipelihara oleh Pemerintah Kabupaten Klungkung. Sementara Budaya tak benda yang lestari adalah budaya tak benda yang dalam kurun waktu satu tahun setidaknya pernah tampil satu kali dalam acara pagelaran/pameran baik di Kabupaten Klungkung maupun di Provinsi Bali.

Cakupan Budaya Yang Lestari pada tahun 2020 ditunjukkan pada grafik berikut ini :



Sumber : Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kab. Klungkung, 2021

Gambar 3.1 Cakupan Budaya Yang Lestari, 2019-2023 dan Capaian RPJMD

Berdasarkan gambar diatas dapat diketahui bahwa capaian indikator Cakupan Budaya Yang Lestari di Kabupaten Klungkung pada tahun 2020 sebesar 130,92 persen. Dimana target Cakupan Budaya Yang Lestari ditargetkan sebesar 24



dan terealisasi sebesar 31,42. Jika dilihat dari trend Cakupan Budaya Yang Lestari di Kabupaten Klungkung mengalami peningkatan, dimana sebelumnya Cakupan Budaya Yang Lestari pada tahun 2019 sebesar 18,21. Dibandingkan dengan target RPJMD, capaian sampai dengan tahun 2020 adalah 120,85 persen.

Pengembangan budaya di masa pandemi covid-19 mengalami banyak hambatan. Hal tersebut terjadi karena pengembangan budaya pada umumnya dilakukan dengan melibatkan banyak orang dan berbasis komunitas. Akulturasi budaya sangat cepat terwujud dengan pertemuan orang, sementara pertemuan orang adalah hal yang dihindari saat pandemi covid-19. Penyebarluasan budaya melalui media online dapat terlaksana dengan baik, namun pewarisan budaya mengalami hambatan mengingat pewarisan budaya memerlukan interaksi antara yang mewariskan dan yang menerima. Strategi yang ditempuh Pemerintah Kabupaten Klungkung dalam melestarikan dan mengembangkan kebudayaan daerah sebagai berikut:

1. Penelusuran, pendataan, pencatatan dan penetapan budaya-budaya asli Kabupaten Klungkung baik berupa budaya benda maupun budaya tak benda dilakukan secara intensif. Salah satu upaya nyata berupa diterimanya benda pusaka berupa mata tombak dan keris peninggalan Perang Puputan Klungkung 1908 dari Ketua Yayasan Westerlaken, Belanda di Puri Agung Klungkung tepat di hari peringatan Puputan Klungkung ke-112 dan HUT Kota Semarapura ke-28 pada tanggal 28 April 2020.
2. Penyebarluasan budaya melalui media online seperti sosialisasi cagar budaya dan sosialisasi terkait kegiatan – kegiatan pelestarian budaya benda di Museum Semarajaya.
3. Penyelenggaraan bulan Bahasa Bali merupakan suatu kebijakan yang sangat mendukung lestari dan berkembangnya kebudayaan di Kabupaten Klungkung. Penyelenggaraan bulan bahasa bali yang menyasar siswa di sekolah-sekolah membantu pelestarian bahasa bali mulai dari generasi muda.

Dalam mewujudkan sasaran Lestari dan Berkembangnya Kebudayaan Daerah pada tahun 2020 didukung oleh faktor internal dan eksternal diantaranya:

1. Penetapan Peraturan Gubernur Bali Nomor 80 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Penggunaan Bahasa, Aksara, dan Sastra Bali serta Penyelenggaraan Bulan Bahasa Bali dan Peraturan Gubernur Bali Nomor 79



Tahun 2018 tentang Hari Penggunaan Busana Adat Bali, membuat dukungan untuk melestarikan kebudayaan daerah terus menguat. Penggunaan Bahasa Bali juga terus ditingkatkan di sekolah-sekolah maupun instansi-instansi pemerintah dan swasta. Hal tersebut mendorong penggunaan bahasa bali dan busana adat bali di seluruh lapisan masyarakat.

2. Adanya dukungan yang kuat dari lembaga adat di Kabupaten Klungkung dalam terus melestarikan budaya tak benda berupa tradisi dan berbagai seni di Kabupaten Klungkung.
3. Penduduk Kabupaten Klungkung yang terdiri atas beberapa suku dan agama membantu adanya akulturasi budaya yang melahirkan budaya baru.

Adapun permasalahan yang ditemui dalam mewujudkan sasaran Melestarikan dan Mengembangkan Kebudayaan Daerah adalah sebagai berikut:

1. Pembatasan interaksi sosial dalam masa pandemi covid-19 membatasi upaya-upaya pengembangan dan pelestarian budaya yang berbasis komunitas. Kurangnya interaksi mengurangi upaya pewarisan budaya yang sangat membutuhkan pertemuan langsung dan tak jarang melibatkan kontak fisik. Salah satu contoh yang dapat diambil adalah pewarisan budaya menari tradisional yang dalam upaya pelestariannya membutuhkan interaksi langsung dan dengan kontak fisik.
2. Belum intensifnya pendataan, pengkajian, dan pendaftaran kekayaan budaya secara valid.
3. Kerjasama pengembangan budaya dengan para pemangku kepentingan dalam pelestarian dan pengembangan budaya sering mengalami hambatan disebabkan belum tercetusnya komitmen bersama pengelolaan budaya berupa cagar budaya.

Dalam pencapaian sasaran Lestari dan Berkembangnya Kebudayaan Daerah, Pemerintah Kabupaten Klungkung meraih prestasi sebagai berikut:

1. Juara I Geguritan Pasangan Remaja Putra ajang Utsawa Dharmagita
2. Juara I Palawakya Pasangan Remaja Putra ajang Utsawa Dharmagita

Dalam melaksanakan pelayanan publik, Pemerintah Kabupaten senantiasa dituntut untuk melaksanakan pelayanan dengan efektif dan efisien. Analisis efisiensi difokuskan pada indikator input dan output dari suatu kegiatan. Dalam hal ini, diukur dari kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan *input* yang lebih sedikit dalam



menghasilkan *output* yang sama/atau lebih besar, atau persentase capaian *output* sama tinggi daripada persentase capaian *input*. Efisiensi suatu kegiatan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE). Dibawah ini disajikan analisis tingkat efisiensi sebagai berikut:

Tabel 3.2
Tingkat Efisiensi
Lestari dan Berkembangnya Kebudayaan Daerah
Tahun 2020

Indikator Kinerja	Target Capaian Sasaran (%)	Target Capaian Keuangan (%)	Standar Efisiensi	Realisasi Capaian Sasaran (%)	Realisasi Capaian Keuangan (%)	Indeks Efisiensi	Tingkat Efisiensi	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Cakupan Budaya Yang Lestari	100	100	1.00	130.92	94	1.40	0.40	Efisien
Jumlah	100	100	1.00	130.92	94	1.40	0.40	Efisien

Sumber : data diolah

Dari hasil analisis dapat diketahui bahwa pada tahun 2020, tingkat efisiensi sasaran Melestarikan dan Mengembangkan Kebudayaan Daerah adalah sebesar 0,40 dimana indeks efisiensi lebih tinggi dari standar efisiensi. Pada tahun 2020 sasaran Lestari dan Berkembangnya Kebudayaan Daerah dicapai dengan Efisien. Sasaran Lestari dan Berkembangnya Kebudayaan Daerah pada tahun 2020 didukung dengan program pendukung sebagaimana tabel dibawah ini.

Tabel 3.3
Efisiensi Anggaran
Sasaran Lestari dan Berkembangnya Kebudayaan Daerah Tahun 2020

Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Efisiensi (Rp)	Capaian (%)	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	811,494,458.00	791,538,808.00	19,955,650.00	97.54	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga
Program Pengelolaan Keragaman Budaya	1,133,034,233.00	1,052,227,641.00	80,806,592.00	92.87	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga
Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya	2,230,559,353.00	2,067,873,553.00	162,685,800.00	92.71	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga
Jumlah	4,175,088,044	3,911,640,002	263,448,042.00	93.69	

Sumber : Simda Keuangan, 2021

Pada tahun 2020, Sasaran Lestari dan Berkembangnya Kebudayaan Daerah



didukung dengan 3 program pendukung dengan pagu anggaran perubahan sebesar Rp. 4,175,088,044 dan terealisasi sebesar Rp. 3,911,640,002 dan sisa anggaran sebesar Rp. 263,448,042.00 atau terealisasi sebesar 93,69 persen. Sasaran ini didukung oleh Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga.

DOKUMENTASI PENCAPAIAN SASARAN



Tepat dihari Puputan Klungkung ke-112 dan HUT Kota Semarapura ke-28, Kabupaten Klungkung menerima Tombak dan Keris dari Yayasan Westerlaken, Belanda.



Bupati Klungkung menghadiri pembukaan Bulan Bahasa Bali di Gedung Ksirnawa (1/2/2020)



2020 peserta mengikuti Festival Nyurat Aksara Bali Tahun 2020



Sasaran 2

Terwujudnya Pembangunan Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing

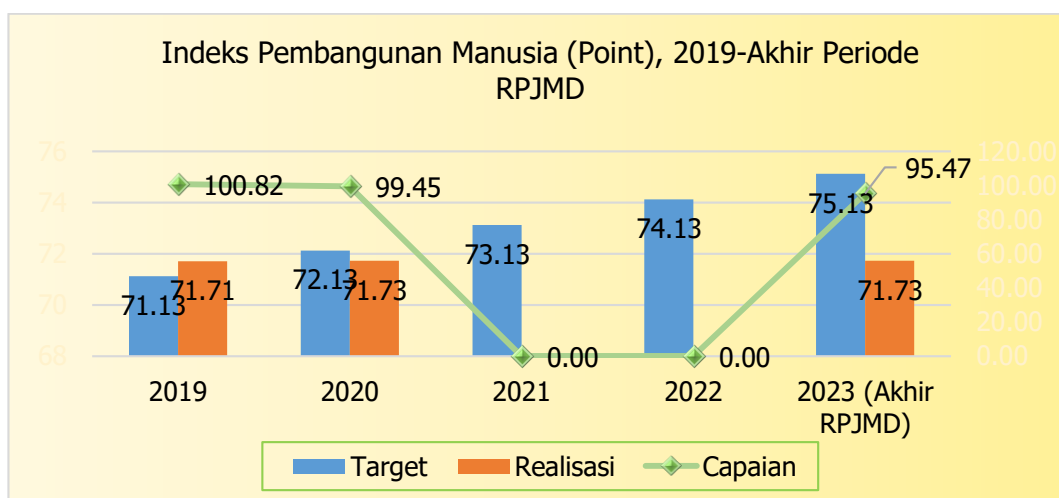
Pembangunan manusia menjadi satu keniscayaan bagi suatu bangsa, karena sejatinya pembangunan tidak hanya dilihat dari capaian fisik saja tetapi juga dari sudut manusianya. Pembangunan Manusia dengan peta jalan yang jelas dan terukur dan dilakukan secara massif, sangat diperlukan guna menjawab tantangan pembangunan dan memastikan kontribusinya terhadap pencapaian visi dan misi pembangunan daerah. Dalam mendorong pembangunan manusia yang berkualitas dan berdaya saing, Pemerintah Kabupaten Klungkung menetapkan sasaran Terwujudnya Pembangunan Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing yang diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

IPM merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM diperkenalkan oleh United Nations Development Programme (UNDP) pada tahun 1990 dan metode penghitungannya direvisi pada tahun 2010. BPS mengadopsi perubahan metodologi penghitungan IPM yang baru pada tahun 2014 dan melakukan backcasting hingga tahun 2010. IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standar hidup layak (*decent standard of living*). Umur panjang dan hidup sehat digambarkan oleh Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH) yaitu jumlah tahun yang diharapkan dapat dicapai oleh bayi yang baru lahir untuk hidup, dengan asumsi bahwa pola angka kematian menurut umur pada saat kelahiran sama sepanjang usia bayi. Pengetahuan diukur melalui indikator Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) adalah rata-rata lamanya (tahun) penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya (tahun) sekolah formal yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Standar hidup yang layak digambarkan oleh pengeluaran per kapita disesuaikan, yang ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli (*purchasing power parity*). IPM dihitung berdasarkan rata-rata geometrik indeks kesehatan, indeks pengetahuan, dan indeks



pengeluaran. Penghitungan ketiga indeks ini dilakukan dengan standardisasi nilai minimum dan maksimum dari masing-masing komponen indeks. IPM merupakan indikator yang digunakan untuk melihat perkembangan pembangunan dalam jangka panjang. Untuk melihat kemajuan pembangunan manusia, terdapat dua aspek yang perlu diperhatikan, yaitu kecepatan dan status pencapaian.

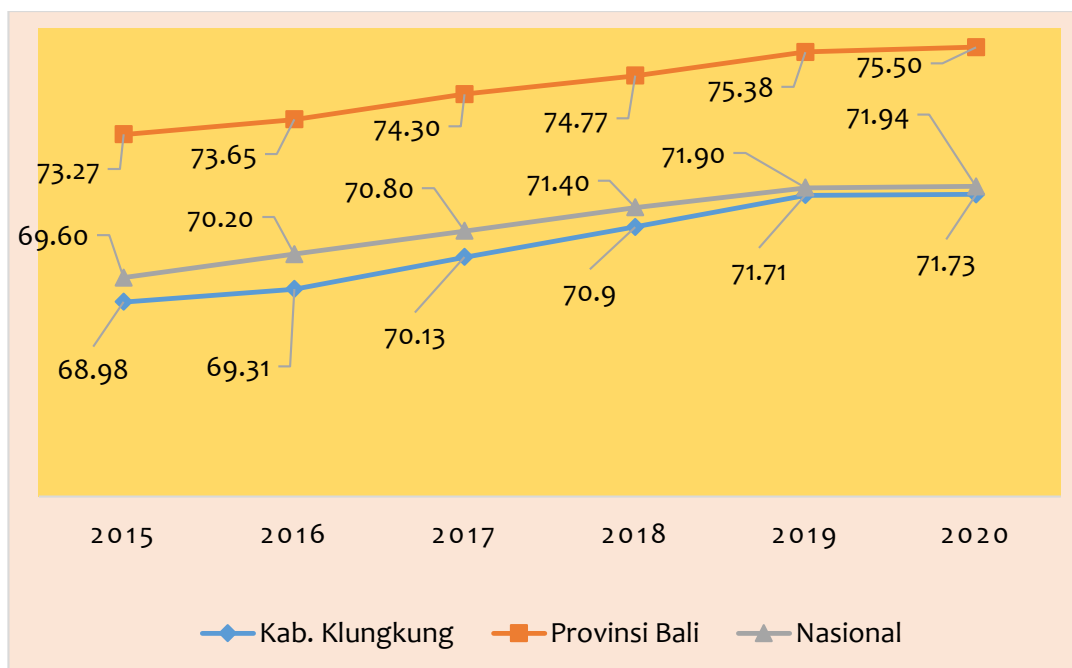
Capaian sasaran Terwujudnya Pembangunan Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing yang diukur dengan indikator Indeks Pembangunan Manusia sebagai berikut:



Sumber : Provinsi Bali Dalam Angka 2021, Penyediaan Data Untuk Perencanaan Pembangunan

Gambar 3.2 Indeks Pembangunan Manusia, 2019-2023 dan Capaian RPJMD

Indeks Pembangunan Manusia pada tahun 2020 ditargetkan sebesar 72,13 point. Berdasarkan data dalam Buku Provinsi Bali Dalam Angka 2021 yang dirilis Badan Pusat Statistik Provinsi Bali untuk penyediaan data perencanaan pembangunan daerah, Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Klungkung pada tahun 2020 adalah sebesar 71,73 point atau tercapai sebesar 99,45 persen dari target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Bupati Klungkung Tahun 2020. Tahun 2020 merupakan tahun kedua pelaksanaan RPJMD oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih untuk masa 2018-2023. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD Kabupaten Klungkung Tahun 2018-2023, maka capaian Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Klungkung telah tercapai sebesar 95,47 persen. Dari tahun ke tahun, Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Klungkung menunjukkan tren meningkat, untuk melihat pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Klungkung dapat dilihat pada gambar sebagai berikut:

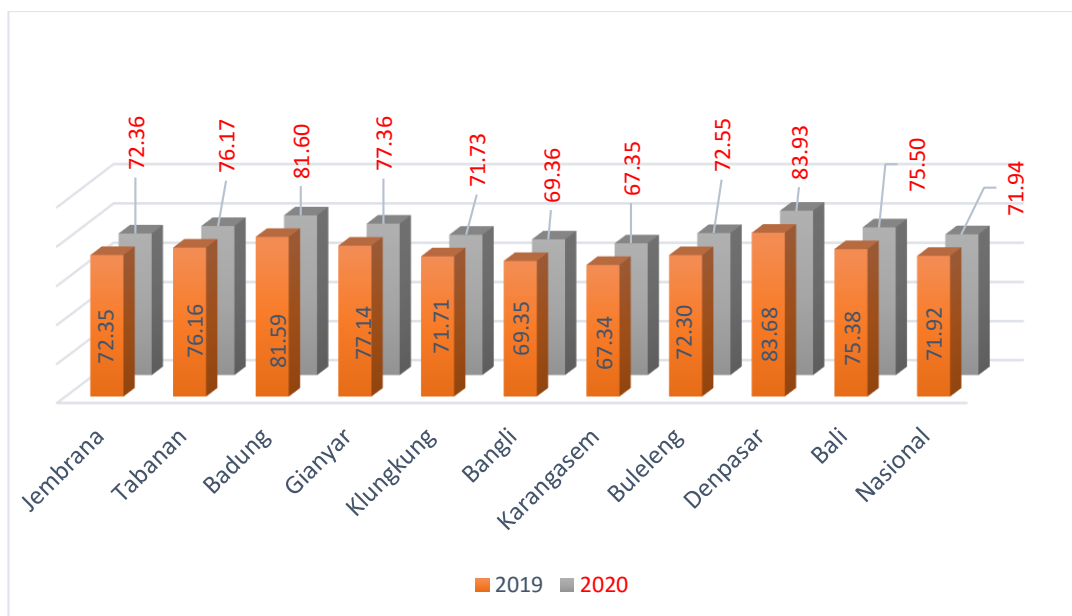


Sumber : Provinsi Bali Dalam Angka 2021, Penyediaan Data Untuk Perencanaan Pembangunan, 2021

Gambar 3.3 Indeks Pembangunan Manusia Kab. Klungkung, Provinsi Bali dan Nasional, 2015-2020

Dari gambar diketahui bahwa Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Klungkung berada dibawah Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Bali dan Nasional. Hal tersebut menjadi fokus pembangunan di Kabupaten Klungkung untuk lebih meningkatkan pembanguan manusianya.

Untuk memotret kemajuan pembangunan manusia, hal yang perlu diperhatikan adalah kecepatan serta status pencapaian pembangunan manusia tersebut. Dari 9 Kabupaten/kota di Bali, Kabupaten Klungkung merupakan Kabupaten yang berada di urutan ke 7 diantara 9 Kabupaten/Kota di Bali dari sisi status pencapaian Indeks Pembangunan Manusia. Namun jika dilihat dari pertumbuhan pencapaiannya, Kabupaten Klungkung menempati urutan ke 2 tercepat setelah Kabupaten Karangasem. Hal tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Klungkung telah berusaha dengan segenap sumber daya yang dimiliki untuk meningkatkan kemajuan pembangunan manusia di Kabupaten Klungkung. Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Bali, Provinsi Bali dan Nasional sebagai berikut:



Sumber : Provinsi Bali Dalam Angka 2021, Penyediaan Data Untuk Perencanaan Pembangunan

Gambar 3.4 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota, Provinsi Bali dan Nasional, 2019-2020

Dari gambar diketahui bahwa Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Klungkung berada pada posisi ke 7 dari 9 Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. Jika dibandingkan dengan Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Bali dan Nasional, Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Klungkung masih berada di bawah angka Provinsi Bali dan Nasional.

Untuk melihat pencapaian pembangunan manusia, tidak hanya dilihat dari status pencapaiannya, namun juga dilihat dari pertumbuhan pembangunan manusia itu sendiri. Untuk melihat pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota, Provinsi Bali dan Nasional dapat dilihat pada gambar sebagai berikut:



Sumber : Provinsi Bali Dalam Angka 2021, Penyediaan Data Untuk Perencanaan Pembangunan

Gambar 3.5 Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten/Kota dan Provinsi Bali dari tahun 2019 ke tahun 2020

Dari grafik tersebut dapat diketahui bahwa Kabupaten dengan pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia tertinggi adalah Kabupaten Buleleng dan Denpasar, serta Gianyar dengan pertumbuhan di atas 0,20 poin, sementara Kabupaten Klungkung naik 0,02 poin sedangkan 5 Kabupaten lain hanya naik 0,01 poin. Pertumbuhan IPM Kabupaten Klungkung Tahun 2020 masih dibawah pertumbuhan IPM Bali.

Untuk mengetahui secara rinci mengenai fokus utama yang berpengaruh terhadap capaian Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Klungkung adalah sebagai berikut:

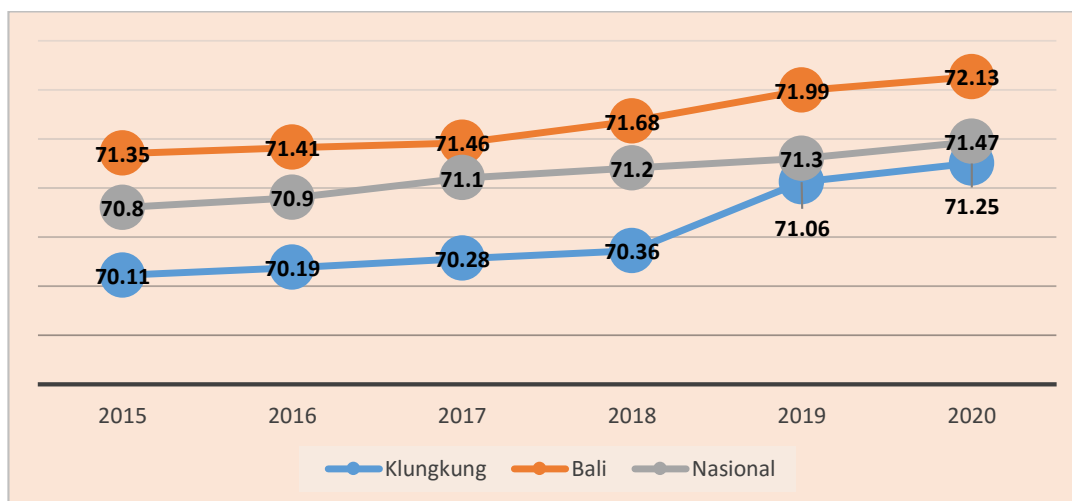
a. Umur Harapan Hidup

Keberhasilan program kesehatan dan program pembangunan sosial ekonomi pada umumnya dapat dilihat dari peningkatan usia harapan hidup penduduk dari suatu negara. Meningkatnya perawatan kesehatan melalui puskesmas, akan meningkatkan akses terhadap pelayanan kesehatan. Masyarakat yang mampu memenuhi kebutuhan gizi dan kalori diharapkan mampu mempunyai pendidikan yang lebih baik sehingga memperoleh pekerjaan dengan penghasilan yang



memadai, yang akhirnya akan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan memperpanjang usia harapan hidup.

Pembangunan manusia di Kabupaten Klungkung khususnya bidang kesehatan dapat diukur dengan indikator Angka Harapan Hidup. Angka Harapan Hidup di Kabupaten Klungkung disajikan pada grafik sebagai berikut.



Sumber : Klungkung Dalam Angka 2021, Penyediaan Data Perencanaan Pembangunan

Gambar 3.6 Angka Harapan Hidup (Tahun), 2015-2020

Berdasarkan gambar diatas dapat diketahui bahwa capaian indikator Angka Harapan Hidup di Kabupaten Klungkung terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2015 Angka Harapan Hidup di Kabupaten Klungkung sebesar 70,11 tahun dan meningkat menjadi 71,25 tahun di tahun 2020. Hal tersebut menunjukkan peningkatan pembangunan di sisi kesehatan.

Untuk mendapatkan perbandingan kinerja yang telah dicapai, Angka Harapan Hidup Kabupaten Klungkung perlu dibandingkan dengan Angka Harapan Hidup Kabupaten/Kota di Provinsi Bali, Provinsi Bali dan Angka Harapan Hidup Nasional. Untuk memperoleh perbandingan regional antar Kabupaten/Kota di Provinsi Bali, gambar di bawah ini menyajikan perbandingan angka harapan hidup Kabupaten Klungkung dengan Kabupaten/Kota lainnya di Provinsi Bali sebagai berikut:



Sumber : Provinsi Bali Dalam Angka 2021, Penyediaan Data Perencanaan Pembangunan

Gambar 3.7 Angka Harapan Hidup Kabupaten/Kota di Provinsi Bali, Provinsi Bali dan Nasional (tahun), 2018-2020

Berdasarkan gambar di atas maka terlihat bahwa Angka Harapan Hidup Kabupaten Klungkung berada di peringkat 7 dari 9 Kabupaten/Kota di Bali. Angka harapan hidup tertinggi ada di Kabupaten Badung yang mencapai 75,10 tahun pada tahun 2020 dan terendah ada di Kabupaten Karangasem yang baru mencapai 70,47 tahun di tahun 2020. AHH Kabupaten Klungkung pada tahun 2020 mencapai 71,25 tahun berada di bawah Angka Harapan Hidup Provinsi Bali yang sebesar 72,13 tahun dan juga berada dibawah Angka Harapan Hidup Nasional yang sebesar 71,47 tahun.

Dalam usaha meningkatkan Angka Harapan Hidup Kabupaten Klungkung, Pemerintah Kabupaten Klungkung menemui kendala sebagai berikut:

1. Metode Promotif dan Preventif merupakan metode terbaik dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di wilayah manapun, namun kesadaran masyarakat di Kabupaten Klungkung belum dapat sepenuhnya ditingkatkan disebabkan rentang kendali dan sulitnya mengubah pola pikir masyarakat, kedepannya metode promotif dan preventif akan lebih ditingkatkan lagi.
2. Pengawasan terhadap kualitas kesehatan lingkungan merupakan suatu pekerjaan besar yang jika berhasil dituntaskan akan sangat mempengaruhi peningkatan kesehatan masyarakat. Dampak pembangunan yang tidak terarah



memperburuk kualitas kesehatan lingkungan. Kampanye kesehatan lingkungan seringkali berbenturan dengan kepentingan ekonomi dan pembangunan infrastruktur.

3. Rendahnya tingkat pendidikan dan pendapatan turut menyumbang terhadap kurangnya kesadaran terhadap kesehatan diri maupun lingkungan. Keinginan mendapatkan kualitas kesehatan yang lebih baik oleh masyarakat seringkali berbenturan dengan ketersediaan pendanaan. Beberapa masyarakat yang lebih mampu justru tidak sadar akan kesehatan lingkungan disebabkan tingkat pendidikan yang rendah.

Keberhasilan meningkatkan Angka Harapan Hidup di tengah pandemi covid-19 yang tengah mewabah di seluruh dunia memerlukan strategi khusus yang tidak biasa diterapkan di tahun-tahun sebelumnya. Tahun 2020 merupakan tahun tantangan bagi dunia kesehatan dalam tetap mendukung peradaban manusia. Dalam tahun 2020, strategi yang diterapkan Pemerintah Kabupaten Klungkung dalam mendukung pertumbuhan indeks pembangunan manusia melalui peningkatan angka harapan hidup adalah sebagai berikut:

1. Penerapan Protokol Kesehatan di seluruh fasilitas pelayanan kesehatan.

Protokol kesehatan standar dalam masa pandemi covid-19 menjadi suatu keharusan bagi seluruh fasilitas layanan kesehatan. Untuk itu seluruh fasilitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Klungkung disiapkan untuk menangani pasien dengan protokol kesehatan yang memadai sebagai upaya pemutusan rantai penyebaran covid-19 serta memberikan kesembuhan bagi pasien yang terinfeksi.

2. Penambahan sarana dan prasarana perawatan pasien covid-19.

Bencana yang disebabkan oleh virus sars cov-19 telah memaksa seluruh fasilitas pelayanan kesehatan untuk mempersiapkan sarana dan prasarana yang lebih baik untuk penanganan pasien terdampak. Jumlah orang sakit akibat virus tersebut yang jumlahnya meningkat, harus direspon dengan penyediaan sarana dan prasarana perawatan yang memadai.

3. Meningkatkan upaya-upaya peningkatan kesehatan secara promotif dan preventif.

Pemerintah Kabupaten Klungkung telah mengubah strategi pembangunan bidang kesehatan dengan lebih menguatkan upaya peningkatan kesehatan secara promotif dan preventif. Sosialisasi protokol kesehatan berupa rajin



mencuci tangan, penggunaan masker, pembatasan jarak fisik serta berbagai gaya hidup sehat semakin banyak dilakukan. Pemerintah Kabupaten Klungkung melalui jajarannya di bidang kesehatan menyadari bahwa langkah-langkah promotif dan preventif lebih efektif dan efisien dibandingkan langkah-langkah kuratif (penyembuhan).

4. Peningkatan Pelayanan Gawat Darurat

Peningkatan pelayanan gawat darurat dikemas dalam sebuah aksi yang dikenal dengan "KRIS 118". KRIS 118 menjadi layanan Kesehatan dan kebutuhan masyarakat khususnya masyarakat Klungkung baik dalam pelayanan rujukan dan kegawat daruratan terpadu pra hospital dalam rangka mencegah kematian dan kecacatan merupakan tujuan utama layanan AGD KRIS 118. AGD KRIS 118 merupakan unit pelayanan yang dibentuk untuk mendekatkan akses pelayanan kegawat daruratan bagi masyarakat dan membantu fungsi pelayanan kesehatan rujukan dan dibawah Dinas Kesehatan Kabupaten Klungkung. Dalam melaksanakan tugasnya dapat melakukan koordinasi dengan Puskesmas yang mewilayahinya. Diadakannya AGD KRIS 118 dilandasi aspek *time management* sebagai implementasi *time saving is life and limb saving* yang mengandung unsur kecepatan atau *quick respons* dan ketepatan berupa mutu pelayanan yang sesuai standar. Unsur kecepatan dipenuhi oleh sistem transportasi dan komunikasi, sedangkan unsur ketepatan dipenuhi oleh kemampuan melakukan pertolongan gawat darurat meliputi *basic life suport* (BLS) dan *advance life suport* (ALS) sesuai masalah yang dihadapi. Dalam kondisi kedaruratan sehari-hari/umum/kebidanan, AGD KRIS 118 bertugas memberikan penanganan pada kejadian kecelakaan lalu lintas, kecelakaan kerja/industri, kecelakaan rumah tangga, pelayanan kebidanan emergensi, rujukan pelayanan kesehatan, bantuan pelayanan kesehatan untuk kegiatan sosial keagamaan. AGD KRIS 118 juga menerima panggilan masyarakat untuk melakukan pelayanan perawatan kesehatan masyarakat (Perkesmas) bagi kelompok masyarakat resiko tinggi yang membutuhkan seperti para lansia yang tidak mampu berobat ke fasilitas pelayanan kesehatan. Sedangkan dalam kondisi kedaruratan khusus/bencana AGD KRIS 118 secara langsung bertugas sebagai Tim Reaksi Cepat (TRC) dibawah komando BPBD sesuai Peraturan Perundang-undangan. Akses yang cepat dan mudah pada pelayanan AGD KRIS 118 adalah kunci keberhasilan atas



manfaat pelayanan. Dalam masa pandemi covid-19, tim reaksi cepat AGD KRIS 118 merupakan garda terdepan dalam penanganan pasien yang terinfeksi covid-19. Penjemputan pasien di rumah dilakukan untuk memastikan pasien dtangani dengan penanganan yang memadai di fasilitas pelayanan kesehatan. Dalam pelaksanaan tugasnya di masa pandemi, tim AGD KRIS menerapkan protokol kesehatan dengan sangat ketat.

5. Pelayanan Kesehatan *Door to Door* atau DORKESMAS. Merupakan program aksi yang melayani pasien langsung di rumah pasien.

6. Peningkatan Pelayanan di Rumah Sakit

Peningkatan pelayanan di rumah sakit berupa penyediaan sarana dan prasarana terkait penanggulangan virus covid-19, peningkatan pelayanan lain dalam rangka mendukung upaya peningkatan kesehatan dengan cara kuratif. Selain itu, seluruh komponen didalam Rumah Sakit Umum Daerah juga aktif mempromosikan protokol kesehatan serta gaya hidup sehat kepada masyarakat.

7. Pemenuhan *Universal Health Coverage*

Pemenuhan jaminan kesehatan secara universal juga merupakan fokus utama Pemerintah Kabupaten Klungkung dalam upaya meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.

Dalam meningkatkan Angka Harapan Hidup, Pemerintah Kabupaten Klungkung memperoleh dukungan sebagai berikut:

1. Bencana covid-19 secara tidak langsung meningkatkan kesedaran masyarakat akan pentingnya menjaga kesehatan dengan pola hidup bersih dan sehat. Hal tersebut mengarah menjadi sebuah kebiasaan yang sangat penting dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
2. Pada tahun 2020, alokasi anggaran bidang kesehatan meningkat tajam dibanding bidang lainnya. Hal tersebut menjadi suatu pengungkit yang baik untuk peningkatan layanan kesehatan yang berdampak pada peningkatan Angka Harapan Hidup di Kabupaten Klungkung.
3. Bantuan perbekalan kesehatan yang diterima dari masyarakat baik komunitas maupun sektor privat dalam masa pandemi covid-19 menunjukkan tingginya toleransi masyarakat pada upaya penanggulangan bencana akibat virus tersebut. Kerjasama dengan masyarakat tersebut menjadi suatu faktor pendukung dalam upaya peningkatan angka harapan hidup di Kabupaten Klungkung.



Dalam meningkatkan Angka Harapan Hidup, prestasi yang diraih Pemerintah Kabupaten Klungkung sebagai berikut:

1. TOP 99 Inovasi KRIS (Kring Sehat) Inovasi pelayanan kesehatan dengan ambulance yang mendatangi masyarakat langsung ke tempat tinggal dan melakukan penanganan awal di tempat tinggal pasien.
2. Penghargaan PASTIKA AWYA PARIWARA, dianugerahkan kepada 10 daerah di Indonesia yang telah memiliki kebijakan/peraturan dan implementasi tentang larangan iklan rokok luar gedung
3. Puskesmas dengan pelayanan ramah anak terbaik 2018
4. Kabupaten dengan Universal Health Coverage diberikan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
5. Role Model Penyelenggara Pelayanan Publik Kategori Baik untuk Rumah Sakit Umum Daerah
6. Kabupaten dengan capaian pelaksanaan Imunisasi Measles Rubella (MR) Fase II Tahun 2018 tertinggi di Provinsi Bali oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

DOKUMENTASI PENCAPAIAN SASARAN



Bupati Klungkung menerima bantuan tempat cuci tangan



Bupati Klungkung Vaksinasi Covid-19



Bupati Klungkung meninjau persiapan ruang isolasi

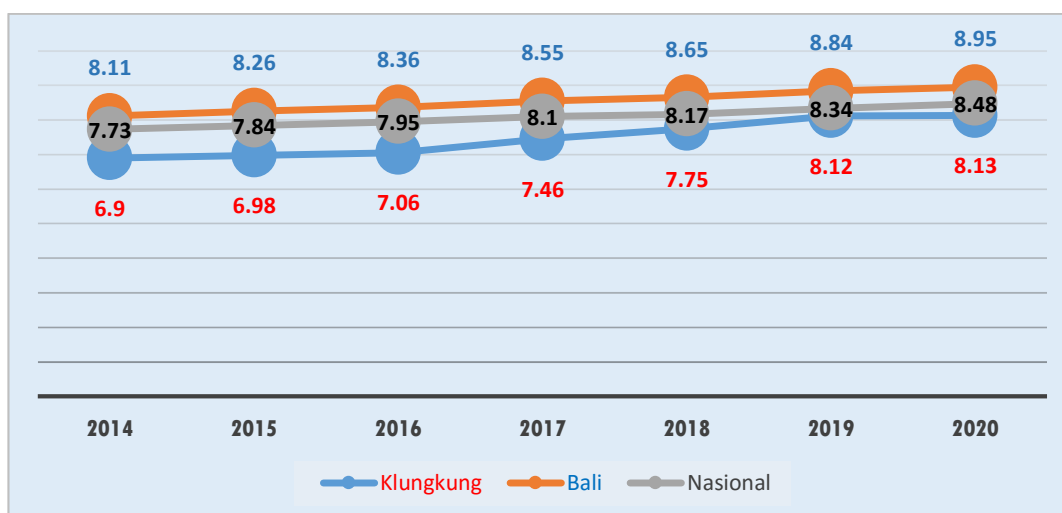


Desinfeksi pasar di masa pandemi



b. Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-Rata Lama Sekolah (RLS/MYS) adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani. Indikator RLS ini dihitung dari variabel pendidikan tertinggi yang ditamatkan dan tingkat pendidikan yang sedang dijalankan. Standar UNDP (Badan Program Pembangunan PBB) adalah minimal 0 tahun dan maksimal 15 tahun. Rata-Rata Lama Sekolah dapat digunakan sebagai salah satu indikator untuk mengukur keberhasilan pembangunan bidang pendidikan. Dibawah ini disajikan capaian kinerja Rata-Rata Lama Sekolah pada tahun 2014 sampai dengan 2019.



Sumber : Provinsi Bali Dalam Angka 2021, Penyediaan Data Perencanaan Pembangunan

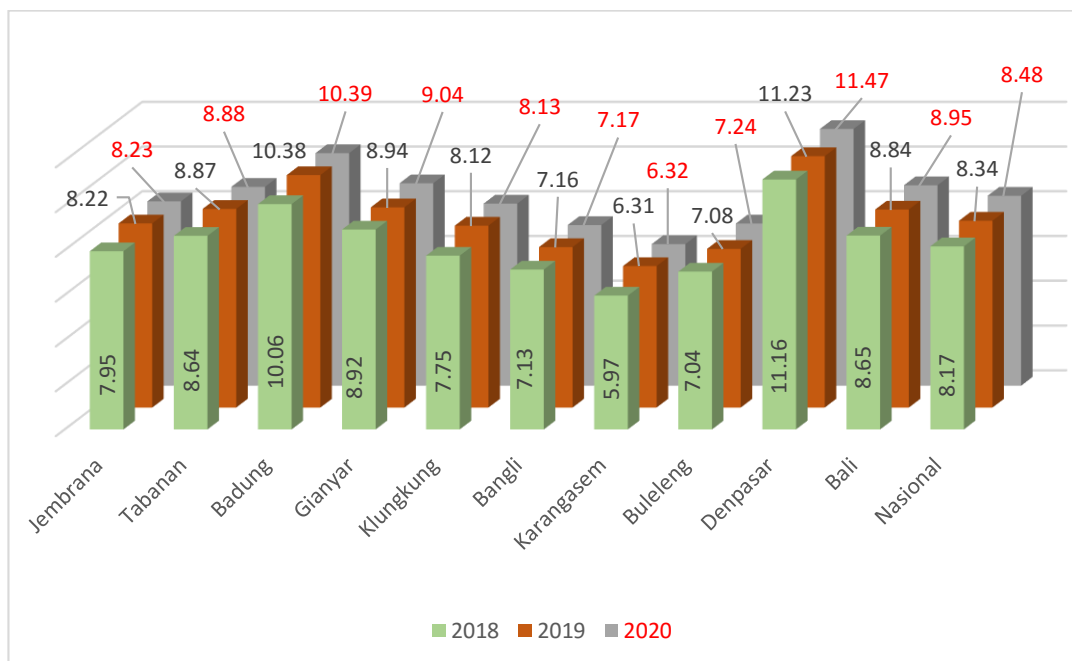
Gambar 3.8 Angka Rata-Rata Lama Sekolah Kab.Klungkung, Provinsi Bali dan Nasional (Tahun), 2014-2020

Berdasarkan gambar diatas dapat diketahui bahwa capaian indikator Rata-Rata Lama Sekolah di Kabupaten Klungkung pada tahun 2020 mencapai angka 8,13 tahun, meningkat dari tahun 2014 yang sebesar 6,90 tahun . Namun Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Klungkung masih berada di bawah Angka Rata-Rata Lama Sekolah Provinsi Bali dan Nasional.

Untuk mendapatkan perbandingan kinerja yang telah dicapai, Angka Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Klungkung perlu dibandingkan dengan Angka Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten/Kota lain di Provinsi Bali. Gambar dibawah



menyajikan perbandingan Angka Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Klungkung dibandingkan dengan Kabupaten/Kota di Provinsi Bali.



Sumber :Provinsi Bali Dalam Angka 2021, Penyediaan Data Perencanaan Pembangunan

Gambar 3.9 Angka Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten/Kota se Provinsi Bali, Provinsi Bali dan Nasional (Tahun), 2018-2020

Berdasarkan gambar di atas, bahwa Angka Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Klungkung berada di urutan 6 dari 9 Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. Angka Rata-Rata Lama Sekolah tertinggi berada di Kota Denpasar dan terendah di Kabupaten Karangasem.

Dalam mewujudkan kinerja peningkatan kualitas pendidikan masyarakat Kabupaten Klungkung, Pemerintah Kabupaten Klungkung mengalami kendala sebagai berikut:

1. Pandemi covid-19 mengharuskan bidang pendidikan yang selama ini melakukan pembelajaran secara tatap muka harus beralih ke metode daring dengan berbagai kendalanya seperti : kurangnya akses siswa/orang tua siswa pada teknologi baik dari sisi keterampilan penggunaan teknologi, perangkat maupun internet; ketersediaan waktu orang tua dalam mendampingi anak belajar secara daring; kemampuan anak dalam memahami materi pelajaran melalui metode daring; kurangnya penguatan atau pendalaman yang dapat dilakukan dalam pembelajaran secara daring; pengawasan terhadap anak-anak dalam



mengakses internet dan berbagai kendala lain.

2. Kondisi geografis Kabupaten Klungkung yang terdiri atas daratan dan kepulauan mempengaruhi pemerataan kualitas pendidikan yang dipicu oleh terbatasnya akses di beberapa sekolah di kepulauan. Keterbatasan akses tersebut juga mencakup akses terhadap internet, perangkat dan transportasi.
3. Kendali mutu dan jaminan kualitas pendidikan merupakan fokus baru yang belum tergarap, hal tersebut sangat mempengaruhi kualitas lulusan sekolah. Dalam suasana pandemi covid-19 di tahun 2020, pendanaan untuk bidang pendidikan berbanding terbalik dengan bidang kesehatan. Kegiatan-kegiatan pendidikan yang dapat ditunda mengalami refocusing termasuk pemeliharaan gedung sekolah, penambahan bahan ajar, fasilitasi penegerian TK, pendidikan non formal, pendidikan kesetaraan terhadap masyarakat yang tidak dapat mengenyam pendidikan formal dan berbagai kegiatan lain mendapat pengurangan anggaran.
4. Kemiskinan menjadi salah satu sumber penyebab rendahnya kesadaran penduduk akan pentingnya pendidikan yang berkualitas bagi anak-anak, mempengaruhi penggunaan teknologi tinggi dalam pendidikan dan membatasi harapan anak-anak untuk mengenyam pendidikan yang lebih tinggi. Kemiskinan juga menjadi masalah baru dalam pendidikan di masa pandemi covid-19 karena membatasi akses terhadap sarana dan prasarana belajar daring.
5. Perubahan fokus pemenuhan kebutuhan selama pandemi.
Banyak sektor terpengaruh pandemi covid-19. Perekonomian tumbuh negatif. Tingkat pengangguran meningkat tajam. Hal tersebut menurunkan pendapatan yang berdampak pada berbagai sisi kehidupan, terutama tingkat pemenuhan kebutuhan keluarga. Fokus utama pemenuhan kebutuhan beralih ke kebutuhan dasar kehidupan seperti pangan, sandang dan papan. Pemenuhan kebutuhan terhadap pendidikan yang berkualitas menjadi tersisihkan. Hal tersebut juga mempengaruhi sisi lain dari dunia pendidikan seperti : penutupan usaha-usaha pendidikan seperti kursus, les dan prvat yang biasanya menjadi pendidikan tambahan selain di sekolah bagi siswa.

Kabupaten Klungkung merupakan satu diantara kabupaten lain di Indonesia yang harus menyiapkan strategi-strategi baru dalam tetap mewujudkan kualitas pendidikan yang memadai dalam situasi pandemi covid-19. Dalam meningkatkan



kualitas pendidikan di Kabupaten Klungkung, Pemerintah Kabupaten Klungkung melaksanakan strategi sebagai berikut:

1. Mengalihkan proses pembelajaran dari tatap muka ke proses pembelajaran daring.
Untuk tetap menjaga agar penyebaran virus tidak sampai membentuk klaster-klaster baru di dunia pendidikan, Pemerintah Kabupaten Klungkung mengambil kebijakan untuk menerapkan proses pembelajaran tatap muka dengan berbagai kekurangan dan kelebihanannya.
2. Melaksanakan kegiatan-kegiatan perlombaan antar siswa yang dapat dilaksanakan dengan metode daring.
3. Menerapkan protokol kesehatan di sekolah bagi sekolah yang melaksanakan beberapa kegiatan yang mengharuskan adanya tatap muka baik dengan orang tua siswa maupun siswa.
4. Memberikan bantuan kuota internet bagi siswa untuk dapat belajar daring. Hal tersebut merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan akses pendidikan bagi siswa, menggantikan bantuan akses transportasi sekolah yang sebelumnya diberikan pada siswa berupa angkutan siswa gratis.
5. Mengalihkan belanja-belanja operasional sekolah yang sebelumnya untuk sarana dan prasarana gedung menjadi pemenuhan kebutuhan belajar daring.
6. Memberikan sosialisasi dan pembinaan terhadap tenaga pendidik agar dapat mengajar secara optimal melalui metode daring
7. Menghimbau tenaga pendidik dan satuan pendidikan untuk saling berbagi bahan-bahan ajar dalam format daring.
8. Penerimaan siswa baru dilakukan secara daring di Kecamatan Klungkung dan penerimaan siswa di kecamatan lain dilakukan dengan menerapkan sistem penempatan siswa menggunakan rayon atau wilayah terdekat dengan tempat tinggal siswa. Hal tersebut selain menjamin kedekatan pelayanan dengan siswa juga untuk mengurangi kesenjangan sebaran siswa di sekolah yang bertempat di desa dan di perkotaan. Isu bahwa sekolah di perkotaan lebih berkualitas daripada sekolah di pedesaan telah menyebabkan sebaran siswa di sekolah yang berlokasi di wilayah pedesaan menjadi jarang/sedikit dan di sekolah perkotaan justru terlampau padat/berlebihan.
9. Meningkatkan minat dan budaya baca yang dilakukan dengan semakin



meningkatkan tingkat kunjungan ke perpustakaan dan menggalakkan rencana aksi **GEMA ARCA**. Gema Arca (Gerakan Masyarakat Gemar Membaca) adalah suatu rencana aksi yang bertujuan untuk mengkampanyekan gemar membaca di kalangan masyarakat. Rencana aksi Gema Arca direalisasikan dengan penyediaan perpustakaan daerah, perpustakaan di desa-desa, perpustakaan di sekolah-sekolah dan juga penyediaan perpustakaan dalam bentuk mobil keliling yang menyediakan layanan perpustakaan di tempat-tempat keramaian di Kabupaten Klungkung. Dalam masa pandemi, penyediaan perpustakaan keliling tidak dilakukan. Layanan perpustakaan lebih banyak diarahkan ke perpustakaan digital.

10. Kegiatan perlombaan seni dialihkan dari metode tatap muka ke metode daring, dan dilaksanakan hanya untuk beberapa cabang seni terutama yang dapat dilakukan secara daring.

Dalam meningkatkan kualitas pendidikan di situasi pandemi, Pemerintah Kabupaten Klungkung mendapat dukungan sebagai berikut:

1. Kemudahan belajar daring adalah adanya akses yang luas terhadap berbagai bahan ajar yang mudah diperoleh dalam jaringan internet. Hal tersebut meningkatkan keragaman pengajaran yang diterima siswa, meskipun di sisi lain sebagian siswa tidak dapat mengaksesnya.
2. Pengawasan siswa beralih ke pengawasan tingkat keluarga yang lebih mendekatkan interaksi siswa dan orang tua. Hal tersebut menumbuhkan pemahaman bahwa pendidikan terhadap anak tidak hanya diberikan dan ditentukan oleh sekolah namun lebih banyak pada tingkat keluarga.
3. Sektor privat dan masyarakat juga memberikan bantuan belajar daring yang menjadi suatu faktor pendukung terwujudnya peningkatan akses pendidikan di masa pandemi.

Dalam pencapaian sasaran bidang pendidikan, Pemerintah Kabupaten Klungkung meraih prestasi diantaranya:

1. Juara I Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SD Cabang Olahraga Bulutangkis Tunggal Putra
2. Juara I Nasional Festival Literasi Sekolah (FLS) SMP Cabang Lomba Cerpen
3. Juara III Nasional Pemilihan Guru SD Berprestasi



DOKUMENTASI PENCAPAIAN SASARAN



Bupati Klungkung menyerahkan beasiswa Program Indonesia Pintar



Layanan perpustakaan kab klungkung



Sekda Kab. Klungkung menerima Bantuan Kartu Internet



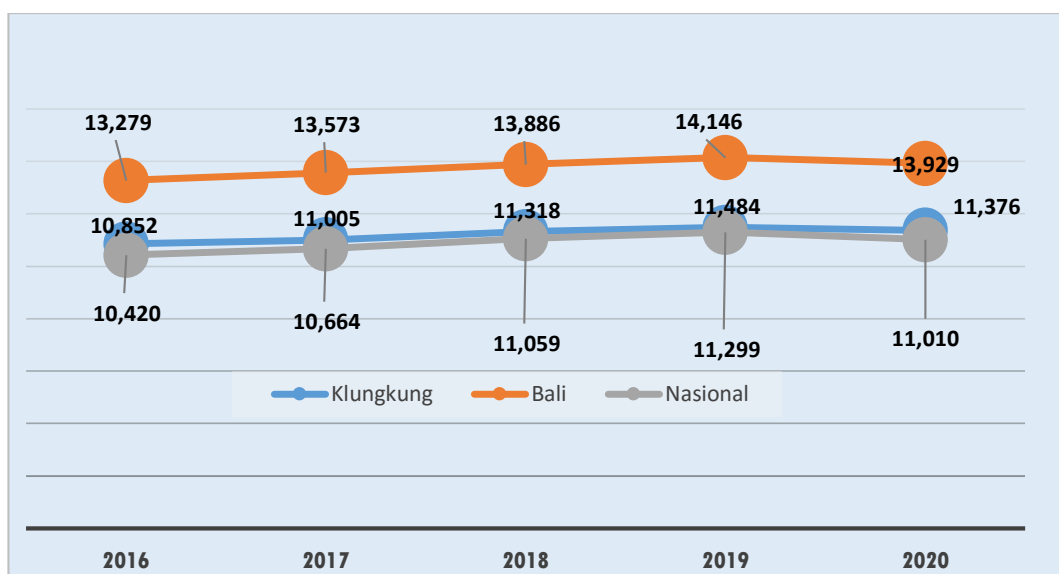
Penerapan Protokol Kesehatan di Sekolah

c. Pengeluaran Per Kapita

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu cara untuk mengukur taraf kualitas fisik dan non fisik penduduk. Kualitas fisik tercermin dari angka harapan hidup; sedangkan kualitas non fisik (intelektualitas) melalui lamanya rata-rata penduduk bersekolah dan angka melek huruf; dan mempertimbangkan kemampuan ekonomi masyarakat yang tercermin dari nilai *purcashing power parity index*(ppp) atau sering disebut pengeluaran per kapita. Komponen standar hidup layak diukur dengan indikator rata-rata konsumsi riil yang telah disesuaikan. Sebagai catatan, UNDP menggunakan indikator PDB per kapita riil yang telah disesuaikan (*adjusted real GDP per capita*) sebagai ukuran komponen tersebut karena tidak tersedia indikator lain yang lebih baik untuk keperluan perbandingan antar negara.



Dalam menghadapi tantangan globalisasi, pemerintah tidak akan cukup kuat untuk mengatasi permasalahan kemiskinan dan kesenjangan tanpa dukungan masyarakat. Namun, keberlanjutan pembangunan pun akan terhenti manakala masyarakat yang menjadi tulang punggung pembangunan tidak cukup memiliki kemampuan untuk mengelola sumber daya yang dimiliki. Untuk mengatasi hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Klungkung mencanangkan berbagai program unggulan untuk meningkatkan daya beli masyarakat. Hal tersebut dapat dilihat dari peningkatan daya beli masyarakat yang ditunjukkan pada gambar berikut:



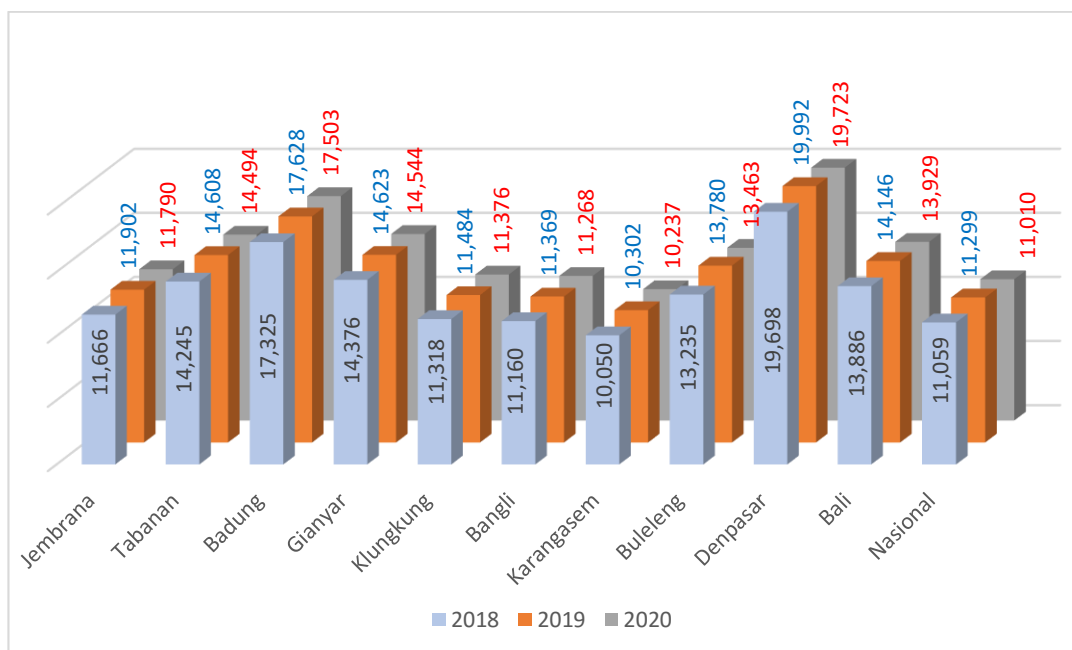
Sumber :Provinsi Bali Dalam Angka 2021, Penyediaan Data Perencanaan Pembangunan

Gambar 3.10 Pengeluaran Per Kapita/Tahun/Orang Kabupaten Klungkung,Provinsi Bali dan Nasional (Rp. 000), 2016-2020

Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa pengeluaran per kapita penduduk di Kabupaten Klungkung mencapai Rp. 11.376.000 Per orang Per Tahun. Angka tersebut berada di atas angka pengeluaran per kapita penduduk secara nasional yang sebesar Rp. 11.010.000 per orang per tahun. Dibandingkan dengan Provinsi Bali, Angka Pengeluaran Per Kapita Kabupaten Klungkung masih berada di bawah Provinsi Bali yang sebesar Rp. 13.929.000 per orang per tahun. Jika diamati, pada tahun 2020, secara nasional, regional bali dan lokal Kabupaten Klungkung terdapat penurunan pengeluaran per kapita penduduk. Hal tersebut merupakan dampak dari pandemi covid-19 yang menghambat pertumbuhan ekonomi dan berdampak pada penghasilan penduduk per orang.



Untuk memperoleh gambaran capaian kinerja Pengeluaran per kapita penduduk di Kabupaten Klungkung perlu dibandingkan dengan angka pengeluaran per kapita penduduk di Kabupaten/Kota lain di Provinsi Bali. Gambar berikut menyajikan angka pengeluaran per kapita penduduk di Kabupaten/Kota di Provinsi Bali pada tahun 2018-2020



Sumber :Provinsi Bali Dalam Angka 2021, Penyediaan Data Perencanaan Pembangunan

Gambar 3.11 Pengeluaran Per Kapita/Tahun/Orang Kabupaten/Kota se Provinsi Bali, Provinsi Bali dan Nasional (Rp. 000), 2018-2020

Capaian kinerja pengeluaran per kapita per tahun per orang Kabupaten Klungkung berada di peringkat 7 dari 9 Kabupaten/Kota di Bali. Pengeluaran per kapita tertinggi ada di Kota Denpasar dan terendah ada di Kabupaten Karangasem. Sebagai gambaran, berikut disajikan data penduduk Kabupaten Klungkung berdasarkan pekerjaan pada tahun 2020.



Tabel 3.4
Penduduk Berdasarkan Pekerjaan Tahun 2020

No.	Pekerjaan	Jumlah	%
1.	Belum/Tidak Bekerja	61.082	27,86
2.	Pelajar/Mahasiswa	29.093	13,27
3.	Pertanian/Peternakan/Perikanan	32.646	14,89
4.	Perdagangan	9.334	4,26
5.	Industri	347	0,16
6.	Perangkat desa	383	0,17
7.	Konstruksi	283	0,13
8.	PNS	4.704	2,15
9.	Swasta	30.812	14,05
10.	Wiraswasta	15.777	7,20
11.	Lainnya	34.785	15,87
	Total	219.246	100,00

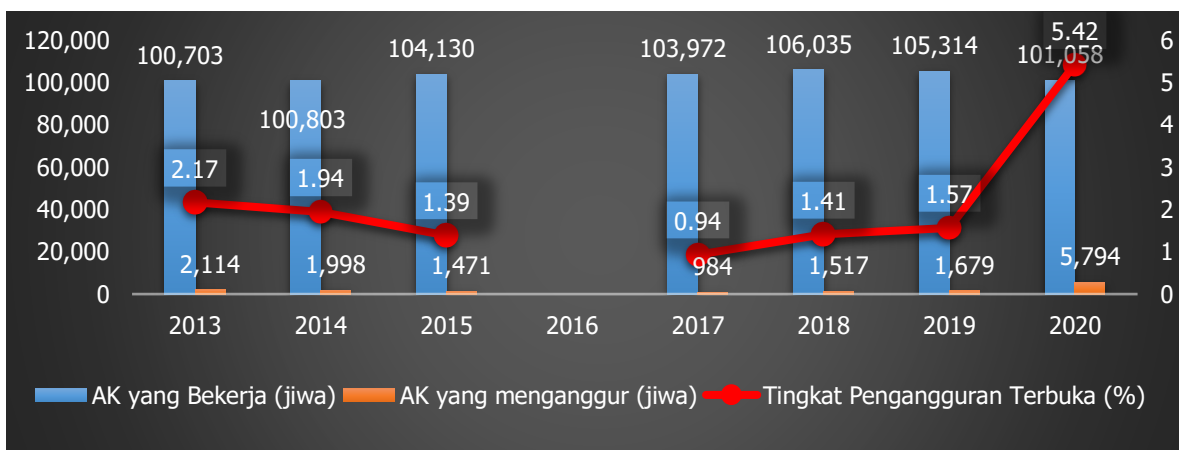
Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2021

Mata pencaharian masyarakat Klungkung didominasi pertanian/peternakan/perikanan sebesar 32.646 jiwa atau sebesar 14,89%. Kondisi penduduk yang belum/tidak bekerja cukup banyak yaitu sebanyak 61.082 jiwa atau sebesar 27,86%. Kondisi tersebut dikarenakan penduduk yang berusia tidak produktif yaitu usia 0-4 dan > 60 tahun yang sebesar 21,41% dan sisanya merupakan angkatan kerja yang sedang mencari pekerjaan. Perbandingan antara penduduk yang bekerja dan tidak bekerja serta penduduk yang bukan angkatan kerja di Kabupaten Klungkung masih cukup baik karena prosentase penduduk yang bekerja adalah sebesar 58,87% sedangkan sisanya adalah belum/ tidak bekerja dan masih berstatus pelajar.

Kondisi ketenagakerjaan di Kabupaten Klungkung dapat dilihat dari angka pengangguran terbuka. Tingkat pengangguran terbuka adalah perbandingan jumlah pengangguran dengan jumlah Angkatan kerja. Adapun tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Klungkung dapat dijelaskan sebagaimana dalam gambar di bawah ini.



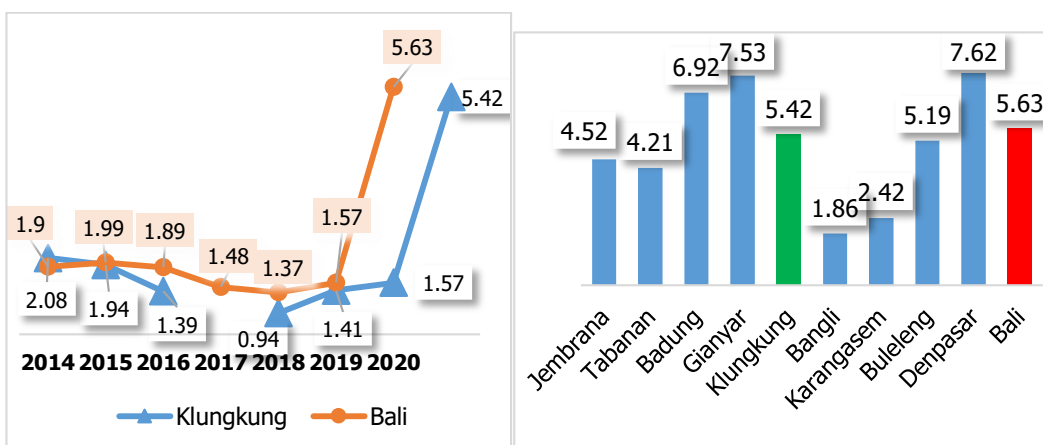
Pemerintah Kabupaten Klungkung
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2020



Sumber : BPS Prov. Bali, 2021; *2016 tidak ada pendataan

Gambar 3.12. Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Klungkung Tahun 2013-2020

Tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Klungkung berfluktuasi dengan kecenderungan meningkat yaitu dari 1,94% di tahun 2014 menurun menjadi 5,42% di tahun 2020, meski jika dibandingkan dengan TPT Tahun 2019 yang sebesar 1,57% terjadi peningkatan TPT. Jumlah pengangguran terbuka juga berfluktuasi dengan kecenderungan meningkat yaitu dari 1.998 jiwa di tahun 2014 meningkat menjadi 5.794 jiwa di tahun 2020 meski lebih tinggi dari tahun 2019 yang mencapai 1.679 jiwa.



Sumber : BPS Prov. Bali, 2021; *2016 tidak ada pendataan

Gambar 3.13. Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Klungkung dan Provinsi Bali Tahun 2014-2020 dan perbandingan TPT Kabupaten/Kota di Bali Tahun 2020



Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Klungkung dan Provinsi Bali berfluktuasi dengan kecenderungan meningkat pada tahun 2020. Pada tahun 2014, TPT Kabupaten Klungkung sebesar 2,08% dan Provinsi Bali mencapai 1,9% meningkat menjadi 5,42% untuk Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Klungkung dan 5,63% untuk Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Bali di tahun 2020. Sedangkan jika diperbandingkan dengan Kabupaten/Kota lainnya di Bali, maka tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Klungkung berada di peringkat 4 tertinggi. Tingkat Pengangguran Terbuka tertinggi ada di Kota Denpasar yang mencapai 7,62% dan yang terendah di Kabupaten Bangli yaitu sebesar 1,62%.

Pada tahun 2020, daya beli masyarakat yang menurun dari tahun sebelumnya. Hal tersebut disebabkan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Meningkatnya pengangguran terbuka di Kabupaten Klungkung. Meningkatnya pengangguran di Kabupaten Klungkung salah satunya disebabkan oleh bencana pandemi covid-19 yang memaksa sektor-sektor perekonomian terpaksa ditutup, tak terkecuali sektor pariwisata. Kabupaten Klungkung termasuk salah satu wilayah yang menggantungkan perekonomian pada sektor pariwisata. Selain ditutupnya sektor pariwisata di dalam daerah Bali, pemulangan Tenaga Kerja Indonesia yang bekerja pada sektor pariwisata diluar negeri juga menambah peningkatan pengangguran.
2. Meningkatnya jumlah usaha kecil yang terdampak covid-19
Selain pengangguran akibat pemutusan hubungan kerja, pengangguran akibat usaha yang ditutup juga memunculkan pengangguran dari pemilik usaha tersebut. Pemilik usaha menjadi tidak memiliki pekerjaan, dan untuk memulai usaha baru memerlukan permodalan dan situasi yang kondusif.
3. Refocusing anggaran juga mengakibatkan ditundanya program fasilitasi pemberangkatan tenaga kerja ke luar negeri, program peningkatan kompetensi teknis berupa pelatihan-pelatihan serta sertifikasi tenaga kerja serta pelatihan wirausaha baru menjadi terhambat.

Untuk mengatasi permasalahan pengangguran di Kabupaten Klungkung, Pemerintah Kabupaten Klungkung melaksanakan beberapa strategi yang ditujukan pada tenaga kerja Kabupaten Klungkung, diantaranya:



1. Penyaluran Bantuan Langsung Tunai kepada tenaga kerja yang terdampak covid-19. Hal tersebut diharapkan dapat menjadi stimulus yang membantu tenaga kerja.
2. Penyaluran Bantuan Langsung Tunai kepada pelaku wirausaha.
3. Pembinaan terhadap wirausaha yang telah ada.

Dalam meningkatkan daya beli masyarakat, Pemerintah Kabupaten Klungkung memperoleh dukungan sebagai berikut:

1. Sebagian kecil tenaga kerja yang terkena pemutusan hubungan kerja membuka usaha kecil untuk membantu peningkatan pendapatan. Hal tersebut membantu penggerakan perekonomian sekitarnya.
2. Pelaksanaan kegiatan pembangunan oleh Pemerintah membantu adanya peluang pekerjaan seperti padat karya dan pelaksanaan paket-paket pengadaan barang/jasa pemerintah.

Dalam melaksanakan pelayanan publik, Pemerintah Kabupaten senantiasa dituntut untuk melaksanakan pelayanan dengan efektif dan efisien. Untuk mengukur tingkat efisiensi pencapaian sasaran, dapat dilakukan dengan melakukan Analisis Efisiensi. Analisis efisiensi difokuskan pada indikator input dan output dari suatu kegiatan. Dalam hal ini, diukur dari kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan *input* yang lebih sedikit dalam menghasilkan *output* yang sama/atau lebih besar, atau persentase capaian *output* sama tinggi daripada persentase capaian *input*. Efisiensi suatu kegiatan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE). Dibawah ini disajikan analisis tingkat efisiensi sasaran Terwujudnya Pembangunan Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing sebagai berikut:

Tabel 3.5
 Tingkat Efisiensi
 Terwujudnya Pembangunan Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
 Tahun 2020

Indikator Kinerja	Target Capaian Sasaran (%)	Target Capaian Keuangan (%)	Standar Efisiensi	Realisasi Capaian Sasaran (%)	Realisasi Capaian Keuangan (%)	Indeks Efisiensi	Tingkat Efisiensi	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	100	100	1.00	99.45	91	1.09	0.09	Efisien
Rata - Rata	100	100	1.00	99.45	91	1.09	0.09	Efisien

Sumber : data diolah



Pemerintah Kabupaten Klungkung
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2020

Dari hasil analisis dapat diketahui bahwa pada tahun 2020, tingkat efisiensi sasaran Terwujudnya Pembangunan Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing adalah sebesar 0,09 dimana indeks efisiensi lebih tinggi dari standar efisiensi. Pada tahun 2020 sasaran Terwujudnya Pembangunan Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing dicapai dengan efisien. Sasaran Terwujudnya Pembangunan Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing didukung dengan program pendukung sebagaimana tabel dibawah ini.

Tabel 3.6
Efisiensi Anggaran
Sasaran Terwujudnya Pembangunan Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
Tahun 2020

Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Efisiensi (Rp)	Capaian (%)	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Program Upaya Kesehatan Masyarakat	31,520,009,459.00	27,322,564,335.50	4,197,445,123.50	86.68	Dinas Kesehatan
Program Peningkatan Kesehatan Ibu, Anak, dan Lansia	315,972,330.00	315,130,600.00	841,730.00	99.73	Dinas Kesehatan
Program Jaminan Kesehatan Masyarakat	41,899,278,310.89	39,381,707,199.00	2,517,571,111.89	93.99	Dinas Kesehatan
Program Pengembangan Lingkungan Sehat	958,713,350.00	601,998,350.00	356,715,000.00	62.79	Dinas Kesehatan
Program Penanggulangan Penyakit Menular	1,342,621,050.00	1,086,632,847.00	255,988,203.00	80.93	Dinas Kesehatan
Program Pencegahan Penyakit Menular	138,956,000.00	121,883,920.00	17,072,080.00	87.71	Dinas Kesehatan
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	879,233,400.00	654,638,200.00	224,595,200.00	74.46	Dinas Kesehatan
Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular (PTM)	310,604,390.00	301,969,288.00	8,635,102.00	97.22	Dinas Kesehatan
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Perorangan	29,903,905,002.05	19,281,833,941.00	10,622,071,061.05	64.48	Dinas Kesehatan
Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata	13,776,091,067.95	11,736,341,767.00	2,039,749,300.95	85.19	RSUD
Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata	135,560,377.00	133,690,286.00	1,870,091.00	98.62	RSUD
Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah	108,756,146,197.14	107,365,057,148.00	1,391,089,049.14	98.72	RSUD



Pemerintah Kabupaten Klungkung
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2020

Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Efisiensi (Rp)	Capaian (%)	Ket
Program Pendidikan Anak Usia Dini	6,140,971,755.00	5,918,658,934.00	222,312,821.00	96.38	Dinas Pendidikan
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	10,354,625,064.00	10,193,284,087.00	161,340,977.00	98.44	Dinas Pendidikan
Program Pendidikan Non Formal	385,332,500.00	350,411,400.00	34,921,100.00	90.94	Dinas Pendidikan
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD dan Dikmas	1,535,531,290.00	1,535,531,290.00	-	100.00	Dinas Pendidikan
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dikdas	13,644,313,772.00	13,502,743,441.00	141,570,331.00	98.96	Dinas Pendidikan
Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	28,543,442,393.00	25,775,144,833.00	2,768,297,560.00	90.30	Dinas Pendidikan
Program Penyelenggaraan Perpustakaan	74,934,156.00	54,695,446.00	20,238,710.00	72.99	Disarpus
Program Peningkatan dan Pengembangan Prestasi Kepemudaan dan Olahraga	2,197,350,234.00	1,882,438,473.00	314,911,761.00	85.67	Disbudpora
Program Peningkatan Kesempatan Kerja	921,379,500.00	877,340,700.00	44,038,800.00	95.22	Dispermaker
Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	31,998,000.00	31,008,000.00	990,000.00	96.91	Dispermaker
Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja	502,387,000.00	337,589,570.00	164,797,430.00	67.20	Dispermaker
Jumlah	294,269,356,598.03	268,762,294,055.50	25,507,062,542.53	91.33	

Sumber : SIMda Keuangan, 2021

Pada tahun 2020, Sasaran Terwujudnya Pembangunan Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing didukung dengan 23 program pendukung dengan pagu anggaran Perubahan sebesar Rp. 294,269,356,598.03 dan terealisasi sebesar Rp. 268,762,294,055.50 dan sisa anggaran sebesar Rp. 25,507,062,542.53 atau terealisasi sebesar 91,33 persen. Sasaran ini didukung oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Klungkung, Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung, Dinas Pendidikan Kabupaten Klungkung dalam upaya peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, penyediaan tenaga pendidik dan kependidikan serta pelayanan pendidikan non formal dan informal. Selain Dinas Pendidikan, seluruh Kecamatan di Kabupaten Klungkung juga mendukung pencapaian sasaran ini melalui pelaksanaan pekan olahraga dan seni pelajar tingkat kecamatan, pemeliharaan sarana dan



prasarana olahraga, serta penyelenggaraan usaha kesehatan sekolah. Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga mendukung dalam pelaksanaan Pekan Olahraga dan Seni Pelajar tingkat Kabupaten serta pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga yang menjadi kewenangan Kabupaten. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan memegang peranan dalam memberikan pelayanan perpustakaan daerah, desa dan kecamatan maupun perpustakaan keliling untuk mendekatkan pelayanan perpustakaan ke masyarakat. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja memberikan dukungan dalam meningkatkan kualitas tenaga kerja dan perindustrian di Kabupaten Klungkung.

Sasaran 3

Menurunnya Angka Kemiskinan dari 6,29% Menjadi 3%

Ketimpangan dan kemiskinan di Indonesia menjadi fenomena isu yang kompleks. Tiap rezim pemerintah dihadapkan pada pekerjaan menurunkan kemiskinan dan mengurangi kesenjangan di negara berpenduduk 240 juta orang ini. Isu ketimpangan ekonomi sudah ramai dibicarakan di Indonesia sejak 1970-an. Ramai muncul kajian dan pemikiran mencari ramuan agar pertumbuhan ekonomi juga bisa menciptakan pemerataan, yang akhirnya mengurangi ketimpangan. Kemiskinan saat ini memang merupakan suatu kendala dalam masyarakat ataupun dalam ruang lingkup yang lebih luas. Kemiskinan menjadi masalah sosial karena ketika kemiskinan mulai merambah atau bertambah banyak maka angka kriminalitas yang ada akan meningkat. Banyak orang saat ini menerjemahkan kemiskinan sebagai pangkal penyebab masalah sosial dan ekonomi. Kini kemiskinan menjadi masalah sosial ketika stratifikasi dalam masyarakat sudah menciptakan tingkatan atau garis-garis pembatas, sehingga adanya kejanggalan atau batas pemisah dalam interaksi atau komunikasi antara orang yang berada di tingkatan yang dibawah dan di atasnya.

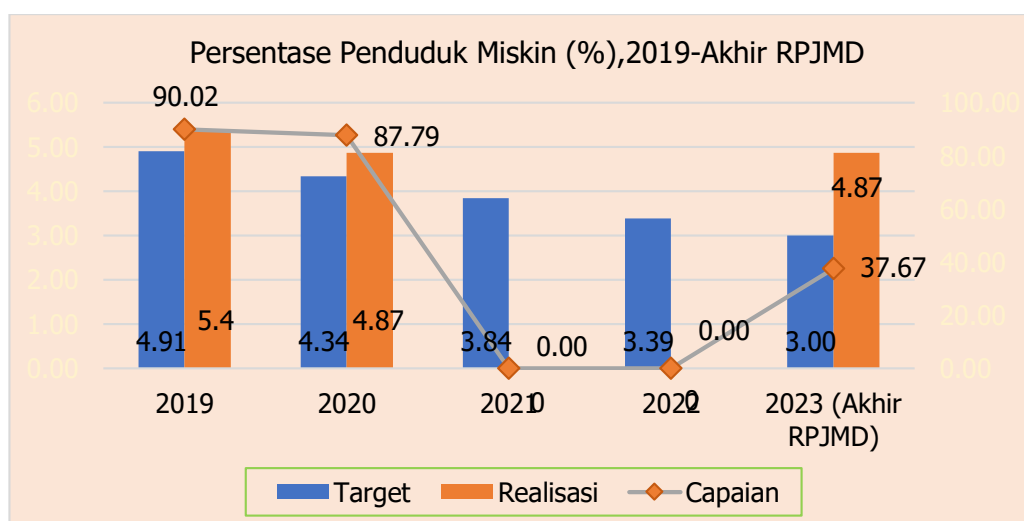
Kemiskinan juga sangat berpengaruh terhadap lingkungan hidup yang akhirnya akan merusak lingkungan itu sendiri. Penduduk miskin yang terdesak akan mencari lahan-lahan kritis atau lahan-lahan konservasi sebagai tempat pemukiman.



Lahan-lahan yang seharusnya berfungsi sebagai kawasan penyangga atau mempunyai fungsi konservasi tersebut akan kehilangan fungsi lingkungannya setelah dimanfaatkan untuk kawasan pemukiman. Akibat berikutnya, maka akan menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan lingkungan.

Selain itu, penduduk miskin pun akan sulit dalam hal mencari lapangan pekerjaan, penduduk miskin tanpa mata pencaharian akan memanfaatkan lingkungan sekitar, sebagai usaha dalam memenuhi kebutuhannya tanpa mempertimbangkan kaidah-kaidah ekologis yang berlaku. Karena desakan ekonomi, banyak penduduk yang dalam memenuhi kebutuhan hidupnya memasuki kawasan-kawasan yang sebenarnya dilindungi, apabila tidak dicegah dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama menyebabkan kawasan lindung akan berkurang bahkan hilang sama sekali, yang berdampak pada hilangnya fungsi lingkungan (sebagai pemberi jasa lingkungan).

Berangkat dari pentingnya mendukung program nasional dalam menurunkan angka kemiskinan, Pemerintah Kabupaten Klungkung menetapkan sasaran Menurunnya Angka Kemiskinan dari 6,29% menjadi 3% yang diukur dengan indikator kinerja Persentase Penduduk Miskin. Capaian target indikator sasaran Menurunnya Angka Kemiskinan dari 6,29% menjadi 3% tahun 2019 disajikan pada grafik sebagai berikut:

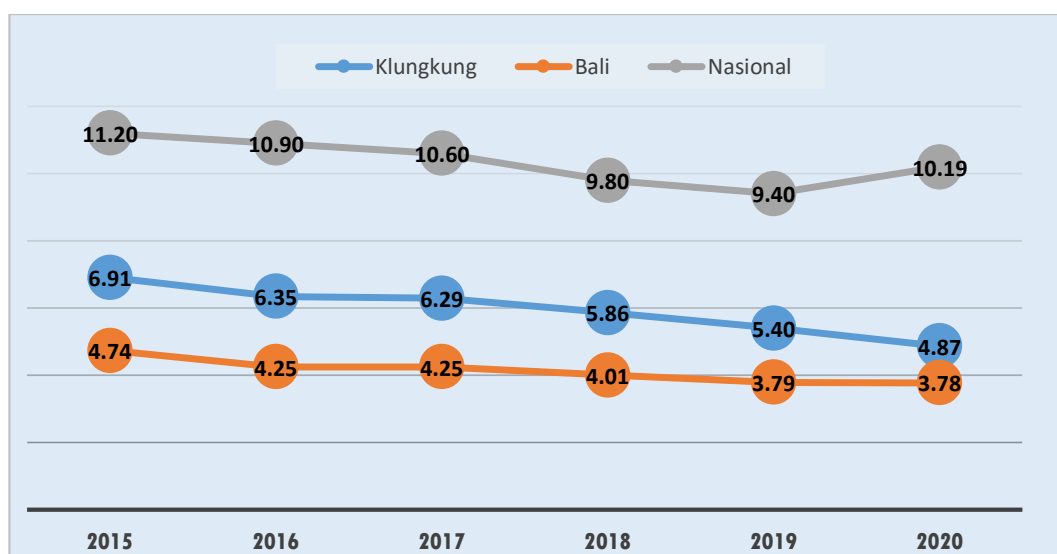


Sumber : Kabupaten Klungkung Dalam Angka 2021, Penyediaan Data Perencanaan Pembangunan

Gambar 3.14 Persentase Penduduk Miskin (%), 2019-2023 dan Capaian Akhir RPJMD.



Berdasarkan gambar diatas dapat diketahui bahwa capaian indikator Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Klungkung pada tahun 2020 belum mencapai target yang ditetapkan. Pada tahun 2020, Persentase Penduduk Miskin ditargetkan sebesar 4,34 persen namun berdasarkan hasil perhitungan Badan Pusat Statistik Kabupaten Klungkung, Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Klungkung adalah sejumlah 4,87 persen. Untuk melihat capaian kinerja penurunan kemiskinan ini perlu dilihat trend persentase penduduk miskin di Kabupaten Klungkung. Gambar berikut menyajikan trend persentase penduduk miskin di Kabupaten Klungkung dibandingkan dengan Provinsi Bali dan Nasional.



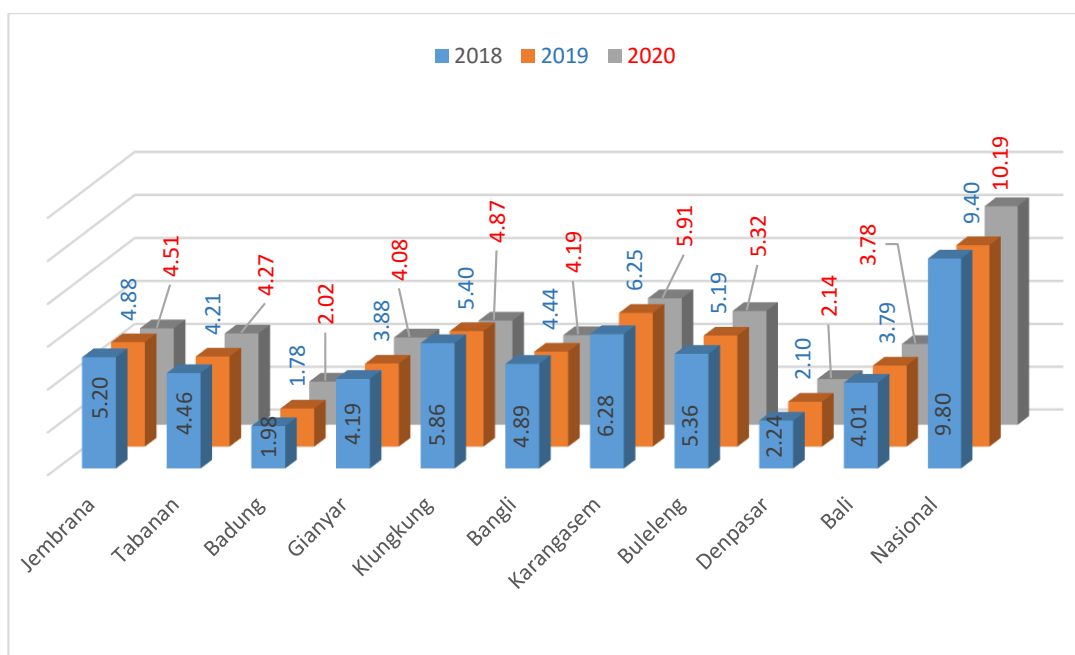
Sumber : Provinsi Bali Dalam Angka 2020, Penyediaan Data Perencanaan Pembangunan

Gambar 3.15 Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali dan Nasional (%), 2015-2020

Jika dilihat dari trend Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Klungkung terus mengalami penurunan, dimana sebelumnya Persentase Penduduk Miskin pada tahun 2015 sebesar 6,91 persen turun menjadi 4,87 persen di tahun 2020. Dibandingkan dengan Provinsi Bali, persentase penduduk miskin di Kabupaten Klungkung masih berada diatas rata-rata Provinsi Bali. Sedangkan jika dibandingkan dengan persentase penduduk miskin nasional, persentase penduduk miskin di Kabupaten Klungkung lebih rendah dari angka nasional sebesar 10,19 persen di tahun 2020. Untuk itu diperlukan usaha-usaha untuk mempertahankan pertumbuhan penduduk miskin tidak melewati target yang telah ditetapkan.



Untuk mendapatkan perbandingan kinerja yang telah dicapai, Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Klungkung perlu dibandingkan dengan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. Gambar dibawah menyajikan perbandingan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Klungkung dibandingkan dengan Kabupaten/Kota di Provinsi Bali.



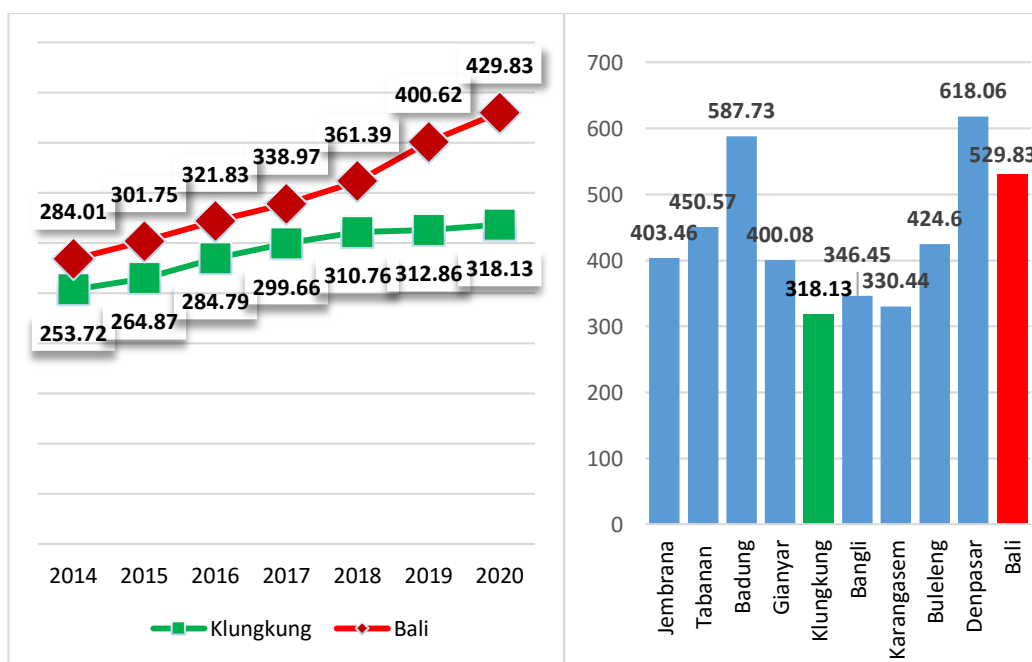
Sumber : Provinsi Bali Dalam Angka 2021, Penyediaan Data Perencanaan Pembangunan

Gambar 3.16 Persentase Penduduk Miskin Kabupaten/Kota di Provinsi Bali, Provinsi Bali dan Nasional (%), 2018-2020

Berdasarkan gambar di atas, maka terlihat Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Klungkung berada di posisi ke 7 dari 9 Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. Persentase penduduk miskin terbanyak ada di Kabupaten Karangasem dengan 5,91 persen dan terendah ada di Kabupaten Badung dengan 2,02 persen. Jika dibandingkan dengan Provinsi Bali, Kabupaten Klungkung masih berada di bawah rata-rata provinsi yang sebesar 3,78 persen, namun masih berada di bawah rata-rata nasional yang sebesar 10,19 persen. Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan utama di Kabupaten Klungkung, karena dengan jumlah penduduk yang sedikit, persentase penduduk miskinnya lebih tinggi dari Kabupaten/Kota lain di Provinsi Bali.



Tingkat kemiskinan diukur berdasarkan pendekatan pemenuhan kebutuhan dasar, atau kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan, yang diukur menurut Garis Kemiskinan. Adapun perkembangan garis kemiskinan Kabupaten Klungkung adalah sebagaimana dalam gambar di bawah ini.

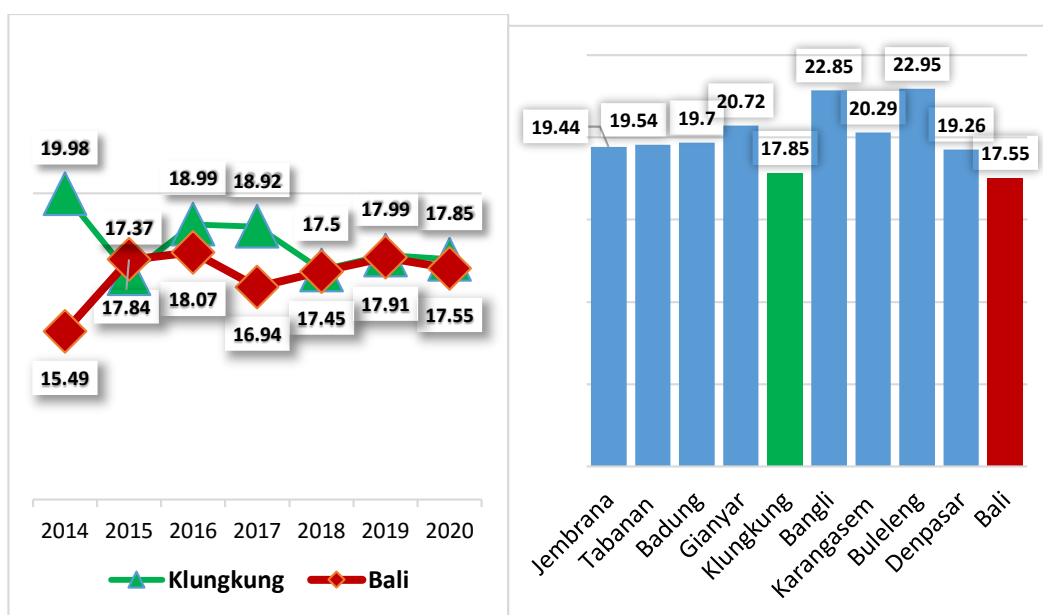


Sumber : BPS Prov. Bali, 2021

Gambar 3.17 Perkembangan Garis Kemiskinan (ribu rupiah) Kabupaten Klungkung Tahun 2014-2020 dan Perbandingannya dengan Kabupaten/Kota di Bali Tahun 2020

Garis kemiskinan Kabupaten Klungkung paling rendah diantara Kabupaten/kota di Bali. Hal ini menunjukkan biaya hidup di Klungkung masih lebih murah dibandingkan kabupaten/kota lainnya, karena terjaganya inflasi. Pada tahun 2014, garis kemiskinan Kabupaten Klungkung baru mencapai Rp 253,72 ribu meningkat menjadi Rp 318,13 ribu di tahun 2020 dan merupakan yang terendah di Bali.

Distribusi pendapatan digunakan untuk melihat bagaimana sebaran penduduk yang menikmati pendapatan di suatu daerah. Distribusi pendapatan di Kabupaten Klungkung dapat dijelaskan sebagaimana dalam gambar dibawah ini.



Sumber : BPS Prov. Bali, 2021

Gambar 3.18 Perbandingan Distribusi Pendapatan 40% penduduk pendapatan terendah Kabupaten Klungkung dengan Provinsi Bali Tahun 2014-2020 dan dengan Kabupaten/Kota lainnya di Bali Tahun 2020

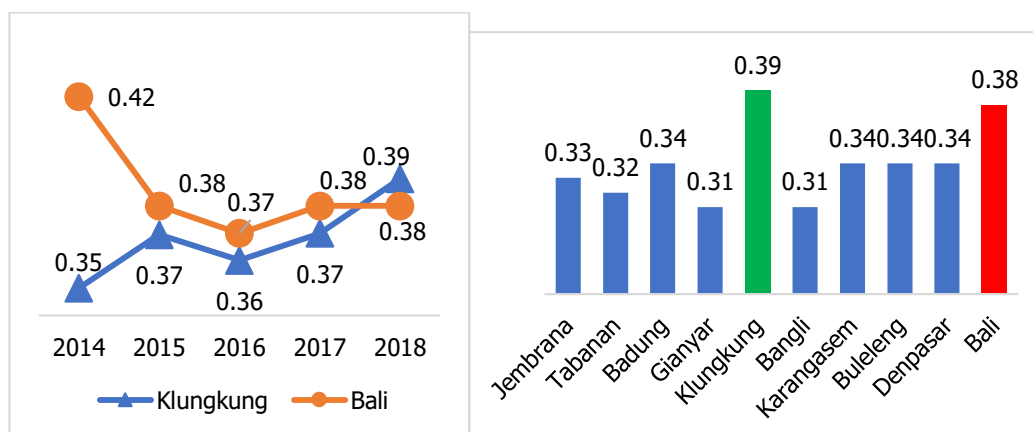
Distribusi pendapatan dari 40% penduduk dengan pendapatan terendah di Kabupaten Klungkung berfluktuasi dengan kecenderungan menurun. Pada tahun 2014, distribusi pendapatannya mencapai 19,98% menurun menjadi 17,85% di tahun 2020 dan sedikit masih diatas capaian Provinsi Bali. Dibandingkan dengan Kabupaten/kota lainnya di Bali, maka distribusi pendapatan 40% penduduk dengan pendapatan terendah berada di peringkat terbawah dari 9 kabupaten/kota yang ada di Bali. Distribusi yang tertinggi dicapai oleh Kabupaten Buleleng yang mencapai 22,95%.

Gini Ratio juga merupakan salah satu alat untuk melihat sebaran kemiskinan di suatu wilayah. Seberapa besar ketidakmerataan pembagian pendapatan di suatu wilayah. Semakin besar semakin buruk ketidakmerataan pendapatan di suatu wilayah. Gini ratio Kabupaten Klungkung berfluktuasi dengan kecenderungan meningkat. Pada tahun 2014, gini ratio Kabupaten Klungkung mencapai 0,35 dibawah gini ratio Provinsi Bali yang mencapai 0,42. Pada tahun 2018 capaian gini ratio Kabupaten Klungkung mengalami peningkatan menjadi 0,39 dan untuk pertama kali berada di atas capaian Provinsi Bali yang mencapai 0,38. Sedangkan dibandingkan dengan Kabupaten Kota lainnya di Bali pada tahun 2018, gini rasio



Kabupaten Klungkung merupakan yang tertinggi di Bali dan yang terendah dicapai oleh Kabupaten Bangli dan Gianyar yaitu sebesar 0,31.

Adapun perkembangan gini ratio Kabupaten Klungkung adalah sebagaimana dalam gambar di bawah ini.



Sumber : BPS Prov. Bali, 2020

Gambar 3.19 Perbandingan Gini Ratio Kabupaten Klungkung dengan Provinsi Bali Tahun 2014-2018 dan dengan Kabupaten/Kota lainnya di Bali Tahun 2018

Dalam usaha mencapai sasaran menurunnya angka kemiskinan dari 6,29% menjadi 3%, Pemerintah Kabupaten Klungkung menemui kendala sebagai berikut:

1. Meningkatnya pengangguran terbuka mengakibatkan munculnya klaster-klaster kemiskinan baru.
2. Belum efektifnya pemberian bantuan sosial dalam menanggulangi kemiskinan dan tingkat ketimpangan, disebabkan oleh beberapa penyimpangan yang ditemui dalam penyalurannya.
3. Inflasi harga bahan pangan yang cukup tinggi mengakibatkan masyarakat yang rentan yang berada di perbatasan garis kemiskinan, menjadi miskin tatkala terdapat kenaikan harga bahan pangan pokok.
4. Lemahnya pendataan terkait kemiskinan berupa :
 - a. Data *by name by address* penduduk miskin yang sering tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya. Hal ini menyebabkan bantuan yang diberikan tidak dapat sampai kepada penduduk yang benar-benar membutuhkan.
 - b. Profil kemiskinan *by name by address* yang tidak lengkap. Hal ini menyebabkan jenis bantuan yang diberikan tidak sesuai dengan penyebab kemiskinannya.



Untuk mencapai penurunan Persentase Penduduk Miskin sangat ditentukan oleh pelaksanaan pembangunan di segala bidang di Kabupaten Klungkung, mengingat permasalahan kemiskinan adalah permasalahan multi sektor. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Klungkung dalam menurunkan Persentase Penduduk Miskin adalah sebagai berikut:

1. Monitoring Kondisi Kemiskinan

Secara berkala dilakukan kegiatan Bedah Desa yang merupakan kegiatan untuk monitoring pelaksanaan pembangunan di Desa sekaligus memastikan penanganan atas kemiskinan yang tepat sesuai permasalahan yang dihadapi.

2. Gerakan Masyarakat Berantas Kemiskinan (Gema Taskin) melalui pemberian bantuan bedah rumah, Bantuan Pangan Non Tunai (RASTRA), Program Keluarga Harapan (PKH) dan capaian sampai dengan tahun 2020 adalah sebagai berikut :

a. Bedah Rumah dan Rehab Rumah

Bantuan bedah rumah sebagaimana dsajikan dalam tabel.

Tabel 3.7
Program Bantuan Bedah Rumah dan Rehab Rumah di Kabupaten Klungkung
Tahun 2010-2020

NO	TAHUN	BANTUAN BEDAH RUMAH/REHAB RUMAH TAK LAYAK HUNI				JUMLAH	KET.
		PROVINSI		KABUPATEN/KOTA			
		BEDAH RUMAH APBD PROVINSI	BEDAH RUMAH CSR	BEDAH/REHAB RUMAH APBD KAB/KOTA	KETERANGAN BANTUAN CSR		
1	2010	116	-	-	-	116	Bedah Rmh
2	2011	180	-	-	-	180	Bedah Rmh
3	2012	179	-	2	-	181	Bedah Rmh
4	2013	123	-	2	-	125	Bedah Rmh
5	2014	110	10	248	BPD 10	368	Bedah Rmh
6	2015	110	23	173	Yayasan Indah Berbagi(2), Pos Bali(3), Gerakan Koperasi(1), dan Bansos Bupati(2), BPD 15	306	Bedah Rmh



Pemerintah Kabupaten Klungkung
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2020

NO	TAHUN	BANTUAN BEDAH RUMAH/REHAB RUMAH TAK LAYAK HUNI				JUMLAH	KET.
		PROVINSI		KABUPATEN/KOTA			
		BEDAH RUMAH APBD PROVINSI	BEDAH RUMAH CSR	BEDAH/REHAB RUMAH APBD KAB/KOTA	KETERANGAN BANTUAN CSR		
7	2016	89	15	175	BPD 15	279	Bedah Rmh
8	2017		10	198	BPD 8, Gangga 2	208	Bedah Rmh
				373		373	Rehab Rumah
9	2018	37	15	80	15 BPD	132	Bedah Rumah
						47	Rehab Rumah
10	2019	243 (BKK Badung)	-	109			Bedah Rumah
				219			Rehab Rumah
11	2020						Tidak Ada karena refocusing anggaran
	JUMLAH	1.187	73	1,579		2,839	

Sumber :Dinas SosialPPPA, 2021

- b. Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) = 7.579 KPM
 - c. Program Keluarga Harapan PKH = 3.780 KK
 - d. Bantuan Sembako kepada Penyandang Disabilitas, untuk tahun 2020 sebanyak 48 paket dan sampai dengan tahun 2020 sebanyak 482 paket.
 - e. Bantuan Tongkat ketiak, untuk tahun 2020 tidak ada dan sampai dengan tahun 2020 sebanyak 25 buah.
 - f. Bantuan Alat Bantu Dengar, untuk tahun 2020 sebanyak 2 buah dan sampai tahun 2020 sebanyak 32 buah.
 - g. Bantuan Kursi Roda, untuk tahun 2020 sebanyak 12 buah dan sampai tahun 2020 sebanyak 83 buah
 - h. Bantuan Sembako kepada Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ), untuk tahun 2020 sebanyak 40 paket dan sampai dengan tahun 2020 sebanyak 233 paket.
3. Mendorong Tercapainya Penduduk Yang Tumbuh Seimbang.
Penduduk yang tumbuh seimbang merupakan salah satu faktor penentu masalah kemiskinan, dimana jumlah penduduk yang semakin banyak akan



menyebabkan berbagai permasalahan lain karena tidak dibarengi dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi. Upaya untuk mendorong tercapainya penduduk yang tumbuh seimbang ini dilakukan dengan upaya meningkatkan pelayanan masyarakat yang menggunakan KB sehingga masyarakat sangat menyadari pentingnya perencanaan keluarga yang baik. Selain hal tersebut juga dilakukan konseling dan pembinaan kesehatan reproduksi bagi remaja dalam rangka menurunkan angka perkawinan dibawah umur.

4. Menurunkan Angka Pengangguran

Pengangguran merupakan salah satu faktor pendorong peningkatan kemiskinan, karenanya Pemerintah Kabupaten Klungkung melakukan upaya-upaya pemberian pelatihan keterampilan kerja terhadap tenaga kerja agar mampu bersaing dalam persaingan pasar tenaga kerja serta mengadakan kerjasama-kerjasama dengan dunia usaha agar tenaga kerja di Kabupaten Klungkung dapat langsung tersalurkan kepada pihak-pihak yang membutuhkan tenaga kerja. Selain itu, upaya pengurangan angka pengangguran juga dilakukan dengan menggalakkan program transmigrasi ke daerah-daerah yang masih jarang penduduknya.

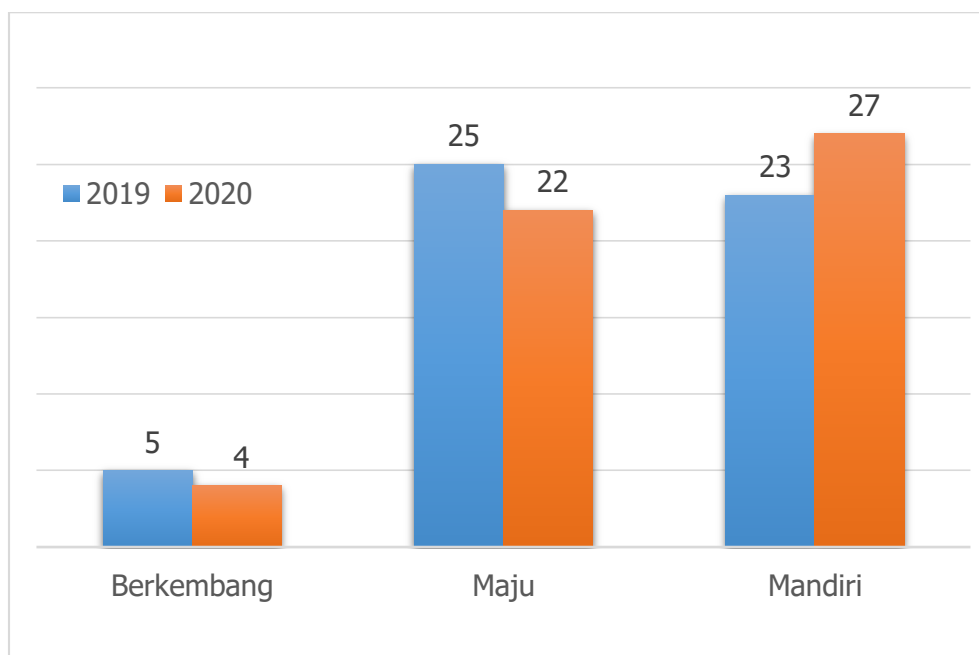
5. Peningkatan Peran Serta Perempuan.

Perempuan seringkali menjadi objek tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi, karenanya Pemerintah Kabupaten Klungkung melakukan upaya-upaya peningkatan peran serta perempuan dengan memberikan pelatihan wirausaha terhadap perempuan yang tidak memiliki pekerjaan sehingga dapat memiliki keterampilan kerja dan diharapkan dapat menghasilkan pendapatan guna turut membantu menopang kehidupan keluarga.

6. Peningkatan Kemandirian Masyarakat di Desa.

Peningkatan kemandirian masyarakat desa dilakukan dengan terus aktif mendorong pemerintahan desa dapat mengembangkan potensi yang ada di Desa masing-masing sesuai dengan karakteristik desanya, sehingga diharapkan dapat mengentaskan kemiskinan. Berbagai upaya telah dilakukan untuk meningkatkan kemandirian desa. Hal tersebut dapat dilihat dari capaian Status Desa di Kabupaten Klungkung yang di dominasi Desa Maju dan Desa Mandiri. Gambar dibawah menyajikan status Desa di Kabupaten Klungkung berdasarkan

Indeks Desa Membangun Tahun 2020 yang dirilis Kementerian Desa sebagai berikut:



Sumber : Indeks Desa Membangun, Website Kementerian Desa, 2021

Gambar 3.19 Status Desa di Kabupaten Klungkung (desa), 2019-2020

Dari data diatas dapat dilihat, bahwa sebanyak 4 desa menyandang status desa Berkembang, 22 desa dengan status maju, dan 27 desa dengan status mandiri. Indeks Desa Membangun (IDM) merupakan Indeks Komposit yang dibentuk berdasarkan tiga indeks, yaitu Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi/Lingkungan. Perangkat indikator yang dikembangkan dalam Indeks Desa Membangun dikembangkan berdasarkan konsepsi bahwa untuk menuju Desa maju dan mandiri perlu kerangka kerja pembangunan berkelanjutan di mana aspek sosial, ekonomi, dan ekologi menjadi kekuatan yang saling mengisi dan menjaga potensi serta kemampuan Desa untuk mensejahterakan kehidupan Desa. Kebijakan dan aktivitas pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa harus menghasilkan pemerataan dan keadilan, didasarkan dan memperkuat nilai-nilai lokal dan budaya, serta ramah lingkungan dengan mengelola potensi sumber daya alam secara baik dan berkelanjutan. Dalam konteks ini ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi bekerja sebagai dimensi yang memperkuat gerak proses dan pencapaian tujuan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa.



Indeks Desa Membangun memotret perkembangan kemandirian Desa berdasarkan implementasi Undang-Undang Desa dengan dukungan Dana Desa serta Pendamping Desa. Indeks Desa Membangun mengarahkan ketepatan intervensi dalam kebijakan dengan korelasi intervensi pembangunan yang tepat dari Pemerintah sesuai dengan partisipasi Masyarakat yang berkorelasi dengan karakteristik wilayah Desa yaitu tipologi dan modal sosial.

Dalam melaksanakan pelayanan publik, Pemerintah Kabupaten senantiasa dituntut untuk melaksanakan pelayanan dengan efektif dan efisien. Untuk mengukur tingkat efisiensi pencapaian sasaran, dapat dilakukan dengan melakukan Analisis Efisiensi. Analisis efisiensi difokuskan pada indikator input dan output dari suatu kegiatan. Dalam hal ini, diukur dari kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan *input* yang lebih sedikit dalam menghasilkan *output* yang sama/atau lebih besar, atau persentase capaian *output* sama tinggi daripada persentase capaian *input*. Efisiensi suatu kegiatan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE). Dibawah ini disajikan analisis tingkat efisiensi sasaran Menurunnya Angka Kemiskinan dari 6,29% menjadi 3% sebagai berikut:

Tabel 3.8.
Tingkat Efisiensi
Menurunnya Angka Kemiskinan dari 6,29% menjadi 3%
Tahun 2020

Indikator Kinerja	Target Capaian Sasaran (%)	Target Capaian Keuangan (%)	Standar Efisiensi	Realisasi Capaian Sasaran (%)	Realisasi Capaian Keuangan (%)	Indeks Efisiensi	Tingkat Efisiensi	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Persentase Penduduk Miskin (%)	100	100	1.00	87.79	83	1.06	0.06	Efisien
Jumlah	100	100	1.00	87.79	83	1.06	0.06	Efisien

Sumber : data diolah

Dari hasil analisis dapat diketahui bahwa pada tahun 2020, tingkat efisiensi sasaran Menurunnya Angka Kemiskinan dari 6,29% menjadi 3% adalah sebesar 0,06 dimana indeks efisiensi lebih tinggi dari standar efisiensi. Pada tahun 2019 sasaran Menurunnya Angka Kemiskinan dari 6,29% menjadi 3% dicapai dengan efisien. Sasaran Menurunnya Angka Kemiskinan dari 6,29% menjadi 3% didukung dengan program pendukung sebagaimana tabel dibawah ini.



Tabel 3.9.
Efisiensi Anggaran
Menurunnya Angka Kemiskinan dari 6,29% menjadi 3%
Tahun 2020

Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Efisiensi (Rp)	Capaian (%)	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	743,266,651.12	635,597,677.00	107,668,974.12	85.51	Dinas Sosial
Program Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	167,869,000.00	164,182,570.00	3,686,430.00	97.80	Dinas Sosial
Program Pemberdayaan Pilar-Pilar kesejahteraan Sosial dan Nilai-Nilai Kepahlawanan	607,316,978.00	441,256,760.00	166,060,218.00	72.66	Dinas Sosial
Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	108,094,950.00	106,213,950.00	1,881,000.00	98.26	Dinas Sosial
Program Perlindungan dan Tumbuh Kembang Anak	56,231,150.00	56,152,650.00	78,500.00	99.86	Dinas Sosial
Program Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Kawasan Pedesaan	2,152,517,454.00	2,097,140,783.00	55,376,671.00	97.43	Dinas Pemberdayaan Masyarakat
Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	1,195,732,304.00	1,180,986,504.00	14,745,800.00	98.77	Dinas Pemberdayaan Masyarakat
Program Keluarga Berencana	1,798,094,304.00	897,200,921.00	900,893,383.00	49.90	Dinas Pemberdayaan Masyarakat
Program Kesehatan Reproduksi Remaja	445,308,540.00	424,115,361.00	21,193,179.00	95.24	Dinas Pemberdayaan Masyarakat
Program Transmigrasi Regional	49,983,000.00	40,434,600.00	9,548,400.00	80.90	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
Jumlah	7,324,414,331.12	6,043,281,776.00	1,281,132,555.12	82.51	

Sumber : Simda Keuangan, 2021

Pada tahun 2020, Sasaran Menurunnya Angka Kemiskinan dari 6,29% menjadi 3% didukung dengan 10 program pendukung dengan pagu anggaran



Pemerintah Kabupaten Klungkung
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2020

perubahan sebesar Rp. 7,324,414,331.12 dan terealisasi sebesar Rp. 6,043,281,776.00 dan sisa anggaran sebesar Rp. 1,281,132,555.12 atau terealisasi sebesar 82,51 persen. Sasaran ini didukung oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, serta seluruh Kecamatan di Kabupaten Klungkung.

DOKUMENTASI PENCAPAIAN SASARAN



Bupati Klungkung menyerahkan bantuan kursi roda



Bupati Klungkung menyerahkan bantuan kepada warga terdampak covid-19



Penyerahan BLT pada warga terdampak covid-19



Pemantauan Pelaksanaan Bedah Rumah



Sasaran 4

Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi

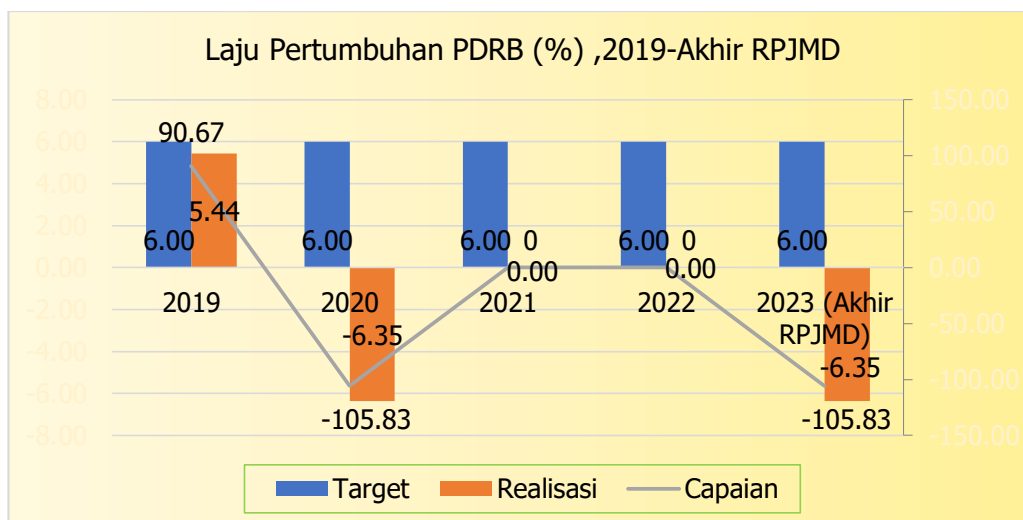
Sampai saat ini telah menjadi perdebatan hangat oleh berbagai pihak mengenai mana yang lebih penting, pertumbuhan atau pemerataan ekonomi. Terlepas dari mana yang lebih penting, yang pasti pertumbuhan ekonomi sangat penting dan dibutuhkan. Sebab, tanpa pertumbuhan tidak akan terjadi peningkatan kesejahteraan, kesempatan kerja, produktivitas, dan distribusi pendapatan. Pertumbuhan ekonomi juga penting untuk mempersiapkan perekonomian menjalani tahapan kemajuan selanjutnya. Pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan jumlah output (barang dan jasa) dalam suatu perekonomian suatu daerah dalam jangka satu tahun. Jadi intinya jika ada peningkatan jumlah produk barang dan jasa barulah perekonomian suatu daerah dikatakan tumbuh. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan apabila jumlah balas jasa riil terhadap penggunaan faktor-faktor produksi pada tahun tertentu lebih besar daripada tahun sebelumnya.

Sama halnya dengan proses pembangunan, pertumbuhan ekonomi juga dipengaruhi oleh SDM. Sumber daya manusia merupakan faktor terpenting dalam proses pembangunan, cepat lambatnya proses pembangunan tergantung kepada sejauh mana sumber daya manusianya selaku subjek pembangunan memiliki kompetensi yang memadai untuk melaksanakan proses pembangunan dengan membangun infrastruktur di daerah-daerah. Sebagian besar negara berkembang bertumpu kepada sumber daya alam dalam melaksanakan proses pembangunannya. Namun, sumber daya alam saja tidak menjamin keberhasilan proses pembangunan ekonomi, apabila tidak didukung oleh kemampuan sumber daya manusianya dalam mengelola sumber daya alam yang tersedia. Sumber daya alam yang dimaksud diantaranya kesuburan tanah, kekayaan mineral, tambang, kekayaan hasil hutan dan kekayaan laut. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat mendorong adanya percepatan proses pembangunan, pergantian pola kerja yang semula menggunakan tangan manusia digantikan oleh mesin-mesin canggih berdampak kepada aspek efisiensi, kualitas dan kuantitas serangkaian aktivitas pembangunan ekonomi yang dilakukan dan pada akhirnya



berakibat pada percepatan laju pertumbuhan perekonomian. Faktor budaya memberikan dampak tersendiri terhadap pembangunan ekonomi yang dilakukan, faktor ini dapat berfungsi sebagai pembangkit atau pendorong proses pembangunan tetapi dapat juga menjadi penghambat pembangunan. Budaya yang dapat mendorong pembangunan diantaranya sikap kerja keras dan kerja cerdas, jujur, ulet dan sebagainya. Adapun budaya yang dapat menghambat proses pembangunan diantaranya sikap anarkis, egois, boros, KKN, dan sebagainya. Sumber daya modal dibutuhkan manusia untuk mengolah SDA dan meningkatkan kualitas IPTEK. Sumber daya modal berupa barang-barang modal sangat penting bagi perkembangan dan kelancaran pembangunan ekonomi karena barang-barang modal juga dapat meningkatkan produktivitas. Keadaan politik suatu negara mampu mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yang ada. Dimana kondisi politik yang stabil dan baik akan memberikan kenyamanan bagi para individu dan mendukung kinerja dalam produksi. Dengan demikian individu akan bebas berinovasi dan mengembangkan segala potensinya dengan leluasa. Sehingga dengan demikian pertumbuhan ekonomi akan tercapai.

Kompleksitas permasalahan perekonomian di Kabupaten Klungkung merupakan salah satu fokus yang harus diselesaikan oleh Pemerintah Kabupaten Klungkung. Dalam upaya mendukung sasaran pembangunan nasional, Pemerintah Kabupaten Klungkung menetapkan sasaran Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang diukur dengan indikator Laju Pertumbuhan PDRB. Capaian target indikator sasaran Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi tahun 2019 disajikan pada grafik sebagai berikut:



Sumber : Kabupaten Klungkung Dalam Angka 2021, Penyediaan Data Perencanaan Pembangunan

Gambar 3.20 Laju Pertumbuhan PDRB (%), 2019-2023 dan Capaian Akhir RPJMD.

Berdasarkan gambar diatas dapat diketahui bahwa capaian indikator Kinerja Laju Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Klungkung pada tahun 2020 masih jauh dari target yang ditetapkan. Pada tahun 2020, Laju Pertumbuhan Ekonomi ditargetkan sebesar 6 persen namun berdasarkan hasil perhitungan Badan Pusat Statistik Kabupaten Klungkung, Laju Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Klungkung adalah sejumlah -6,35 persen yang capaiannya sebesar -105,83 persen. Dibandingkan dengan target RPJMD, capaian akhir RPJMD tercapai sebesar -105,83 persen. Untuk itu diperlukan usaha-usaha untuk terus meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi.

Pada perhitungan PDRB dengan tahun dasar 2010 terjadi perubahan struktur perekonomian, dimana struktur ekonomi atas tahun dasar 2000 ditinjau dari lapangan usaha masih dibentuk oleh 9 (sembilan) sektor, yakni pertanian, pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, sektor listrik, gas dan air bersih, sektor bangunan, sektor perdagangan, hotel dan restoran, pengangkutan dan komunikasi, sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan serta sektor jasa-jasa. Pada tahun dasar 2010, struktur ekonomi berubah menjadi 19 kategori, bukan lagi menurut sektor. Kategori informasi dan komunikasi ditambahkan, kemudian sektor perdagangan dipecah menjadi beberapa kategori, begitu juga dengan sektor jasa-jasa. Transportansi dan pergudangan juga menjadi kategori



baru dalam perhitungan itu. Sementara struktur ekonomi menurut pengeluaran tak mengalami perubahan. Data pertumbuhan ekonomi per kategori lapangan usaha secara rinci dapat dijelaskan pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.10
Laju pertumbuhan riil PDRB ADHK Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Klungkung
Tahun 2016-2020 (%)

Lapangan Usaha	2016	2017	2018	2019	2020
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,88	0,63	3,56	2,12	-1,31
Pertambangan dan Penggalian	-4,67	-1,32	-1,39	-1,07	-10,11
Industri Pengolahan	7,37	3,86	5,10	5,46	-5,87
Pengadaan Listrik dan Gas	2,73	5,02	5,93	8,80	-15,64
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4,21	2,57	4,74	7,76	0,25
Konstruksi	14,96	9,69	6,52	6,77	-5,51
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7,09	7,89	7,45	7,02	-7,74
Transportasi dan Pergudangan	4,34	8,16	4,34	9,38	-34,70
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	10,26	12,90	7,06	5,35	-31,94
Informasi dan Komunikasi	8,52	7,28	6,84	5,81	9,53
Jasa Keuangan dan Asuransi	9,26	2,27	1,66	8,69	-3,29
Real Estate	4,66	5,97	5,33	4,21	0,51
Jasa Perusahaan	3,19	5,15	5,95	5,09	-4,25
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	6,62	-1,59	6,86	8,94	-1,79
Jasa Pendidikan	8,28	7,99	7,61	6,48	-1,16
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8,45	7,99	7,26	6,71	2,22
Jasa lainnya	7,43	8,13	8,35	9,07	-6,05
PDRB	6,28	5,32	5,48	5,42	-6,35

Sumber : BPS Kab. Klungkung, 2021

Berdasarkan tabel di atas, Laju pertumbuhan menurut lapangan usaha pada tahun 2020 tertinggi dicapai oleh lapangan usaha informasi dan komunikasi yang mencapai 9,53% sedangkan yang terendah dicapai oleh lapangan usaha penyediaan



akomodasi dan makan minum yang tumbuh -31,94%. Lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan tahun 2018 tumbuh sebesar 3,75% mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang hanya mencapai 0,63%. Hal tersebut dapat menjadi cerminan kondisi perekonomian dalam masa pandemi covid-19, dimana lapangan usaha yang mencapai pertumbuhan positif dan signifikan adalah jasa kesehatan serta informasi dan komunikasi. Sementara sektor lain mengalami pertumbuhan negatif dan signifikan adalah lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum serta transportasi dan pergudangan. Hal tersebut dapat menjadi cerminan dimana dalam masa pandemi covid-19 masyarakat dihimbau untuk tetap dirumah serta lebih memanfaatkan layanan daring untuk bekerja maupun belajar.

Untuk mengetahui lapangan usaha yang memiliki kontribusi terhadap perekonomian di Kabupaten Klungkung dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.11.
Distribusi PDRB Atas Harga Berlaku menurut Lapangan Usaha Kabupaten Klungkung Tahun 2015-2020

Lapangan Usaha	2016	2017	2018	2019	2020
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.652.956,55	1.720.719,04	1.838.079,28	1.911.842,59	1.902.152,11
Pertambangan dan Penggalian	278.115,76	280.186,41	295.279,94	294.596,41	267.131,79
Industri Pengolahan	673.393,43	721.968,41	786.266,39	845.558,31	810.500,29
Pengadaan Listrik dan Gas	8.218,17	9.566,79	10.597,41	11.741,68	9.949,24
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	14.509,08	15.711,39	16.504,89	17.947,79	18.011,82
Konstruksi	647.774,46	731.071,42	808.587,50	892.884,02	846.989,78
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	554.833,19	623.897,65	689.455,01	748.429,13	695.585,92
Transportasi dan Pergudangan	210.504,41	232.052,74	248.198,15	277.988,21	171.309,85



Pemerintah Kabupaten Klungkung
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2020

Lapangan Usaha	2016	2017	2018	2019	2020
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	956.424,78	1.121.210,04	1.226.576,69	1.328.277,45	874.764,52
Informasi dan Komunikasi	600.793,41	661.243,81	720.255,47	774.028,98	858.939,96
Jasa Keuangan dan Asuransi	284.427,60	304.453,90	319.350,69	353.230,77	340.352,40
Real Estate	171.127,77	185.822,51	197.983,12	212.602,72	215.515,38
Jasa Perusahaan	70.301,61	75.981,59	82.235,82	87.619,04	85.489,90
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	364.600,59	404.945,57	455.265,04	505.586,04	514.264,65
Jasa Pendidikan	167.627,92	187.607,57	206.759,52	227.973,80	224.480,20
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	301.007,22	333.058,11	364.215,63	399.690,40	424.796,65
Jasa lainnya	155.401,67	175.122,17	193.726,99	215.906,74	208.069,33
PDRB	7.112.017,62	7.784.619,12	8.459.337,54	9.105.904,10	8.468.303,79

*) Angka Sementara; **) Angka Sangat Sementara

Sumber : Kabupaten Klungkung Dalam Angka 2020, Penyediaan Data Perencanaan Pembangunan

Berdasarkan tabel di atas, 3 besar lapangan usaha yang berkontribusi terbesar dalam pembentukan PDRB Kabupaten Klungkung dalam lima tahun terakhir adalah pada lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan, penyediaan akomodasi dan makanan dan minuman serta konstruksi. Meskipun ketiga sektor tersebut tumbuh negatif pada tahun 2020, namun ketiga sektor tersebut tetap menjadi penyumbang PDRB terbesar dalam struktur PDRB Kabupaten Klungkung. Untuk mengetahui PDRB atas dasar harga berlaku 2010, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:



Tabel 3.12.
PDRB ADHK Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Klungkung Tahun 2016-2020
(juta rupiah)

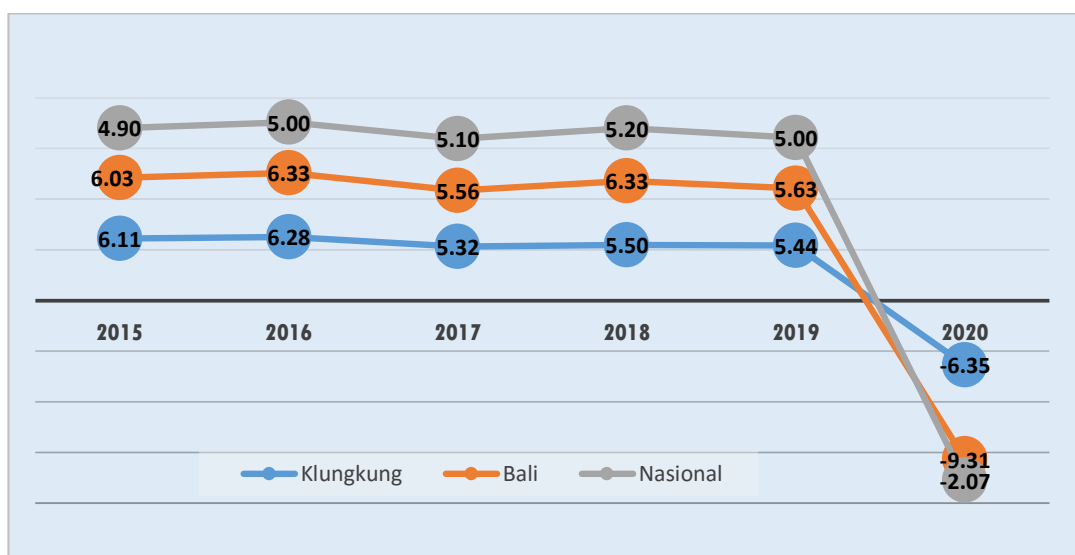
Lapangan Usaha	2016	2017	2018	2019	2020
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.115.352,72	1.122.399,55	1.162.347,68	1.186.944,49	1.171.341,02
Pertambangan dan Penggalian	198.487,47	195.866,26	193.145,10	191.075,17	171.758,25
Industri Pengolahan	475.920,61	494.306,69	519.503,89	547.873,36	515.710,50
Pengadaan Listrik dan Gas	5.706,45	5.993,11	6.348,71	6.907,47	5.827,32
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	12.104,10	12.414,86	13.002,86	14.011,89	14.047,14
Konstruksi	470.976,76	516.610,45	550.308,89	587.549,99	555.192,77
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	413.902,58	446.562,04	479.826,10	513.533,57	473.798,53
Transportasi dan Pergudangan	148.325,01	160.432,19	167.387,72	183.087,53	119.563,79
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	541.524,07	611.402,54	654.594,73	689.606,70	469.322,04
Informasi dan Komunikasi	551.778,00	591.947,44	632.451,64	669.174,12	732.941,17
Jasa Keuangan dan Asuransi	208.457,15	213.186,90	216.733,44	235.570,63	227.813,66
Real Estate	138.719,93	146.995,31	154.826,70	161.343,81	162.163,90
Jasa Perusahaan	51.198,34	53.837,59	57.040,90	59.944,28	57.396,42
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	315.598,83	310.580,81	331.881,00	361.564,15	355.077,34
Jasa Pendidikan	125.737,04	135.786,59	146.118,19	155.587,09	153.779,45
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	229.386,98	247.716,69	265.700,94	283.539,98	289.821,17
Jasa lainnya	112.432,56	121.574,62	131.724,70	143.675,51	134.988,87
PDRB	5.115.608,62	5.387.613,63	5.682.943,21	5.990.989,74	5.610.543,34

Sumber : BPS Kab. Klungkung, 2021



Berdasarkan tabel, maka Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan merupakan lapangan usaha terbesar yang membentuk PDRB ADHK Kabupaten Klungkung yaitu mencapai Rp 1,171 trilyun lebih di tahun 2020. Sedangkan yang terendah terdapat pada lapangan usaha Pengadaan Listrik dan Gas yaitu sebesar Rp 5,8 milyar lebih.

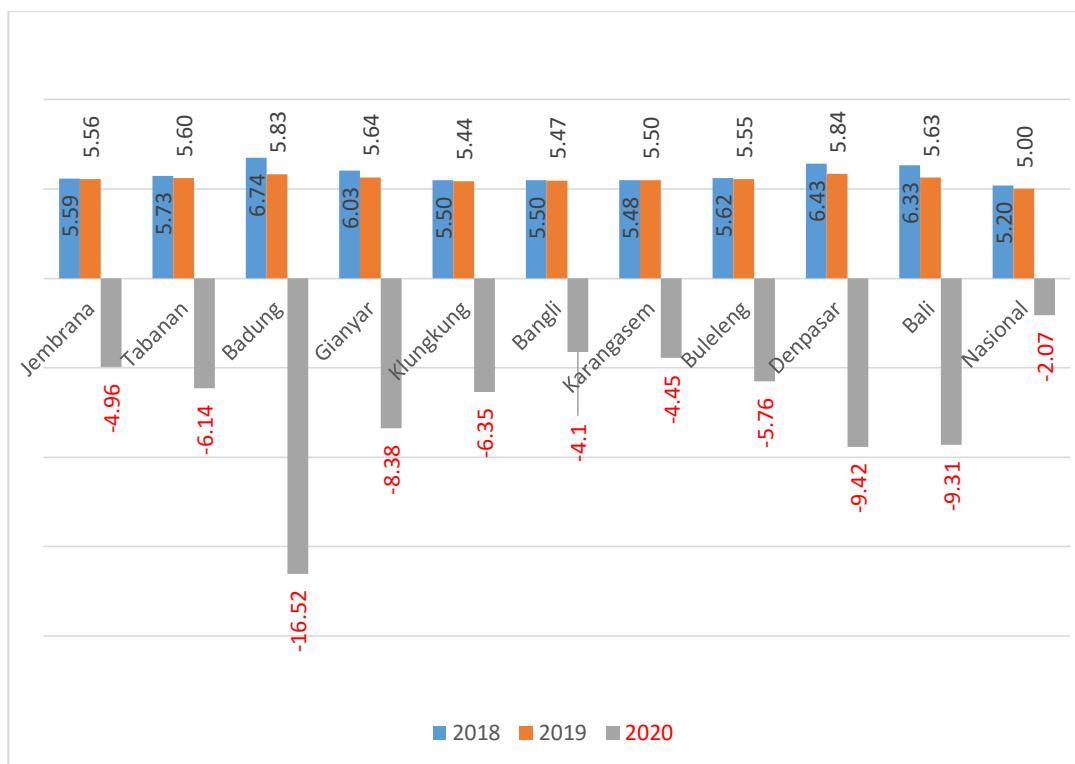
Untuk mendapatkan perbandingan kinerja yang telah dicapai, Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Klungkung perlu dibandingkan dengan Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Bali dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Nasional. Gambar dibawah menyajikan perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Klungkung dibandingkan dengan Provinsi Bali dan Nasional.



Sumber : Provinsi Bali Dalam Angka 2020, Penyediaan Data Perencanaan Pembangunan

Gambar 3.21 Laju Pertumbuhan PDRB di Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali dan Nasional, Tahun 2015-2020

Berdasarkan gambar di atas, maka terlihat Laju Pertumbuhan Ekonomi nasional tumbuh negatif 9,11 persen, sementara laju pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bali tumbuh negatif 2,07 persen. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Klungkung tumbuh negatif sebesar 6,35 persen. Hal tersebut menunjukkan bahwa pada tahun 2020, secara nasional dan regional pertumbuhan ekonomi mengalami pertumbuhan negatif. Untuk memperoleh perbandingan regional antar Kabupaten/Kota di Provinsi Bali, gambar di bawah ini menyajikan perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Klungkung dengan Kabupaten/Kota lainnya di Provinsi Bali sebagai berikut:



Sumber : Provinsi Bali Dalam Angka 2020, Penyediaan Data Perencanaan Pembangunan

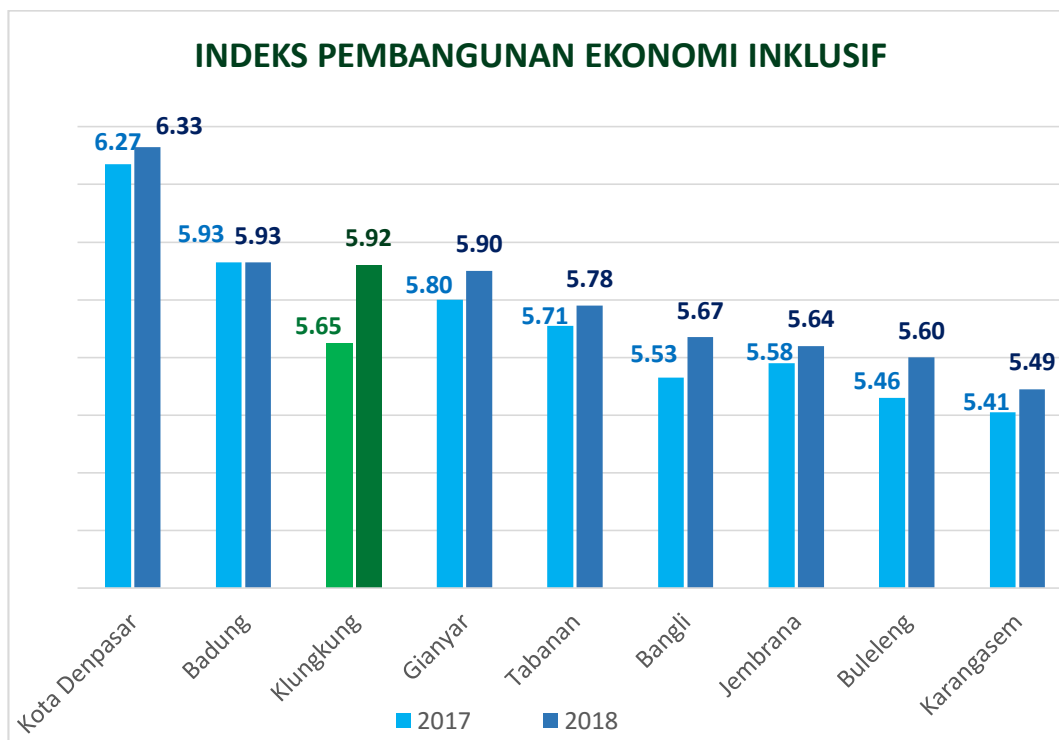
Gambar 3.22 Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten/Kota di Provinsi Bali (%), 2018-2020

Berdasarkan gambar di atas maka terlihat bahwa Laju Pertumbuhan Ekonomi di seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Bali mengalami pertumbuhan negatif. Dimana Kabupaten Badung, Kota Denpasar dan Kabupaten Gianyar merupakan tiga daerah dengan pertumbuhan negatif tertinggi. Sementara Kabupaten Jembrana, Bangli dan Karangasem adalah tiga daerah dengan pertumbuhan negatif terendah. Hal tersebut merupakan dampak dari penutupan sementara usaha pariwisata yang merupakan lapangan usaha dominan di tiga Badung, Denpasar dan Gianyar.

Selain Produk Domestik Regional Bruto, terdapat indikator pembangunan ekonomi lain yang dapat digunakan untuk merefleksikan capaian pembangunan ekonomi suatu daerah. Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif (IPEI) merupakan instrumen yang telah dikembangkan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Republik Indonesia untuk mengukur, memantau dan mengendalikan kualitas pembangunan ekonomi dari tahun ke tahun. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas merilis bahwa capaian Indeks



Pembangunan Ekonomi Inklusif (IPEI) Bali menempati peringkat kedua terbaik nasional. Kabupaten Klungkung memperoleh Peringkat ketiga terbaik kabupaten/kota se-Bali. Kabupaten Klungkung menempati urutan ketiga dengan nilai 5,92 pada Tahun 2018. Kota Denpasar pada urutan pertama dengan nilai 6,33, dan posisi kedua Kabupaten Badung dengan nilai 5,93 seperti terlihat pada gambar berikut :



Sumber : Bappenas, 2020

Gambar 3.23 Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif Kabupaten/Kota se-Bali Tahun 2017-2018

Pada gambar diatas terlihat bahwa peningkatan Indeks Pembangunan Inklusif Kabupaten yang tertinggi dibandingkan Kabupaten/Kota lainnya, dimana pada Tahun 2017 nilai 5.65 dan pada Tahun 2018 menjadi 5.92. Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif (IPEI) terdiri dari tiga pilar utama, yaitu pertumbuhan ekonomi tinggi, pemerataan pendapatan dan pengurangan kemiskinan, dan perluasan akses dan kesempatan. Dari tabel berikut dapat terlihat bahwa Kabupaten Klungkung memperoleh peringkat 63 dari seluruh Kabupaten/kota se-Indonesia. Adapun capaian indeks masing-masing pilar adalah sebagai berikut :



Tabel 3.13.

Indikator Indeks Pembangunan Ekonomi Inkusif Tahun 2018

Kabupaten/Kota	Indeks Inklusif	Indeks Pillar 1	Indeks Pillar 2	Indeks Pillar 3	Ranking
Kota Denpasar	6.33	5.98	7.18	6.23	11
Badung	5.93	5.35	6.74	6.42	57
Klungkung	5.92	5.11	7.03	6.70	61
Gianyar	5.91	5.22	6.79	6.58	63
Tabanan	5.78	5.10	6.70	6.42	91
Bangli	5.67	4.93	7.13	5.98	113
Jembrana	5.64	4.98	6.91	5.90	119
Buleleng	5.60	4.83	7.07	5.94	128
Karang Asem	5.49	4.64	6.97	6.03	157

Sumber : Bappenas, 2020

Dalam usaha mencapai sasaran Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi, Pemerintah Kabupaten Klungkung menemui kendala sebagai berikut:

1. Pembatasan kegiatan sosial masyarakat yang diterapkan pada masa pandemi covid-19 membatasi ruang gerak masyarakat dalam melakukan aktivitasnya. Hal tersebut berpengaruh besar terhadap perekonomian dan perputaran uang. Banyak aktivitas perekonomian yang mengharuskan interaksi antar manusia dan hal tersebut menjadi terhambat karena harus menjaga sisi kesehatan.
2. Penutupan tempat-tempat usaha berskala besar mempengaruhi daya beli masyarakat sehingga berpengaruh pula pada perekonomian di Kabupaten Klungkung.
3. Meningkatnya tingkat pengangguran menyebabkan melemahnya daya beli masyarakat yang berpengaruh pada pertumbuhan perekonomian di Kabupaten Klungkung, nasional bahkan global.
4. Penundaan Investasi mengakibatkan uang masuk ke Kabupaten Klungkung berkurang dan menyumbang pertumbuhan negatif struktur perekonomian.
5. Refocusing anggaran oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah di seluruh Indonesia mempengaruhi uang yang beredar di masyarakat. Selama ini lapangan usaha konstruksi merupakan salah satu dari tiga lapangan usaha yang menyumbang PDRB terbanyak di Kabupaten Klungkung. Seiring berkurangnya



pembangunan fisik oleh pemerintah, lapangan usaha tersebut juga mengalami kemunduran dan menyumbang pertumbuhan negatif.

6. Berkurangnya pendapatan mengakibatkan masyarakat menarik investasi yang dilakukan di berbagai tempat dan pilihan investasi. Penggunaan tabungan untuk kebutuhan hidup menjadi salah satu pemicu penarikan dana besar-besaran dana investasi. Hal tersebut mengakibatkan likuiditas lembaga keuangan terganggu, mengingat perputaran uang masuk terhambat sementara permintaan uang keluar sangat tinggi.

Untuk mencapai peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi sangat ditentukan oleh pelaksanaan pembangunan di segala bidang di Kabupaten Klungkung, mengingat permasalahan ekonomi adalah permasalahan multi sektor. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Klungkung dalam meningkatkan Laju Pertumbuhan Ekonomi adalah sebagai berikut:

1. Penerapan protokol kesehatan pada tempat-tempat usaha, pasar dan tempat publik untuk tetap memberikan jaminan kenyamanan bagi pelaku usaha baik pembeli maupun penjual untuk bertransaksi. Hal tersebut dilakukan agar pelaku usaha tetap menjalankan usaha tanpa mengurangi standar kesehatan.
2. Promosi pariwisata tetap dijalankan secara online untuk tetap menggemakan Kabupaten Klungkung sebagai suatu destinasi wisata yang patut untuk dikunjungi. Promosi pariwisata juga mengenalkan bahwa Kabupaten Klungkung menerapkan standar protokol kesehatan pada setiap lini di lapangan usaha pariwisata.
3. Promosi investasi tetap dilaksanakan untuk menjaga minat investasi tidak turun saat pandemi sudah mereda.
4. Melakukan pembinaan terhadap lembaga-lembaga keuangan agar memiliki strategi yang baik untuk menjaga likuiditasnya.
5. Penyaluran bantuan langsung tunai kepada usaha kecil menengah yang terdampak covid-19.

Meskipun terdapat berbagai fakto penghambat tumbuhnya perekonomian, namun terdapat faktor pendukung yang membantu pelambatan pertumbuhan negatif perekonomian yaitu:

1. Berkembangnya lapangan usaha informasi dan komunikasi. Berdasarkan



Produk Domestik Regional Bruto yang berdasarkan harga berlaku tahun 2010, lapangan usaha informasi dan komunikasi merupakan lapangan usaha yang menyumbang PDRB dalam porsi yang besar. Berkembangnya lapangan usaha ini pada tahun 2020, merupakan faktor pendukung perekonomian Kabupaten Klungkung.

2. Berkembangnya lapangan usaha kesehatan menjadi salah satu faktor pendukung pertumbuhan perekonomian Kabupaten Klungkung.
3. Pandemi covid-19 mengajarkan semua lapisan masyarakat untuk lebih menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Hal tersebut menjadi suatu momen yang baik untuk mengajarkan masyarakat pentingnya hidup bersih dan sehat. Hal tersebut akan membentuk kebiasaan baik yang akan menjadi faktor pendukung tumbuhnya industry pariwisata yang bersih dan sehat.

Prestasi Pemerintah Kabupaten Klungkung terkait pencapaian sasaran ini diantaranya:

1. TOP 40 Inovasi Pelayanan Publik untuk inovasi BIMA JUARA (Beli Mahal Jual Murah-Program perlindungan bagi petani dan beras lokal) oleh Kementerian PAN dan RB Republik Indonesia.
2. Top 10 Kabupaten Terbaik Tingkat Nasional dalam penganugerahan Wonderful Indonesia Tourism Award 2018 oleh Kementerian Pariwisata Republik Indonesia.
3. Pasar Tertib Ukur untuk 2 pasar yaitu Pasar Tusan dan Pasar Kusamba
4. Juara I TK Provinsi Teknologi Tepat Guna untuk Usaha Batok Kelapa

Dalam melaksanakan pelayanan publik, Pemerintah Kabupaten senantiasa dituntut untuk melaksanakan pelayanan dengan efektif dan efisien. Untuk mengukur tingkat efisiensi pencapaian sasaran, dapat dilakukan dengan melakukan Analisis Efisiensi. Analisis efisiensi difokuskan pada indikator input dan output dari suatu kegiatan. Dalam hal ini, diukur dari kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan input yang lebih sedikit dalam menghasilkan output yang sama/atau lebih besar, atau persentase capaian output sama tinggi daripada persentase capaian input. Efisiensi suatu kegiatan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE). Dibawah ini disajikan analisis tingkat efisiensi sasaran Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi sebagai berikut:



Tabel 3.14
Tingkat Efisiensi
Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi
Tahun 2020

Indikator Kinerja	Target Capaian Sasaran (%)	Target Capaian Keuangan (%)	Standar Efisiensi	Realisasi Capaian Sasaran (%)	Realisasi Capaian Keuangan (%)	Indeks Efisiensi	Tingkat Efisiensi	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Laju Pertumbuhan PDRB (%)	100	100	1.00	-105.83	92	-1.16	-2.16	Tidak Efisien
Jumlah	100	100	1.00	-105.83	92	-1.16	-2.16	Tidak Efisien

Sumber : data diolah

Dari hasil analisis dapat diketahui bahwa pada tahun 2020, tingkat efisiensi sasaran Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi adalah sebesar -2,16 dimana indeks efisiensi lebih rendah dari standar efisiensi. Pada tahun 2020 sasaran Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dicapai dengan tidak efisien. Sasaran Menurunkan Angka Kemiskinan didukung dengan program pendukung sebagaimana tabel dibawah ini.

Tabel 3.15.
Efisiensi Anggaran
Sasaran Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi
Tahun 2020

Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Efisiensi (Rp)	Capaian (%)	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Program Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan	43,775,552.00	43,775,552.00	0.00	100.00	Dinas Penanaman Modal
Program Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal	26,615,502.00	26,615,502.00	0.00	100.00	Dinas Penanaman Modal
Program Promosi Penanaman Modal	60,519,000.00	59,894,000.00	625,000.00	98.97	Dinas Penanaman Modal
Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Informasi Penanaman Modal	54,402,400.00	54,288,400.00	114,000.00	99.79	Dinas Penanaman Modal
Program Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A	181,569,008.00	167,174,008.00	14,395,000.00	92.07	Dinas Penanaman Modal
Program Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan B	101,214,074.00	101,214,074.00	0.00	100.00	Dinas Penanaman Modal



Pemerintah Kabupaten Klungkung
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2020

Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Efisiensi (Rp)	Capaian (%)	Ket
Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan kompetitif Usaha Kecil Menengah	195,491,140.00	192,341,517.00	3,149,623.00	98.39	Dinas Koperasi
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	197,164,710.00	194,768,710.00	2,396,000.00	98.78	Dinas Koperasi
Program Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Koperasi	624,858,200.00	496,668,200.00	128,190,000.00	79.48	Dinas Koperasi
Program Pembinaan Perdagangan Dalam dan Luar Negeri	7,030,100,454.00	6,731,134,787.00	298,965,667.00	95.75	Dinas Koperasi
Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	57,498,552.00	54,358,750.00	3,139,802.00	94.54	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	732,954,106.97	695,202,256.00	37,751,850.97	94.85	Dinas Pariwisata
Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	4,554,175,266.00	4,197,309,315.00	356,865,951.00	92.16	Dinas Pariwisata
Program Industri Pariwisata	1,707,743,630.00	1,451,372,737.00	256,370,893.00	84.99	Dinas Pariwisata
Program Sumber Daya Pariwisata	704,075,600.00	663,477,100.00	40,598,500.00	94.23	Dinas Pariwisata
Program Penerapan Teknologi Budidaya Tanaman	170,551,552.00	170,550,652.00	900.00	100.00	Dinas Pertanian
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	274,334,052.00	274,003,152.00	330,900.00	99.88	Dinas Pertanian
Program Peningkatan Produksi Peternakan	736,507,256.00	671,721,707.00	64,785,549.00	91.20	Dinas Pertanian
Program Penyediaan Prasarana dan Sarana Pertanian	89,604,142.00	88,080,442.00	1,523,700.00	98.30	Dinas Pertanian
Program Penjaminan Mutu Pangan Bahan Asal Hewan Yang ASUH (Aman, Sehat, Utuh dan Halal)	12,101,000.00	12,074,000.00	27,000.00	99.78	Dinas Pertanian
Program Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Pertanian	486,391,436.00	415,134,988.00	71,256,448.00	85.35	Dinas Pertanian
Program Peningkatan Ketahanan Pangan	64,441,400.00	64,291,400.00	150,000.00	99.77	Dinas Ketahanan Pangan



Pemerintah Kabupaten Klungkung
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2020

Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Efisiensi (Rp)	Capaian (%)	Ket
Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	203,204,900.00	131,177,580.00	72,027,320.00	64.55	Dinas Ketahanan Pangan
Program Pengembangan Perikanan Tangkap dan Budidaya	875,543,160.00	608,014,660.00	267,528,500.00	69.44	Dinas Ketahanan Pangan
Jumlah	19,184,836,092.97	17,564,643,489.00	1,620,192,603.97	91.55	

Sumber : Simda Keuangan, 2021

Pada tahun 2020, Sasaran Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi didukung dengan 24 program pendukung dengan pagu anggaran perubahan sebesar Rp. 19,184,836,092.97 dan terealisasi sebesar Rp. 17,564,643,489.00 dan sisa anggaran sebesar Rp. 1,620,192,603.97 atau terealisasi sebesar 91,55 persen. Sasaran ini didukung oleh Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Klungkung, Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan, Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan, Dinas Pariwisata, Dinas Pertanian, dan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Klungkung.

DOKUMENTASI PENCAPAIAN SASARAN



Bupati Klungkung meninjau penyediaan sarana PHBS di Pasar Galiran



Bupati Klungkung memantau aktivitas di pasar



Pelaksanaan Rapid Test bagi pedagang pasar



Sekda Provinsi Bali memantau pelaksanaan Rapid Test bagi Pedagang Pasar Galiran



Sasaran 5

Terwujudnya Birokrasi Yang Profesional, Responsif, Transparan, Santun dan Inovatif

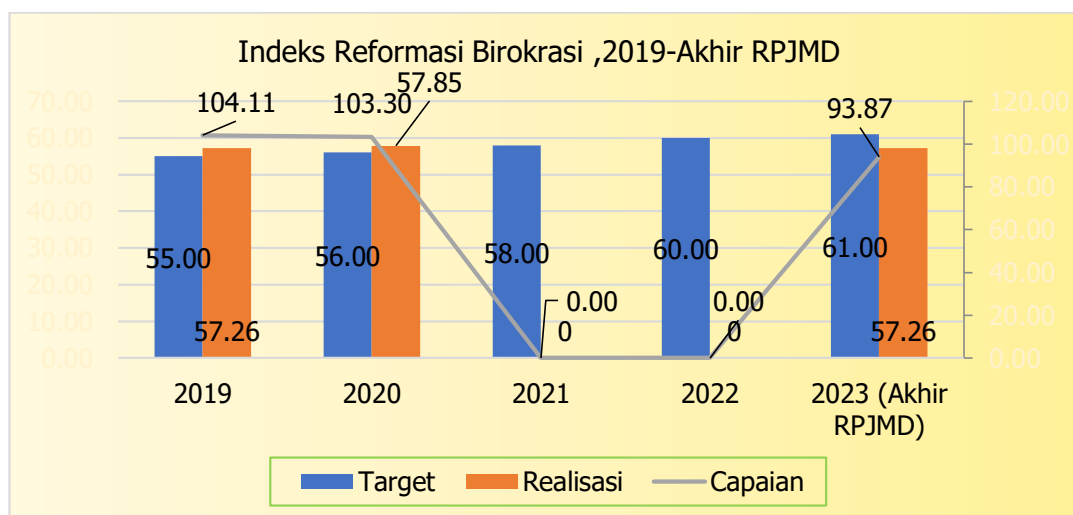
Suatu pemerintahan atau pemerintahan yang Transparan (terbuka), yaitu suatu sistem pemerintahan yang di dalam penyelenggaraan pemerintahannya terdapat kebebasan aliran informasi dalam berbagai proses kelembagaan sehingga mudah diakses oleh mereka yang membutuhkan. Berbagai informasi telah disediakan secara memadai dan mudah dimengerti, sehingga dapat digunakan sebagai alat monitoring dan evaluasi. Pemerintahan yang tidak transparan, cepat atau lambat cenderung akan menuju pemerintahan yang korup, otoriter, atau diktatur. Dalam penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah dituntut bersikap terbuka terhadap kebijakan-kebijakan yang dibuatnya termasuk anggaran yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Sehingga mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi terhadap kebijakan tersebut pemerintah dituntut bersikap terbuka dalam rangka "akuntabilitas publik". Realitasnya, kebijakan yang dibuat pemerintah dalam pelaksanaannya kurang transparan, sehingga berdampak pada rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap setiap kebijakan yang dibuat pemerintah.

Terselenggaranya sistem pemerintahan yang akuntabel dan transparan merupakan salah satu kunci perwujudan *good governance*. Di dalam sistem dimaksud tercakup beberapa prasyarat yang harus dipenuhi tatkala transparansi dan akuntabilitas menjadi barometer. Di antara prasyarat itu adalah jaminan bahwa segala peristiwa penting kegiatan pemerintah (kegiatan badan publik) terekam dengan baik dengan ukuran-ukuran yang jelas dan dapat diikhtisarkan melalui proses informasi dimana kita bisa melihat segala yang terjadi dan terdapat di dalam ruang entitas itu, yakni entitas pemerintah. Dengan adanya transparansi pemerintahan yang ditunjang dengan payung hukumnya yang jelas maka akan menambah wawasan dan pengetahuan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan, maka akan menjamin meningkatnya jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan daerahnya dan akan dapat meminimalisir berkurangnya pelanggaran/penyimpangan dalam pengelolaan pemerintahan.



Perubahan adalah sesuatu yang tidak terhindarkan dan pasti akan terjadi terhadap setiap bentuk kehidupan, tidak terkecuali organisasi pemerintah/birokrasi. Perubahan birokrasi yang diharapkan melalui reformasi birokrasi di Kabupaten Klungkung adalah birokrasi yang berkinerja tinggi, yang diwujudkan melalui kemampuan dalam memberikan pelayanan yang terbaik dan berkualitas kepada masyarakat. Selain itu, reformasi birokrasi juga diharapkan mampu mengurangi bahkan meniadakan praktek-praktek KKN di seluruh Organisasi Perangkat Daerah serta meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi Pemerintah Kabupaten Klungkung. Oleh karena itu, reformasi birokrasi dapat dimaknai sebagai sebuah perubahan signifikan dalam paradigma dan tata kelola pemerintahan. Untuk mengukur capaian sasaran Terwujudnya Birokrasi Yang Profesional, Responsif, Transparan, Santun dan Inovatif, Pemerintah Kabupaten Klungkung menggunakan indikator kinerja Indeks Reformasi Birokrasi sebagai alat ukur keberhasilan pencapaian sasaran tersebut.

Untuk mengetahui capaian kinerja Terwujudnya Birokrasi Yang Profesional, Responsif, Transparan, Santun dan Inovatif yang diukur dengan Indeks Reformasi Birokrasi dapat dilihat pada gambar sebagai berikut:



Sumber : LHE Reformasi Birokrasi, 2020

Gambar 3.24 Indeks Reformasi Birokrasi Kab. Klungkung, 2019-2023 dan Capaian Akhir RPJMD.

Indeks Reformasi Birokrasi merupakan indeks yang dihasilkan dari penilaian terhadap 8 komponen penilaian pelaksanaan reformasi birokrasi yaitu : Manajemen



Perubahan, Penataan Peraturan Perundang-Undangan, Penataan dan Penguatan Organisasi, Penataan Tatalaksana, Penataan Sistem Manajemen SDM, Penguatan Akuntabilitas, Penguatan Pengawasan, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Indeks Reformasi Birokrasi dihasilkan dari serangkaian penilaian yang dilakukan langsung oleh Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Capaian indikator kinerja Indeks Reformasi Birokrasi pada tahun 2020 mencapai 103,30 persen, dimana target indeks reformasi birokrasi sebesar 56 point dan terealisasi sebesar 57,85 point. Tahun 2019 merupakan tahun kedua Kabupaten Klungkung mengevaluasi capaian pelaksanaan reformasi birokrasi yang hasil penilaiannya diterima pada tahun 2021. Untuk melihat komponen penilaian Indeks Reformasi Birokrasi dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.16
Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Klungkung, 2019

No	Komponen Penilaian	Bobot	Nilai 2018	Nilai 2019
I	Komponen Pengungkit			
1	Manajemen Perubahan	5,00	1,18	1,22
2	Penataan Peraturan Perundang-Undangan	5,00	1,15	1,25
3	Penataan dan Penguatan Organisasi	6,00	1,91	1,95
4	Penataan Tatalaksana	5,00	1,60	1,66
5	Penataan Sistem Manajemen SDM	15,00	10,91	10,96
6	Penguatan Akuntabilitas	6,00	3,50	3,54
7	Penguatan Pengawasan	12,00	3,93	3,95
8	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	6,00	1,74	1,78
	Total Komponen Pengungkit (A)	60,00	25,90	26,31
II	Komponen Hasil			
1	Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Organisasi	20,00	14,06	14,09
2	Pemerintahan Yang Bersih dan Bebas KKN	10,00	8,95	8,95
3	Kualitas Pelayanan Publik	10,00	8,35	8,50
	Total Komponen Hasil (B)	40,00	31,36	31,54
	Indeks Reformasi Birokrasi (A+B)	100,00	57,26	57,85

Sumber : LHE Reformasi Birokrasi, 2020



Pada hasil evaluasi reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Klungkung, komponen pengungkit telah tercapai sebanyak 26,31 point dari 60 point maksimal, sementara komponen hasil telah tercapai sebanyak 31,54 point dari 40 point maksimal. Berdasarkan hasil evaluasi Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada pelaksanaan reformasi birokrasi di Pemerintah Kabupaten Klungkung, dilakukan pula survey terhadap persepsi para pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klungkung terhadap kualitas penerapan sistem integritas yang berlaku secara internal. Hasil survey integritas organisasi menunjukkan indeks 3,22 dalam skala 0-4 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.17
Hasil Survey Integritas Organisasi, 2019

No	Komponen	Indeks 2018	Indeks 2019
1	Budaya Organisasi dan Sistem Anti Korupsi	3,02	3,25
2	Integritas terkait pengelolaan SDM	3,37	3,52
3	Integritas terkait pengelolaan anggaran	3,37	3,58
4	Integritas kesesuaian perintah atasan dengan aturan dan norma	3,10	3,43
Indeks Integritas Organisasi		3,22	3,44

Sumber : LHE Reformasi Birokrasi Kab. Klungkung, 2019

Dari hasil survey menunjukkan bahwa pemahaman terhadap reformasi birokrasi belum merata ke seluruh Pegawai Pemerintah Kabupaten Klungkung. Selain penilaian terhadap integritas organisasi, juga dilakukan survey eksternal terhadap masyarakat yang telah merasakan pelayanan Pemerintah Kabupaten Klungkung dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.18
Hasil Survey Eksternal Terhadap Masyarakat, 2019

No	Komponen	Nilai Survey		Rata-Rata Indeks Kab/Kota
		2018	2019	2019
1	Indeks Kualitas Pelayanan Publik	3,34	3,40	3,38
2	Indeks Persepsi Anti Korupsi	3,40	3,40	3,56

Sumber : LHE Reformasi Birokrasi Kab. Klungkung, 2020



Hasil survey persepsi pelayanan menunjukkan indeks 3,40 dalam skala 4. Hasil tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata persepsi pelayanan kabupaten/kota yang sebesar 3,38. Sementara hasil survey persepsi anti korupsi yang merupakan gambaran atas integritas pemberi layanan menunjukkan indeks 3,40 dalam skala 4. Hasil survey tahun 2019 tersebut sedikit lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata persepsi anti korupsi kabupaten/kota yang sebesar 3,56. Berikut disajikan hasil evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi di Pemerintah Kab/Kota dan Provinsi Bali.

Tabel 3.19
Hasil Evaluasi Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi

Instansi	2016		2017		2018		2019	
	Nilai	Predikat	Nilai	Predikat	Nilai	Predikat	Nilai	Predikat
Provinsi Bali	64,44	B	66,16	B	67,29	B	69,31	B
Kabupaten Badung	65,50	B	72,15	BB	70,92	BB	73,62	BB
Kabupaten Buleleng	Tidak evaluasi	-	Tidak evaluasi	-	57,77	CC	58,56	CC
Kabupaten Karangasem	Tidak evaluasi	-	Tidak evaluasi	-	Tidak evaluasi	-	48,69	C
Kota Denpasar	60,67	B	60,45	B	64,51	B	68,63	B
Kabupaten Klungkung	Tidak evaluasi	-	Tidak evaluasi	-	57,26	CC	57,85	CC
Kabupaten Tabanan	Tidak evaluasi	-	58,87	CC	58,77	CC	60,61	B
Kabupaten Jembrana	Tidak evaluasi	-	Tidak evaluasi	-	58,23	CC	59,72	CC
Kabupaten Gianyar	54,17	CC	Tidak evaluasi	-	58,49	CC	60,23	B
Kabupaten Bangli	Tidak evaluasi	-	Tidak evaluasi	-	56,25	CC	58,81	CC

Tahun 2018 merupakan tahun pertama Kabupaten Klungkung dilakukan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi, dimana Pemerintah Kabupaten/Kota lain di Provinsi Bali telah dilakukan evaluasi sejak tahun 2016. Dari hasil evaluasi, Pemerintah Kabupaten Klungkung menempati urutan ke 8 dari 9 Kabupaten/Kota yang dilakukan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi. Indeks Reformasi Birokrasi terbaik di raih oleh Kabupaten Badung dengan indeks 73,62. Sementara indeks reformasi birokrasi terendah diraih oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem. Untuk mewujudkan sasaran Terwujudnya Birokrasi yang profesional, responsif,



transparan, santun dan inovatif didukung oleh beberapa fokus utama antara lain:

Pola Pikir dan Budaya Kerja

Reformasi Pola Pikir dan Budaya Kerja dikelola dengan strategi sebagai berikut:

1. Pemilihan agen perubahan sebagai personal yang secara intensif menyebarkan nilai-nilai budaya kerja di Kabupaten Klungkung di perangkat daerah masing-masing.
2. Peran agen perubahan dimaksimalkan untuk percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi di Perangkat Daerah masing-masing.
3. Penetapan nilai-nilai budaya kerja yang menjadi nilai yang harus dipedomani oleh seluruh ASN Pemerintah Kabupaten Klungkung
4. Penetapan Road Map Reformasi Birokrasi melalui Peraturan Bupati Klungkung Nomor 4 Tahun 2021 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024.
5. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi di tingkat perangkat daerah maupun di tingkat kabupaten.
6. Evaluasi Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi tingkat perangkat daerah.
7. Pemberian reward bagi 3 unit kerja dengan indeks reformasi birokrasi terbaik hasil dari evaluasi mandiri yang diasistensi oleh APiP Pemerintah Kabupaten Klungkung.

Dalam melaksanakan area perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja, ditemui kendala/faktor penghambat sebagai berikut:

1. Reformasi Birokrasi masih dipandang sebagai suatu pemenuhan tugas administrasi, dan bukan suatu gerakan perubahan untuk mewujudkan pelayanan publik yang lebih efektif dan efisien.
2. Perubahan mental aparatur membutuhkan waktu yang panjang sehingga memerlukan kerja keras dari segenap pihak dalam mensukseskannya.

Dalam melaksanakan area perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja, terdapat faktor pendukung yang mendukung pencapaian kinerja reformasi birokrasi sebagai berikut:

1. Komitmen pimpinan daerah mulai dari Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah sangat tinggi dalam melaksanakan reformasi birokrasi, hal tersebut



dibuktikan dengan beberapa program aksi reformasi birokrasi yang sukses dilaksanakan seperti penerapan TPP berbasis kinerja, penerapan tanda tangan elektronik, penerapan e-surat dan maraknya inovasi yang berkembang dalam mewujudkan pelayanan publik yang lebih efektif dan efisien.

2. Pelaksanaan reformasi birokrasi yang dimulai dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi merupakan dukungan bagi pelaksanaan reformasi birokrasi di tingkat kabupaten.
3. Tingginya control masyarakat melalui sosial media terhadap pelaksanaan pemerintahan merupakan faktor pendorong bagi Pemerintah Kabupaten Klungkung untuk semakin memperbaiki layanan dengan reformasi di 8 area perubahan.

Peraturan Perundang-Undangan

Penataan Peraturan Perundang-Undangan ditujukan untuk menciptakan regulasi yang tidak tumpang tindih dan harmonis, serta mendorong pencapaian kinerja pemerintahan. Untuk mendukung fokus tersebut, Pemerintah Kabupaten Klungkung menerapkan Standar Operasional Prosedur Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan, melakukan identifikasi atas peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis, serta melakukan penyesuaian-penyesuaian atas peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis.

Organisasi

Untuk menciptakan birokrasi yang berkinerja tinggi, pembentukan organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran menjadi fokus utama yang harus diselesaikan. Untuk mendukung hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Klungkung telah melakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Klungkung Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Klungkung Nomor 70 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Bupati Klungkung Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah. Perubahan Peraturan Bupati itu ditujukan untuk menyesuaikan struktur organisasi beberapa perangkat daerah karena adanya perubahan peraturan dari



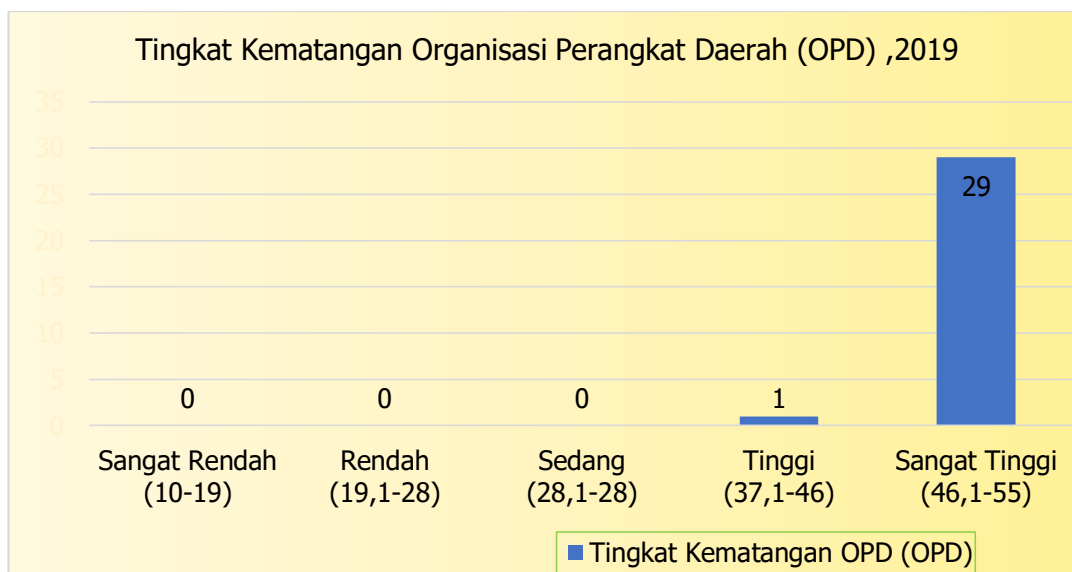
Pemerintah Pusat serta penyesuaian terhadap kinerja organisasi yang akan diwujudkan. Organisasi Perangkat Daerah yang dilakukan penyesuaian terhadap struktur organisasinya adalah:

Tabel 3.20.
Organisasi Perangkat Daerah Yang Mengalami Perubahan dan Tujuan Perubahannya

No	OPD	Tujuan /Alasan
1	Sekretariat Daerah	Penyesuaian Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota
2	Inspektorat Daerah	Penyesuaian Tugas dan Fungsi di Sekretariat
3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Penyesuaian Tugas dan Fungsi Yang Tumpang Tindih
4	Dinas Komunikasi dan Informatika	Penyesuaian Nomenklatur dan Tugas dan Fungsi
5	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan	Penyesuaian Tugas dan Fungsi Yang Tumpang Tindih
6	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Penyesuaian Tugas dan Fungsi menyesuaikan kinerja yang akan diwujudkan
7	Dinas Perhubungan	Penyesuaian Tugas dan Fungsi menyesuaikan kinerja yang akan diwujudkan
8	Dinas Pariwisata	Penyesuaian Tugas dan Fungsi menyesuaikan kinerja yang akan diwujudkan
9	Dinas Pertanian	Penyesuaian Tugas dan Fungsi menyesuaikan kinerja yang akan diwujudkan
10	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Penyesuaian Tugas dan Fungsi menyesuaikan kinerja yang akan diwujudkan
11	Badan pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	Penyesuaian Tugas dan Fungsi menyesuaikan kinerja yang akan diwujudkan

Sumber : Bagian Organisasi Setda Kab. Klungkung, 2020

Selain melakukan perubahan terhadap struktur organisasi, Pemerintah Kabupaten Klungkung juga melakukan penilaian kematangan penataan perangkat daerah dengan hasil sebagai berikut:



Sumber : Bagian Organisasi Setda Kab. Klungkung, 2019

Gambar 3.25 Tingkat Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), 2019

Dari penilaian terhadap tingkat kematangan Organisasi Perangkat Daerah, terdapat 1 perangkat daerah dengan tingkat kematangan Tinggi dan 29 perangkat daerah dengan tingkat kematangan Sangat Tinggi.

Tatalaksana

Penataan Tata Laksana ditujukan untuk menciptakan pemerintahan dengan sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur dan sesuai dengan prinsip-prinsip good governance. Beberapa perubahan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Klungkung adalah sebagai berikut:

a. Penerapan Tanda Tangan Elektronik

Mulai Tahun 2020, Pemerintah Kabupaten Klungkung menerapkan tanda tangan elektronik sebagai suatu usaha untuk mengupayakan pengurangan interaksi fisik dalam masa pandemi covid-19, meningkatkan efektivitas penandatanganan naskah dinas, efisiensi biaya alat tulis kantor, peningkatan validitas dokumen virtual serta kemudahan penyimpanan arsip elektronik.

b. Penyediaan Informasi Publik berbasis website

Penyediaan informasi publik berbasis website dilakukan dengan pengembangan website Pemerintah Kabupaten Klungkung, website Organisasi Perangkat



Daerah, dan website seluruh desa di Kabupaten Klungkung. Penyediaan Informasi Publik berbasis website ditujukan untuk meningkatkan keterbukaan informasi publik kepada masyarakat.

c. Penerapan e-Surat

Sistem Informasi Persuratan di Kabupaten Klungkung telah diterapkan sejak tahun 2017. Sistem Informasi Persuratan mencakup sistem informasi surat masuk, surat keluar dan disposisi surat yang dimanfaatkan oleh semua pejabat structural di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klungkung. E-Surat beroperasi di versi website dan versi android

d. Sistem Informasi Keuangan Elektronik

Sistem Informasi Keuangan berbasis elektronik menggunakan SIMDA Keuangan dan SIMDA Barang yang berbasis internet (online)

e. Administrasi Kepegawaian Elektronik

Sistem Informasi Kepegawaian Elektronik diterapkan untuk menyelesaikan administrasi kepegawaian seperti pengelolaan database kepegawaian, penyelesaian administrasi kenaikan pangkat dan kenaikan gaji berkala yang menghasilkan Surat Keputusan Kenaikan Pangkat dan Kenaikan Gaji Berkala secara elektronik.

f. Pengembangan E-Procurement

Pengembangan sistem pengadaan secara elektronik dilakukan dengan memanfaatkan sistem informasi pengadaan barang/jasa yang dikembangkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah (LKPP). Kabupaten Klungkung menjadi salah satu kabupaten yang merupakan pilot project Aplikasi Monitoring dan Evaluasi Online (AMEL) yang dikembangkan LKPP.

Capaian reformasi birokrasi area tatalaksana dapat direfleksikan dari Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang dirilis oleh Kementerian PAN dan RB Republik Indonesia. Indeks SPBE Kabupaten Klungkung pada tahun 2018 adalah sebagai berikut:



Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Klungkung, 2020

Gambar 3.26 Indeks SPBE Kabupaten Klungkung, 2019

Pelaksanaan evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) ditujukan untuk mengetahui capaian kemajuan pelaksanaan SPBE pada Pemerintah Kabupaten Klungkung, memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kualitas pelaksanaan SPBE, dan meningkatkan pelaksanaan SPBE pada Pemerintah Kabupaten Klungkung. Secara rinci hasil penilaian terhadap pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kabupaten Klungkung dibandingkan dengan rata-rata nilai SPBE Kabupaten seluruh Indonesia disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.21.
Rata-Rata Nilai SPBE Kabupaten se Indonesia dan Nilai SPBE Kabupaten Klungkung Tahun 2019

Indeks	Rata-Rata Nilai Kabupaten seluruh Indonesia	Nilai Kabupaten Klungkung (2019)
SPBE	1,77	2,1
Domain Kebijakan	1,53	1,29
Kebijakan Tata Kelola	1,43	1,14
Kebijakan Layanan	1,61	1,40
Domain Tata Kelola	1,5	1,43
Kelembagaan	1,39	1,00
Strategi dan Perencanaan	1,56	2,00



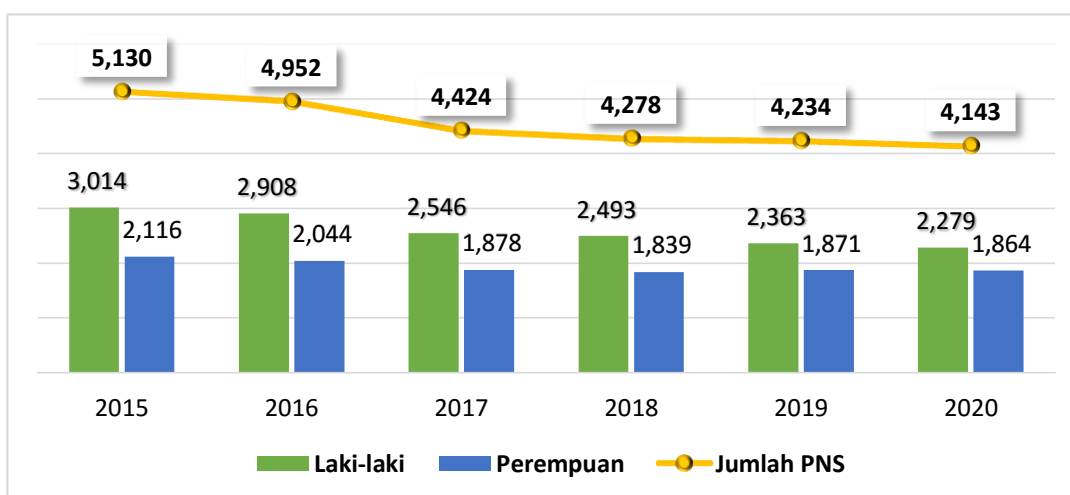
Indeks	Rata-Rata Nilai Kabupaten seluruh Indonesia	Nilai Kabupaten Klungkung (2019)
Teknologi Informasi dan Komunikasi	1,53	1,33
Domain Layanan SPBE	1,98	2,70
Administrasi Pemerintahan	2,15	3,29
Layanan Publik	1,66	1,67

Sumber data : Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Klungkung, 2020

Secara umum nilai SPBE Kabupaten Klungkung berada di atas rata-rata nilai kabupaten seluruh Indonesia, dimana nilai SPBE Kabupaten Klungkung berada di angka 2,1 sementara rata-rata Kabupaten seluruh Indonesia adalah 1,77. Dari 3 domain, terdapat 2 domain yang berada dibawah rata-rata yaitu domain tata kelola dan domain kebijakan.

Sumber Daya Manusia Aparatur

Penataan sumber daya manusia aparatur ditujukan untuk menciptakan sumber daya manusia aparatur yang berintegritas, netral, kompeten, *capable*, professional, berkinerja tinggi dan sejahtera. Kapasitas Sumber Daya Manusia Aparatur di Kabupaten Klungkung sebagai berikut:



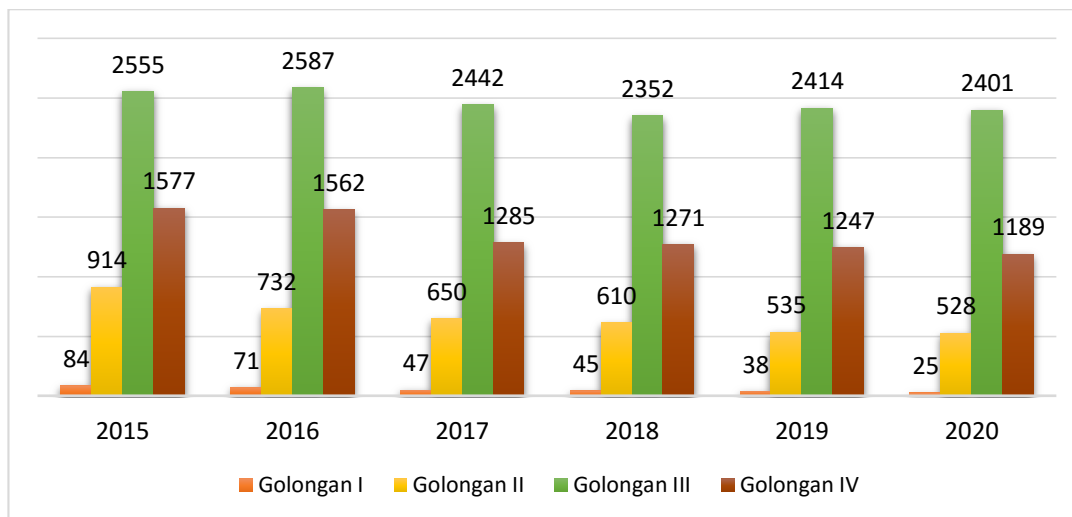
Sumber : BKPSDM Kab. Klungkung, 2021

Gambar 3.27. Jumlah PNS di Pemerintah Kabupaten Klungkung Tahun 2015-2020

Jumlah pegawai negeri sipil (PNS) di Kabupaten Klungkung terus mengalami penurunan. Pada tahun 2015 jumlah PNS di Kabupaten Klungkung adalah 5.130 orang turun menjadi 4.143 di Tahun 2020. Sedangkan perkembangan jumlah PNS



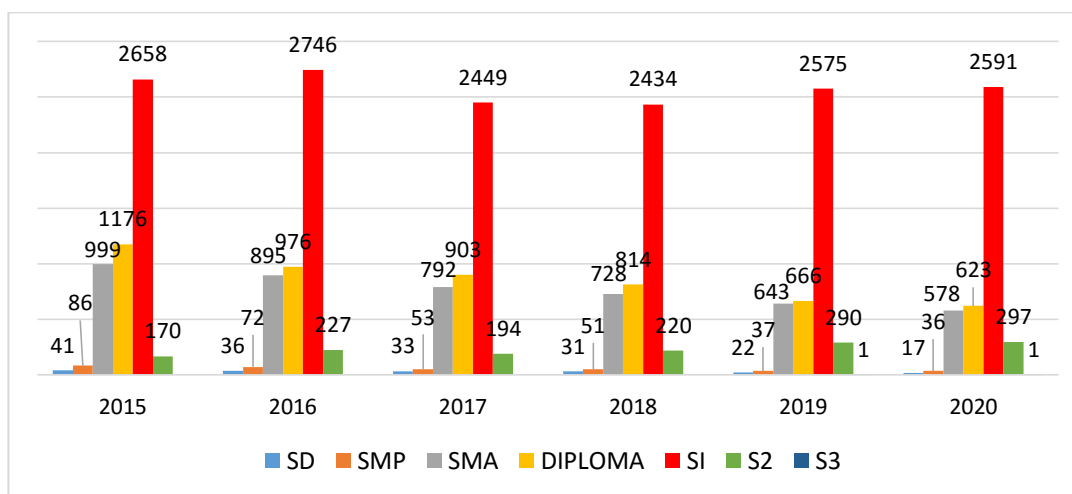
Pemerintah Kabupaten Klungkung menurut golongan dan pendidikan adalah sebagaimana dalam gambar di bawah ini.



Sumber : BKPSDM Kab. Klungkung, 2021

Gambar 3.28 Jumlah PNS di Pemerintah Kabupaten Klungkung menurut golongan ruang Tahun 2015-2020

Berdasarkan golongan ruang, maka hampir seluruh golongan ruang mengalami penurunan. Golongan III pada Tahun 2020 dengan persentase paling tinggi yaitu 57,95% dan golongan II 12,74%. Sedangkan komposisi PNS Pemkab Klungkung dilihat dari pendidikan adalah sebagaimana dalam gambar di bawah ini.



Sumber : BKPSDM Kab. Klungkung, 2021

Gambar 3.29 Jumlah PNS di Pemerintah Kabupaten Klungkung menurut pendidikan Tahun 2013-2020



Berdasarkan gambar diatas, terlihat bahwa pada Tahun 2020 tingkat jumlah Pendidikan pegawai dengan jumlah tertinggi adalah dengan Pendidikan S1 yaitu sebesar 2.591 orang (62,54%) meningkat dari tahun 2019 terdapat sebanyak 2.575 orang atau sebesar. Pendidikan S2 juga secara persentase mengalami meningkat yaitu dari 290 orang di tahun 2019 menjadi 297 orang di Tahun 2020. Hal ini menunjukkan secara kualitas, sesungguhnya PNS Kabupaten Klungkung mengalami peningkatan, khususnya untuk kualitas pendidikan pegawainya.

Untuk mewujudkan fokus di bidang sumber daya manusia aparatur Pemerintah Kabupaten Klungkung menerapkan hal-hal sebagai berikut:

a. Evaluasi Jabatan

Evaluasi Jabatan telah dilakukan didahului dengan penyusunan analisis jabatan dan pemetaan jabatan. Hasil evaluasi jabatan telah memperoleh validasi dari Kementerian PAN dan RB Republik Indonesia serta telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Klungkung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klungkung. Pada tahun 2020, Peraturan tersebut digantikan dengan Peraturan Bupati Klungkung Nomor 3 Tahun 2020 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klungkung. Sejak tahun 2019, Kelas dan Nilai Jabatan telah digunakan sebagai dasar pembayaran tambahan penghasilan kepada PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klungkung.

b. Penerapan Minus Growth

Penerapan minus growth telah dilaksanakan dalam penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil yang melalui analisis kebutuhan sebelum proses recruitment.

c. Pembatasan dan/atau Pengurangan Belanja Pegawai

d. Monev Redistribusi/Relokasi PNS

e. Penerapan seleksi CPNS melalui Penggunaan *Computer Assisted Test* (CAT) untuk seleksi CPNS

f. Penguatan Assessment Center untuk Promosi Jabatan

g. Diklat Penjurangan dan Diklat Fungsional

h. Penerapan Pengisian Lowongan Jabatan Secara Terbuka diterapkan untuk jabatan pimpinan tinggi.



- i. Penetapan Standar Kompetensi Jabatan yang dimulai pada tahun 2020 dengan penetapan Surat Keputusan Bupati Klungkung Nomor 85/22/HK/2020 tentang Standar Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klungkung
- j. Peningkatan Kemampuan PNS Berbasis Kompetensi
- k. Penerapan Diklat PNS Berbasis Kompetensi
- l. Penegakan Etika dan Disiplin Pegawai Negeri.
- m. Mutasi dan Rotasi Sesuai dengan Kompetensi Secara Periodik
- n. Pengukuran Kinerja Individu
Pengukuran kinerja individu dilakukan dengan format Sasaran Kerja Pegawai serta Laporan Kinerja Individu yang berisikan pelaporan capaian kinerja dari Perjanjian Kinerja yang diperjanjikan. Laporan Kinerja Individu dikelola dengan bantuan aplikasi e-Kinerja.
- o. Penguatan Jabatan Fungsional melalui: Penambahan jumlah, Penetapan Pola Karier, Peningkatan Kemampuan, dan Peningkatan Tunjangan. Sejak tahun 2019, pembayaran tambahan penghasilan menggunakan kelas dan nilai jabatan. Dengan sistem pembayaran ini, PNS dengan Jabatan Fungsional memperoleh penghasilan yang setara dengan jabatan structural dengan kelas yang sama.
- p. Sistem Reward dan Punishment
Mulai tahun 2019, Kabupaten Klungkung menerapkan sistem reward dan punishment yang berbasis capaian aktivitas harian. Pada tahun 2020, Pemerintah Kabupaten Klungkung menerapkan sistem reward dan punishment yang berbasis pada capaian aktivitas harian, capaian rencana aksi perangkat daerah serta capaian disiplin pribadi PNS. Hal tersebut didasari dengan ketentuan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 061-5449 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian Persetujuan Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Akuntabilitas

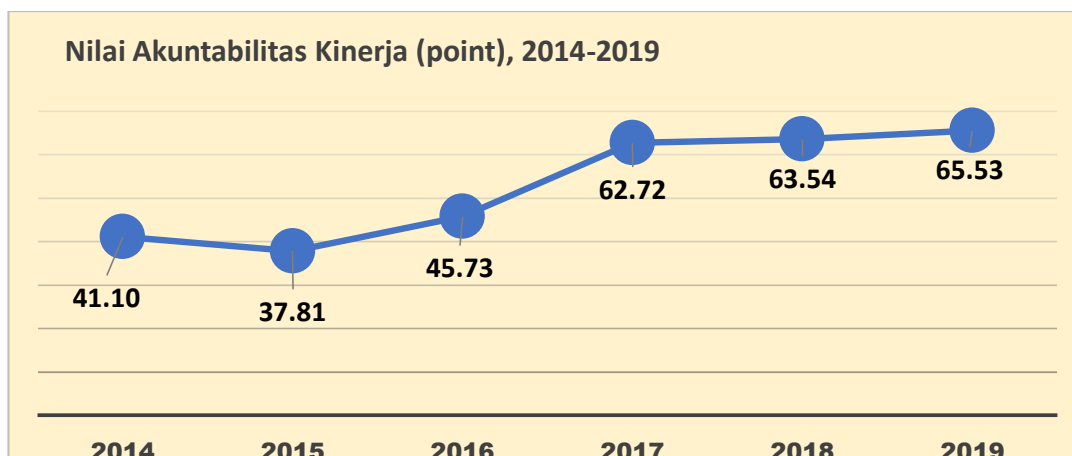
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada



setiap (pimpinan) instansi Pemerintah. SAKIP bagi Instansi Pemerintah dapat diibaratkan seperti halnya RAPORT bagi siswa yang mampu menggambarkan tingkat kemampuan seorang siswa dalam menyerap pelajaran serta menilai prestasi belajarnya untuk menentukan apakah layak untuk naik kelas atau tidak naik kelas. Akuntabilitas merupakan suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan misi dan visi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan.

Pemerintah Kabupaten Klungkung selaku pengemban amanah masyarakat, melaksanakan kewajiban akuntabilitas melalui penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Klungkung yang dibuat sesuai dengan ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan kinerja memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Untuk tingkat kabupaten, fokus pelaporan kinerja adalah pencapaian tujuan/sasaran strategis yang bersifat hasil (*outcome*). Berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapainya atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan. Dibawah ini disajikan capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2019.



Sumber : Bagian Organisasi Setda Kab. Klungkung, 2021

Gambar 3.30 Hasil Evaluasi AKIP Kab. Klungkung, 2014-2019

Berdasarkan gambar diatas dapat diketahui bahwa capaian indikator Kinerja Hasil Evaluasi AKIP di Kabupaten Klungkung pada tahun 2019 sebesar 65,53 point (B). Hasil Evaluasi AKIP pada tahun 2014 sebesar 41,10 point (C) dan mengalami peningkatan tajam di tahun 2017 menjadi 62,72 point (B). Jika dilihat dari trend hasil evaluasi AKIP Kabupaten Klungkung memiliki kecenderungan meningkat dari tahun 2014 hingga 2017 dan stagnansi dari tahun 2017-2019. Untuk itu diperlukan usaha-usaha untuk terus mempertahankan bahkan meningkatkan Hasil Evaluasi AKIP Pemerintah Kabupaten Klungkung. Jika dilihat dari hasil evaluasi penerapan akuntabilitas kinerja di Kabupaten Klungkung dapat diperoleh gambaran sebagai berikut:

Tabel 3.22.
Hasil Penilaian Masing-Masing Komponen Akuntabilitas Kab. Klungkung 2017-2018

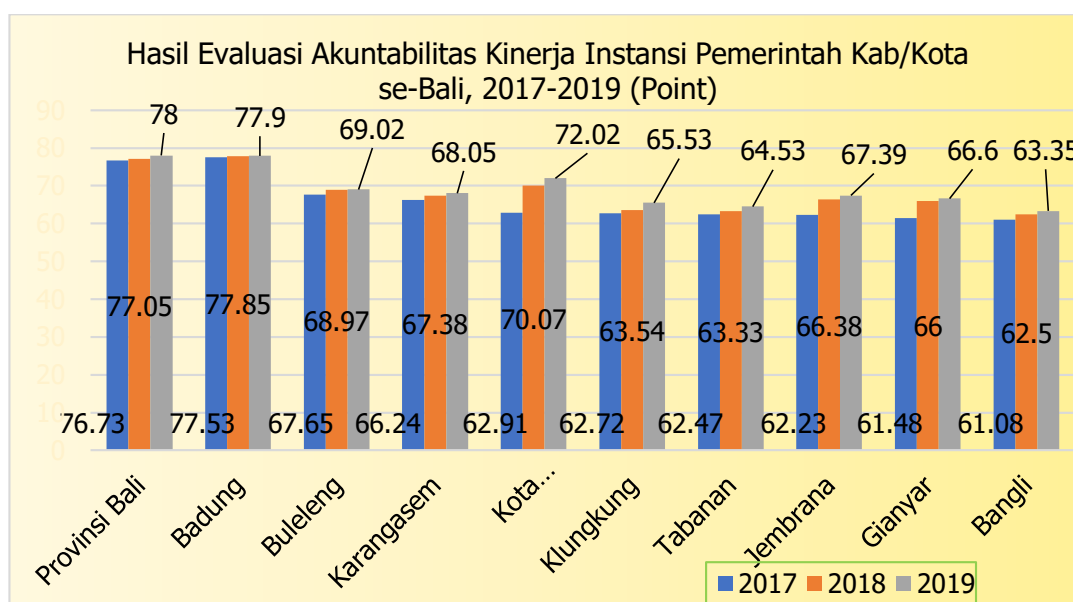
No	Komponen	Bobot	Nilai	
			2017	2018
1	Perencanaan Kinerja	30,00	22,31	22,50
2	Pengukuran Kinerja	25,00	15,76	14,70
3	Pelaporan Kinerja	15,00	10,05	11,33
4	Evaluasi Internal	10,00	6,12	6,58
5	Capaian Kinerja	20,00	9,30	10,42
Nilai Hasil Evaluasi		100,00	63,54	65,53
KATEGORI			B	B

Sumber : LHE AKIP Kab. Klungkung, 2020



Dilihat dari hasil evaluasi terhadap penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Klungkung tahun 2018 terdapat peningkatan dari tahun 2017. Pada tahun 2018 komponen pengukuran kinerja mengalami penurunan nilai, hal tersebut disebabkan karena pada tahun 2018 adalah kali pertama evaluasi SAKIP diterapkan dengan melibatkan seluruh komponen manajemen kinerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klungkung yang diwakili oleh 20 (dua puluh) Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Sebagai bahan perbandingan, berikut ini disajikan perbandingan hasil evaluasi AKIP tingkat Kabupaten/Kota se-Bali untuk hasil evaluasi AKIP tahun 2019.



Sumber : Biro Organisasi Setda Prov Bali, 2020

Gambar 3.31 Nilai Evaluasi AKIP Kab/Kota se Bali (poin), 2017-2019

Dari gambar diatas dapat diketahui bahwa Kabupaten Klungkung memperoleh nilai evaluasi AKIP sebesar 65,53 poin pada tahun 2019, berada diatas Kabupaten Tabanan dan Bangli. Adapun usaha-usaha yang telah dilakukan dalam rangka meningkatkan nilai evaluasi atas implementasi SAKIP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klungkung adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan tingkat Perangkat Daerah
 - a. Peningkatan kualitas perencanaan dilakukan dengan memperbaiki kualitas indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan pembangunan daerah. Perbaikan kualitas indikator ini diarahkan



untuk memenuhi kriteria indikator kinerja yang SMART (*Specific, Measurable, Attainable, Reasonable dan Time Bound*). Perbaikan kualitas indikator juga diarahkan dengan meningkatkan kualitas indikator kinerja yang berorientasi hasil melalui penyusunan matrik kinerja/ *cascading* kinerja di semua perangkat daerah. Sasaran dan indikator kinerja dari level terbawah dirancang saling mendukung baik secara vertikal maupun horizontal. Secara horizontal dirancang untuk dapat mengaplikasikan sistem manajemen Ban Berjalan di dalam organisasi perangkat daerah. Setiap bagian / unit kerja akan saling mendukung dengan porsi yang sesuai untuk mendukung terwujudnya kinerja organisasi. Secara vertikal, setiap kinerja bawahan secara Bersama sama dengan rekan setingkatnya akan mendukung kinerja atasannya.

b. Penyelarasan antar dokumen perencanaan

Hasil penyusunan matrik kinerja/cascading kinerja kemudian dituangkan dalam dokumen rencana strategis perangkat daerah. Indikator kinerja dalam rencana strategis harus tertuang dalam Rencana Kerja Tahunan. Dalam penyelarasan itu juga dibuat penyeragaman, dimana Sasaran dalam Renstra Perangkat Daerah menjadi IKU Perangkat Daerah dan sekaligus menjadi Perjanjian Kinerja bagi Eselon II atau Kepala Perangkat Daerahnya. Setiap sasaran dan indikator kinerja program merupakan tanggungjawab eselon III dan langsung menjadi Perjanjian Kinerja bagi eselon III. Setiap sasaran dan indikator kinerja kegiatan merupakan tanggungjawab eselon IV dan langsung menjadi Perjanjian Kinerja bagi eselon IV.

c. Penyelarasan antara dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan.

Setiap indikator kinerja pada Rencana Kerja yang merupakan hasil dari penyusunan *cascading* kinerja harus menjadi indikator kinerja pada program dan kegiatan pada Dokumen Penganggaran dan karenanya menjadi suatu target yang harus dicapai dengan anggaran yang disediakan. Karena dokumen penganggaran dan perencanaan telah dibuat selaras, maka dokumen pelaporan otomatis melaporkan pencapaian target kinerja yang tertuang dalam dokumen penganggaran tersebut.

2. Meningkatkan Pemahaman Implementasi SAKIP di Perangkat Daerah

- a. Peningkatan Pemahaman oleh Team SAKIP Bersama Tim Gerakan Disiplin Nasional Kabupaten Klungkung



Peningkatan pemahaman oleh Team SAKIP dilakukan di setiap koordinasi kegiatan perencanaan, penganggaran maupun pelaporan.

b. Peningkatan Pemahaman oleh Team Kementerian PAN dan RB

Peningkatan pemahaman oleh Team Kementerian PAN dan RB dilakukan pada suatu kegiatan asistensi desk Cascading Kinerja.

c. Peningkatan Pemahaman internal oleh Kepala Perangkat Daerah

Peningkatan pemahaman internal oleh Kepala Perangkat Daerah dilakukan pada setiap kegiatan koordinasi internal di lingkungan Perangkat Daerah.

3. Inventarisasi Dokumen-Dokumen SAKIP

Implementasi SAKIP di tataran perangkat daerah, pada dasarnya telah dilakukan setiap tahunnya, namun karena kurangnya pemahaman atas konsep SAKIP itu sendiri, pelaksanaan kegiatan yang sebenarnya adalah bagian dari SAKIP tidak dipahami sebagai suatu aktivitas manajemen SAKIP. Kegiatan pengendalian melalui rencana aksi, evaluasi atas renstra dan renja, evaluasi atas kinerja perangkat daerah mulai diinventarisasi dokumen pendukungnya dan digunakan sebagai kelengkapan dokumen SAKIP saat evaluasi implementasi SAKIP.

4. Perbaikan kualitas pelaporan kinerja

Sebelumnya pelaporan kinerja tidak dilakukan berdasarkan konsep-konsep SAKIP, mulai tahun 2018, pelaporan kinerja diarahkan untuk memenuhi kriteria-kriteria dalam konsep SAKIP yang dikembangkan oleh Kementerian PAN dan RB.

5. Peningkatan Kualitas Evaluasi atas Implementasi SAKIP

Peningkatan kualitas evaluasi dilakukan dengan peningkatan kemampuan SDM evaluator serta koordinasi intensif antara evaluator dan Perangkat Daerah yang dievaluasi. Dengan terjalinnya koordinasi, evaluator bisa mendapatkan keyakinan yang memadai atas pelaksanaan SAKIP di perangkat daerah dan perangkat daerah dapat meningkatkan pengetahuannya mengenai konsep SAKIP.

6. Perencanaan Berbasis Elektronik

Proses perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Klungkung sepenuhnya dilakukan secara online melalui link sirenbangda.klungkungkab.go.id. Proses online tersebut dilakukan sejak penjaringan aspirasi masyarakat melalui pokok-pokok pikiran DPRD, penyusunan rencana kerja dan penyusunan rencana kerja anggaran difasilitasi dengan SIMDA Keuangan yang telah terintegrasi dengan sistem perencanaan pembangunan.



7. *E-Performance*

Proses pelaporan kinerja dilakukan secara online melalui link sirenbangda.klungkungkab.go.id untuk pelaporan kinerja perangkat daerah, penyusunan rencana aksi dalam rangka pencapaian kinerja perangkat daerah, pelaporan realisasi aksi pencapaian kinerja perangkat daerah, pelaporan kinerja bulanan dan pelaporan capaian rencana kerja triwulanan. Pelaporan Kinerja individu dikelola melalui e-sakip dan e-kinerja Kabupaten Klungkung. Mulai tahun 2020, capaian rencana aksi masing-masing perangkat daerah menjadi salah satu dasar pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai ASN, selain aktivitas pribadi dan capaian disiplin pribadi yang berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 061-5449 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian Persetujuan Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Adapun permasalahan yang ditemui dalam mewujudkan kinerja penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah sebagai berikut:

1. Tuntutan terhadap kebutuhan akan perencanaan kinerja yang berkualitas belum sepenuhnya dapat terpenuhi, hal tersebut disebabkan karena rendahnya pemahaman terhadap standar-standar kinerja yang seharusnya dicapai dalam rangka memberikan pelayanan publik yang berkualitas.
2. Kelemahan pengelolaan data kinerja yang bersumber dari kurangnya pemahaman akan indikator kinerja, pemahaman pentingnya data kinerja beserta data dukungannya dan belum berubahnya *mind set* bekerja untuk mencapai kinerja dan bukan rutinitas semata.
3. Penerapan program aplikasi yang terintegrasi antara perencanaan sampai pelaporan belum dapat terwujud karena permasalahan teknis dalam *software* aplikasi.
4. Konsep SAKIP belum dipahami sebagai sebuah konsep manajemen yang membantu unit kerja dalam mempermudah pencapaian tujuan. Konsep SAKIP baru dijalankan sebagai sebuah syarat administrasi.
5. Kualitas evaluator tidak sama, sehingga dalam melakukan evaluasi terdapat perbedaan hasil antar evaluator karena belum adanya satu pihak yang melakukan *Quality Assurance* atas hasil evaluasi dari evaluator.



6. Kurangnya komitmen Perangkat Daerah untuk menyajikan laporan kinerja secara komprehensif dan berbasis bukti dukung. Kemampuan menyajikan laporan kinerja berbeda-beda antar perangkat daerah, sehingga beberapa perangkat daerah hanya sekedar melaporkan kinerja seadanya, tanpa berusaha mengungkap lebih jauh mengenai usaha-usaha yang telah dilaksanakan, faktor pendorong dan penghambat yang ditemui serta permasalahan dan solusi selama kurun waktu pencapaian kinerja.
7. Lemahnya pengendalian, sehingga kesulitan mengidentifikasi atau menginventarisasi permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian sasaran, atau bahkan tidak mengetahui standar yang seharusnya dicapai, sehingga terkesan TIDAK PUNYA MASALAH/TIDAK ADA MASALAH.

Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah merupakan pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan, pengungkapan dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sasarannya adalah laporan keuangan yang mencakup penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran keuangan instansi pemerintah daerah. Instrumen utama dari akuntabilitas pengelolaan keuangan keuangan daerah adalah anggaran pemerintah daerah, data yang secara periodik dipublikasikan, laporan tahunan dan hasil investigasi dan laporan umum lainnya yang disiapkan oleh agent yang independen. Anggaran tahunan secara khusus mempunyai otoritas legal untuk pengeluaran dana publik, sehingga proses penganggaran secara keseluruhan menjadi relevan untuk manajemen fiskal dan untuk melaksanakan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pengendalian pada berbagai tingkat operasi. Atas pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah, Badan Pemeriksa Keuangan setiap tahunnya melakukan pemeriksaan keuangan dan pemberian opini terhadap pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah tersebut. Pemberian opini merupakan bentuk apresiasi dari BPK atas hasil pemeriksaan laporan keuangan, disamping pemberian rekomendasi lainnya. Laporan keuangan yang disusun oleh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah merupakan media akuntabilitas keuangan yang disajikan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Opini Wajar tanpa pengecualian (biasa disingkat WTP) adalah opini audit yang akan diterbitkan jika laporan keuangan dianggap memberikan informasi yang bebas dari salah saji material. Jika laporan keuangan diberikan opini jenis ini, artinya



auditor meyakini berdasarkan bukti-bukti audit yang dikumpulkan, perusahaan/pemerintah dianggap telah menyelenggarakan prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan baik, dan walaupun ada kesalahan, kesalahannya dianggap tidak material dan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan. Selain opini WTP ada pula opini WTP Dengan Paragraf Penjelasan (biasa disingkat WTP-DPP). Opini WTP-DPP dikeluarkan karena dalam keadaan tertentu auditor harus menambahkan suatu paragraf penjelasan dalam laporan audit, meskipun tidak mempengaruhi pendapat wajar tanpa pengecualian atas laporannya. Ada beberapa keadaan yang menyebabkan ditambahkannya paragraf penjelasan. Keadaan itu, misalnya, adanya ketidakkonsistenan penerapan prinsip akuntansi, adanya keraguan tentang kelangsungan hidup lembaga pengelola keuangan. Selain itu, bisa juga karena auditor setuju dengan suatu penyimpangan dari prinsip akuntansi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan atau adanya penekanan atas suatu hal. Dan bisa juga karena laporan audit yang melibatkan auditor lain. Opini Wajar dengan pengecualian (biasa disingkat WDP) adalah opini audit yang diterbitkan jika sebagian besar informasi dalam laporan keuangan bebas dari salah saji material, kecuali untuk rekening atau item tertentu yang menjadi pengecualian. Sebagian akuntan memberikan julukan *little adverse* (ketidakwajaran yang kecil) terhadap opini jenis ini, untuk menunjukkan adanya ketidakwajaran dalam item tertentu, namun demikian ketidakwajaran tersebut tidak mempengaruhi kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan. Opini tidak wajar adalah opini audit yang diterbitkan jika laporan keuangan mengandung salah saji material, atau dengan kata lain laporan keuangan tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Jika laporan keuangan mendapatkan opini jenis ini, berarti auditor meyakini laporan keuangan perusahaan/pemerintah diragukan kebenarannya, sehingga bisa menyesatkan pengguna laporan keuangan dalam pengambilan keputusan.



Tabel 3.23.
Opini Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Klungkung, 2015-2019

No	Tahun	Opini Atas Laporan Keuangan
1	2015	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2	2016	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
3	2017	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
4	2018	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
5	2019	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

Sumber : BPKPD Kab. Klungkung, 2021

Pemerintah Kabupaten Klungkung telah meraih opini WTP selama 4 tahun berturut-turut. Pada tahun-tahun berikutnya, Pemerintah Kabupaten Klungkung dituntut untuk terus meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangannya.

Dalam mewujudkan sasaran Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Kabupaten Klungkung mengalami kendala sebagai berikut:

1. Pengelolaan asset daerah belum berjalan dengan maksimal meskipun telah disediakan program aplikasi, namun pemahaman akan tata kelola asset yang masih rendah sangat berpengaruh terhadap banyaknya kasus salah saji asset pada laporan keuangan.
2. Efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dalam kerangka pengelolaan pemerintahan belum maksimal, seringkali kegiatan-kegiatan rutin dan bersifat administratif lebih mendominasi aktivitas perangkat daerah dibandingkan kegiatan-kegiatan yang bersifat pelayanan sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah masing-masing.
3. Lemahnya penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang ditandai dengan maturitas SPIP di level 2 akibat kurang tersosialisasinya manfaat dan tata cara penerapan SPIP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klungkung.

Untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan yang akuntabel, Pemerintah Kabupaten Klungkung melakukan upaya-upaya sebagai berikut :

1. Peningkatan pemahaman tata kelola keuangan daerah dengan berbagai pelatihan yang ditujukan kepada pelaksana di tingkat perangkat daerah maupun kabupaten.
2. Peningkatan pemahaman Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap pelaksana di Perangkat Daerah



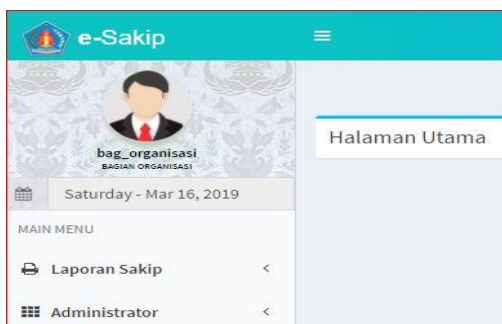
DOKUMENTASI PENCAPAIAN SASARAN



Penerimaan Hasil Evaluasi SAKIP 2018



Opini WTP untuk Laporan Keuangan 2017



Penerapan e-Sakip



Penerapan e-kinerja



Perencanaan terintegrasi dengan pelaporan



Klungkung Mesadu

Sistem Pengaduan Publik



Pengawasan

Reformasi Birokrasi di area pengawasan ditujukan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN. Untuk melaksanakan reformasi birokrasi di area pengawasan, Pemerintah Kabupaten Klungkung melaksanakan hal-hal sebagai berikut :

- a. Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Kabupaten Klungkung telah dilakukan penilaian dengan memperoleh tingkat maturitas SPIP Level 3 pada tahun 2019.
- b. Peningkatan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai *Quality Assurance and Consulting* telah dilaksanakan. Pada tahun 2019 telah dilakukan penilaian terhadap kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di Kabupaten Klungkung dengan memperoleh tingkat Kapabilitas APIP level 2.
- c. Pelaporan Harta Kekayaan PNS
Pelaporan Harta Kekayaan PNS dilakukan secara online dengan aplikasi SIHARKA yang dikembangkan oleh Kementerian PAN dan RB Republik Indonesia. Untuk memastikan semua PNS melakukan pelaporan harta kekayaannya, mulai tahun 2020, bagi PNS yang belum melaporkan harta kekayaan melalui SIHARKA, tidak dapat melaporkan aktivitasnya di aplikasi e kinerja. Hal tersebut akan berpengaruh pada perolehan Tambahan Penghasilan PNS yang bersangkutan.
- d. *Whistle Blower System*
Whistle Blower System telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Klungkung Nomor 85 Tahun 2019 tentang Sistem Penanganan Pengaduan Dugaan Tindak Pidana Korupsi. Penerapan *whiste blower system* akan difasilitasi dengan system yang dikembangkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa (LKPP).
- e. Pelaksanaan Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi
Dalam rangka mendukung percepatan pemberantasan korupsi, Pemerintah Kabupaten Klungkung secara intensif melaksanakan rencana aksi pemberantasan korupsi melalui Koordinasi, Supervisi dan Pencegahan (KORSUPGAH) KPK yang diasistensi langsung oleh Komisi Pemberantasan



Korupsi Republik Indonesia.

f. Penanganan Benturan Kepentingan

Penanganan benturan kepentingan di laksanakan dengan Peraturan Bupati Klungkung dan dimonitor secara berkala.

g. Pengendalian gratifikasi

Pengendalian gratifikasi dilaksanakan dengan Peraturan Bupati Klungkung Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pengendalian Gratifikasi dan dimonitor secara berkala.

Pelayanan Publik

Seiring dengan berbagai perkembangan yang terjadi di masyarakat, kebutuhan akan pelayanan publik juga otomatis meningkat baik jenis maupun kegiatannya. Setiap organisasi publik yang fungsinya menyelenggarakan pelayanan publik harus selalu berupaya untuk memberikan pelayanan yang terbaik pada masyarakat. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Klungkung dalam mewujudkan kepuasan masyarakat dalam pelayanan publik adalah sebagai berikut:

1. Perbaikan tatalaksana pelayanan publik dengan menerapkan standar-standar pelayanan publik, penyederhanaan standar operasional prosedur dan perbaikan sarana dan prasarana di tempat-tempat pelayanan publik.
2. Peningkatan kapasitas aparatur pelayanan publik dengan berbagai pelatihan teknis terkait.
3. Memberikan pelayanan yang lebih dekat dengan masyarakat sebagai berikut:
 - a. Pelaksanaan Layanan Perijinan All Online
Pelayanan perijinan dilaksanakan satu pintu dengan bantuan OSS (*online Submission System*) yang telah terselenggara dari proses pengusulan hingga cetak dokumen perijinan.
 - b. Program aksi "KAWI SMARA".
Kawi Smara merupakan suatu program aksi dimana setiap pasangan yang menikah langsung memperoleh akta perkawinan sesaat setelah pernikahan dilangsungkan.



c. Program Aksi Caling Tanduk.

Kondisi wilayah Kabupaten Klungkung yang terdiri dari tiga pulau yang tersebar, menyulitkan masyarakat untuk mengakses pelayanan publik termasuk pelayanan administrasi kependudukan. Biaya untuk mendapatkan pelayanan publik menjadi mahal karena ada biaya tambahan yang harus dikeluarkan masyarakat yaitu biaya transportasi. Caling Tanduk merupakan pelayanan jemput bola yang menghadirkan pelayanan langsung di tengah-tengah masyarakat. Pelayanan keliling mencetak dokumen kependudukan ini mewajibkan semua permohonan yang telah memenuhi syarat harus sudah selesai pada hari itu.

d. Program Aksi PREDATOR

Pemerintah Kabupaten Klungkung juga melakukan inovasi dengan melakukan perekaman data menggunakan sepeda motor atau biasa disebut "PREDATOR". Pelayanan ini membantu masyarakat yang tidak dapat datang ke pusat pelayanan dapat menikmati layanan kependudukan di tempat tinggalnya.

e. Program Aksi BELA NANDA

Bela Nanda (Begitu Anak Lahir Langsung Dapat Akta) merupakan program aksi yang memberikan kemudahan bagi pasangan yang melahirkan di rumah sakit dan puskesmas guna mencatatkan sekaligus mendapatkan kutipan Akta Kelahiran. Dengan persyaratan yang ringan dan proses pengurusannya dilakukan oleh pihak rumah sakit dan puskesmas. Hal ini didasarkan analisis dimana penduduk sering lalai mengurus akta kelahiran anaknya, sehingga saat dibutuhkan akta kelahiran belum dimiliki oleh penduduk.

Dalam usaha mewujudkan peningkatan kualitas Pelayanan Publik Kepada Masyarakat, Pemerintah Kabupaten Klungkung menemui kendala sebagai berikut:

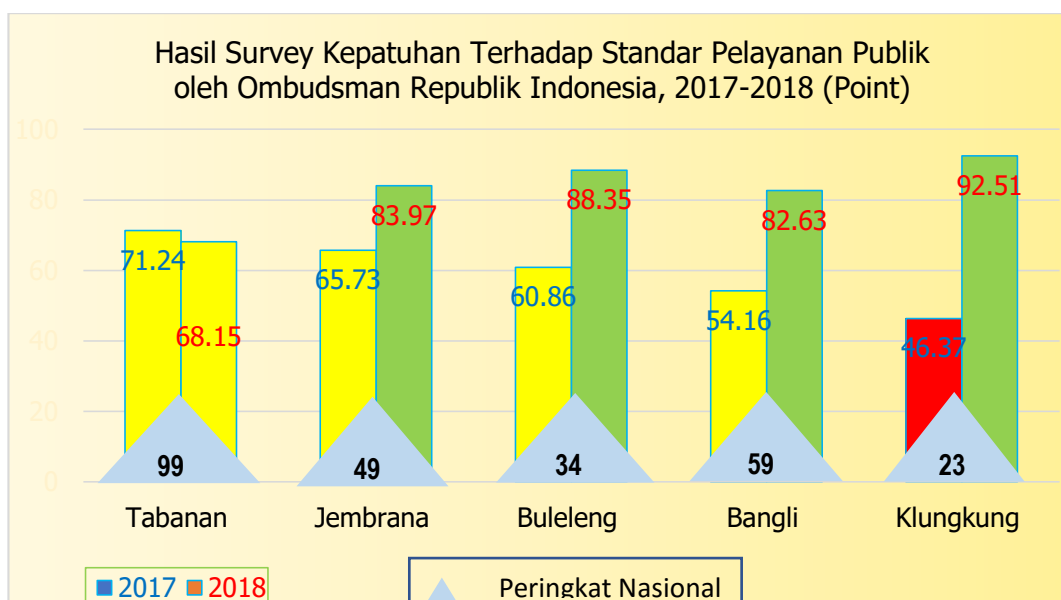
1. Tatalaksana Pelayanan Publik di instansi-instansi pemberi layanan publik belum tertata secara sistematis dan berorientasi terhadap kepentingan konsumen. Kendala-kendala yang ditemui adalah : proses bisnis antar pemberi layanan publik belum terorganisir sehingga sangat memungkinkan adanya duplikasi aktivitas yang tidak diperlukan, ketidaknyamanan pengguna karena prosedur yang berbelit dan belum terintegrasinya pelayanan publik dalam satu tempat



pelayanan. Selain kendala antar instansi, di dalam internal instansi juga ditemui berbagai kendala seperti : belum tersusunnya Standar Operasional Prosedur yang benar-benar memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi pengguna, minimnya pemanfaatan teknologi dalam memberikan pelayanan serta berbagai kendala sarana dan prasarana pelayanan.

2. Profesionalisme aparatur pemberi layanan publik belum memenuhi standar-standar pelayanan prima.
3. Regulasi pelayanan publik belum menciptakan iklim yang baik untuk berinvestasi

Untuk mengukur kinerja Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Kepada Masyarakat bisa digunakan perbandingan hasil survey Ombudsman Republik Indonesia atas kepatuhan terhadap pemenuhan standar pelayanan publik. Pada tahun 2018, di Provinsi Bali terdapat 5 Kabupaten yang menjadi sampel survey kepatuhan terhadap pelayanan publik yaitu : Kabupaten Bangli, Buleleng, Jembrana, Tabanan dan Klungkung. Adapun hasil survey masing-masing kabupaten adalah sebagai berikut :



Sumber : website Ombudsman Republik Indonesia, 2018

Gambar 3.32 Hasil Survey Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik (sample Kab/Kota se Bali), 2017

Keterangan :

Zona Merah/Tingkat Kepatuhan Rendah : 0-55

Zona Kuning/Tingkat Kepatuhan Sedang : 56-88

Zona Hijau/Tingkat Kepatuhan Tinggi : 89-110



Hasil survey menunjukkan bila Pemerintah Kabupaten di Bali rata-rata masih belum melengkapi lima standar pelayanan. Diantaranya, pelayanan khusus bagi pengguna layanan berkebutuhan khusus, informasi dan prosedur pengaduan, informasi pelayanan publik elektronik atau nonelektronik (booklet, website, dan lain-lain), pejabat/petugas pengelola pengaduan, dan sarana pengukuran kepuasan pelanggan. Beberapa variabel dan indikator yang dijadikan sebagai dasar penilaian di antaranya, standar pelayanan, maklumat pelayanan, sistem informasi pelayanan publik, sarana dan prasarana fasilitas, pelayanan khusus, pengelolaan pengaduan, visi misi dan motto pelayanan, atribut, dan pelayanan terpadu.

Pemerintah Kabupaten Klungkung sebelumnya berada di zona merah pada tahun 2018 masuk ke zona hijau dengan nilai tertinggi di Bali yakni 92,51 atau meraih peringkat 23 nasional. Tiga Pemerintah Kabupaten lain yakni Buleleng dengan nilai 88,35 (peringkat 34 nasional), Jembrana dengan nilai 83,97 (peringkat 49 nasional), dan Bangli dengan nilai 82,63 (peringkat 59 nasional) juga masuk ke zona hijau dari sebelumnya kuning. Hanya Pemerintah Kabupaten Tabanan yang masih belum bergerak dari zona kuning dari tahun sebelumnya dengan nilai 68,15 dan hanya meraih peringkat 99 nasional. Terdapat 2 OPD di Kabupaten Klungkung yang masih berada di bawah nilai rata-rata, yakni di Dinas Sosial untuk urusan perempuan dan bedah rumah, serta Badan Lingkungan Hidup yang masih ada kekurangan dalam hal perizinan lingkungan hidup.

Selain itu, prestasi Pemerintah Kabupaten Klungkung dalam mengelola birokrasi antara lain sebagai berikut:

1. Predikat Baik untuk Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) oleh Kementerian PAN dan RB Republik Indonesia.
2. Predikat Kepatuhan Amat Tinggi untuk Kepatuhan Terhadap Pemenuhan Standar Pelayanan Publik oleh Ombudsman Republik Indonesia.
3. Predikat Wajar Tanpa Pengecualian untuk Laporan Keuangan 5 Tahun Berturut-Turut (Tahun 2015,2016,2017,2018 dan 2019) oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
4. Peringkat Ke-6 Innovative Government Award yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
5. Kabupaten Peduli Hak Asasi Manusia 4 Kali berturut-turut (Tahun 2015-2018) oleh Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.



Dalam melaksanakan pelayanan publik, Pemerintah Kabupaten senantiasa dituntut untuk melaksanakan pelayanan dengan efektif dan efisien. Untuk mengukur tingkat efisiensi pencapaian sasaran, dapat dilakukan dengan melakukan Analisis Efisiensi. Analisis efisiensi difokuskan pada indikator input dan output dari suatu kegiatan. Dalam hal ini, diukur dari kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan input yang lebih sedikit dalam menghasilkan output yang sama/atau lebih besar, atau persentase capaian output sama tinggi daripada persentase capaian input. Efisiensi suatu kegiatan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE). Dibawah ini disajikan analisis tingkat efisiensi sasaran Terwujudnya Birokrasi yang Profesional, Responsif, Transparan, Santun dan Inovatif.

Tabel 3.24
Tingkat Efisiensi
Terwujudnya Birokrasi yang Profesional, Responsif, Transparan, Santun dan Inovatif
Tahun 2020

Indikator Kinerja	Target Capaian Sasaran (%)	Target Capaian Keuangan (%)	Standar Efisiensi	Realisasi Capaian Sasaran (%)	Realisasi Capaian Keuangan (%)	Indeks Efisiensi	Tingkat Efisiensi	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Indek Reformasi Birokrasi	100	100	1.00	103.30	84	1.24	0.24	Efisien
Rata-Rata	100	100	1.00	103.30	84	1.24	0.24	Efisien

Sumber : data diolah

Dari hasil analisis dapat diketahui bahwa pada tahun 2020, tingkat efisiensi sasaran Terwujudnya Birokrasi Yang Profesional, Responsif, Transparan, Santun Dan Inovatif adalah sebesar 0,24 dimana indeks efisiensi lebih tinggi dari standar efisiensi. Pada tahun 2020 sasaran Terwujudnya Birokrasi Yang Profesional, Responsif, Transparan, Santun Dan Inovatif dicapai dengan efisien. Sasaran Terwujudnya Birokrasi Yang Profesional, Responsif, Transparan, Santun Dan Inovatif didukung dengan program pendukung sebagaimana tabel dibawah ini.



Pemerintah Kabupaten Klungkung
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2020

Tabel 3.25.
Efisiensi Anggaran
Terwujudnya Birokrasi yang Profesional, Responsif, Transparan, Santun dan Inovatif
Tahun 2020

Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Efisiensi (Rp)	Capaian (%)	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Program Pengembangan Otonomi Daerah	234,933,552.00	202,863,552.00	32,070,000.00	86.35	Bagian Pemerintahan
Program Pengembangan Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat	2,171,799,904.00	1,893,915,504.00	277,884,400.00	87.20	Bagian Kesejahteraan Rakyat
Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	11,366,920,203.00	7,917,522,136.00	3,449,398,067.00	69.65	Bagian Umum
Program Penyediaan Data/Informasi Perkembangan Ekonomi Daerah	98,543,704.00	98,344,704.00	199,000.00	99.80	Bagian Perekonomian
Program Penataan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	396,283,006.00	385,887,583.00	10,395,423.00	97.38	Bagian APBJ
Program Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	408,992,968.00	367,615,000.00	41,377,968.00	89.88	Bagian Organisasi
Program Peningkatan dan Pengembangan Kinerja SKPD	783,951,508.00	723,218,908.00	60,732,600.00	92.25	DPRD
Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	21,905,462,554.00	19,773,634,769.00	2,131,827,785.00	90.27	DPRD
Program Pelayanan Kedinasan Pimpinan dan Anggota DPRD	222,455,772.00	222,455,772.00	0.00	100.00	DPRD
Program Peningkatan Kinerja DPRD	1,586,131,564.00	912,732,314.00	673,399,250.00	57.54	DPRD
Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan	780,617,000.00	748,094,172.00	32,522,828.00	95.83	Kecamatan
Program Peningkatan Layanan Publik di Kecamatan	52,094,700.00	49,033,700.00	3,061,000.00	94.12	Kecamatan
Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	436,817,100.00	429,125,000.00	7,692,100.00	98.24	Kecamatan
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Tingkat Kelurahan Semarapura Kaja	625,784,586.87	623,091,180.00	2,693,406.87	99.57	Kel. Semarapura Kaja
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Tingkat Kelurahan semarapura Kangin	653,115,392.00	595,153,967.00	57,961,425.00	91.13	Kel. Semarapura Kangin
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Tingkat	639,325,851.71	614,060,642.00	25,265,209.71	96.05	Kel. Semarapura Kauh



Pemerintah Kabupaten Klungkung
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2020

Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Efisiensi (Rp)	Capaian (%)	Ket
Kelurahan Semarang Kauh					
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Tingkat Kelurahan Semarang Tengah	596,814,860.69	534,821,227.00	61,993,633.69	89.61	Kel. Semarang Tengah
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Tingkat Kelurahan Semarang Klod	639,842,192.88	613,962,695.00	25,879,497.88	95.96	Kel. Semarang Klod
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Tingkat Kelurahan Semarang Klod Kangin	652,848,658.00	592,743,937.00	60,104,721.00	90.79	Kel. Semarang Klod Kangin
Program Peningkatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Desa	720,775,451.82	710,907,352.00	9,868,099.82	98.63	Inspektorat
Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	69,928,152.00	58,241,752.00	11,686,400.00	83.29	Inspektorat
Program Peningkatan Pelembagaan Pemerintah yang Bersih	92,723,452.00	84,912,652.00	7,810,800.00	91.58	Inspektorat
Program Perencanaan Sosial dan Budaya	26,291,504.00	17,975,500.00	8,316,004.00	68.37	Baperlitbang
Program Perencanaan Perekonomian, Sumber Daya Alam, Penataan Ruang dan Infrastruktur	228,636,213.00	200,985,543.00	27,650,670.00	87.91	Baperlitbang
Program Pengembangan Program Pembangunan Daerah	192,427,114.00	190,668,114.00	1,759,000.00	99.09	Baperlitbang
Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	526,326,400.00	500,162,900.00	26,163,500.00	95.03	Baperlitbang
Program Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	580,887,502.00	533,637,164.00	47,250,338.00	91.87	Badan pengelolaan Keuangan
Program Peningkatan Kapasitas Perbendaharaan Daerah	141,421,500.00	137,812,000.00	3,609,500.00	97.45	Badan pengelolaan Keuangan
Program Pengelolaan PBB-P2 dan BPHTB	495,985,342.00	463,554,518.00	32,430,824.00	93.46	Badan pengelolaan Keuangan
Program Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Lainnya	669,773,518.00	632,634,000.00	37,139,518.00	94.45	Badan pengelolaan Keuangan
Program Peningkatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	337,489,088.00	333,373,752.00	4,115,336.00	98.78	Badan pengelolaan Keuangan
Program Penyusunan Pertanggungjawaban APBD	330,200,114.00	302,599,347.00	27,600,767.00	91.64	Badan pengelolaan Keuangan



Pemerintah Kabupaten Klungkung
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2020

Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Efisiensi (Rp)	Capaian (%)	Ket
Program Peningkatan Prestasi Kerja dan Penghargaan Bagi Aparatur Sipil Negara	18,019,500.00	14,150,000.00	3,869,500.00	78.53	Badan Kepegawaian
Program Pembinaan Aparatur Sipil Negara	204,059,000.00	191,122,000.00	12,937,000.00	93.66	Badan Kepegawaian
Program Pengadaan dan Pengembangan Aparatur Sipil Negara	799,776,700.00	519,797,192.00	279,979,508.00	64.99	Badan Kepegawaian
Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	852,358,759.00	347,707,200.00	504,651,559.00	40.79	Badan Kepegawaian
Program Penelitian dan Pengkajian untuk Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan	733,991,500.00	731,951,165.00	2,040,335.00	99.72	Baperlitbang
Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah	1,926,500.00	1,926,500.00	0.00	100.00	Dinas Kominfo
Program Penyelenggaraan Kearsipan	41,469,300.00	41,469,300.00	0.00	100.00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Program Penyelenggaraan dan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	54,822,600.00	52,811,741.00	2,010,859.00	96.33	Dinas Kominfo
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	2,696,841,912.00	1,691,278,721.00	1,005,563,191.00	62.71	Dinas Kominfo
Program Kerjasama Informasi Dengan Mass Media	252,259,858.00	248,863,358.00	3,396,500.00	98.65	Dinas Kominfo
Program Penataan Administrasi Kependudukan	371,922,200.00	362,022,200.00	9,900,000.00	97.34	Disdukcapil
Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk	700,510,000.00	696,671,500.00	3,838,500.00	99.45	Disdukcapil
Program Pelayanan Pencatatan Sipil	331,085,000.00	293,901,000.00	37,184,000.00	88.77	Disdukcapil
Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	886,067,062.00	775,713,387.00	110,353,675.00	87.55	Bagian Hukum dan HAM
Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	210,846,504.00	76,778,604.00	134,067,900.00	36.41	Dinas DLHP
Jumlah	56,821,556,822.97	47,511,905,224.00	9,309,651,598.97	83.62	

Sumber : SIMDA Keuangan, 2021

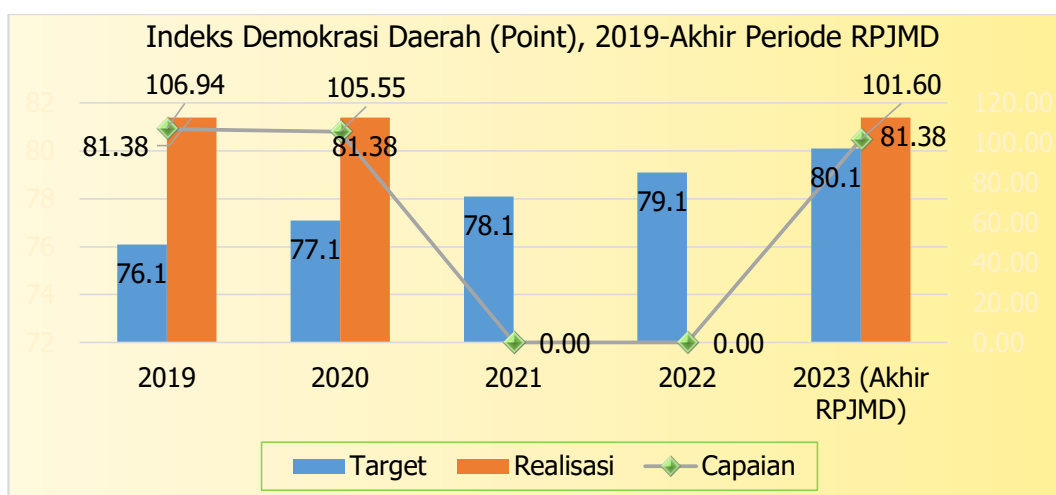
Pada tahun 2020, Sasaran Terwujudnya Birokrasi yang Profesional, Responsif, Transparan, Santun Dan Inovatif didukung dengan 47 program pendukung dengan pagu anggaran perubahan sebesar Rp. 56,821,556,822.97 dan terealisasi sebesar Rp. 47,511,905,224.00 dan sisa anggaran sebesar Rp.



9,309,651,598.97 atau terealisasi sebesar 83,62 persen. Sasaran ini didukung oleh Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, seluruh Kecamatan di Kabupaten Klungkung, Inspektorat Daerah, Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan.

Sasaran 6 **Terwujudnya Ketaatan Masyarakat Terhadap Peraturan Perundangan**

Pemerintah pada dasarnya dibentuk untuk melayani masyarakat, terutama untuk memenuhi kebutuhan dasarnya (*basic need*). Secara umum kebutuhan dasar masyarakat meliputi pendidikan, kesehatan, daya beli serta fasilitas umum. Dalam perkembangan selanjutnya, setelah terjadinya banyak gangguan keamanan di berbagai tempat, timbul wacana agar keamanan juga dimasukkan ke dalam kategori kebutuhan dasar masyarakat. Setiap anggota masyarakat membutuhkan rasa aman. Keamanan secara umum dapat didefinisikan sebagai suatu situasi dan kondisi fisik yang teratur, tertib sesuai norma–norma yang berlaku, keamanan berkaitan erat dengan ketertiban. Ketertiban adalah keadaan yang sesuai dengan hukum, norma-norma serta kesepakatan bersama. Ketertiban lebih dekat dengan upaya penegakan hukum dan pemenuhan norma-norma. Pentingnya pemenuhan terhadap kebutuhan akan rasa aman di masyarakat mendorong Pemerintah Kabupaten Klungkung untuk menetapkan sasaran Terwujudnya Ketaatan Masyarakat Terhadap Peraturan Perundangan yang diukur dengan Indeks Demokrasi Daerah. Capaian kinerja Indeks Demokrasi Daerah disajikan sebagai berikut:



Sumber: Statistik Indonesia 2019,2020 *Realisasi adalah Angka Provinsi Bali

Gambar 3.33 Indeks Demokrasi Daerah Kab. Klungkung, 2020

Indeks Demokrasi Daerah adalah indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia. Tingkat capaiannya diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan tiga aspek demokrasi, yaitu Kebebasan Sipil (*Civil Liberty*), Hak-Hak Politik (*Political Rights*), dan Lembaga Demokrasi (*Institution of Democracy*). Pada maret tahun 2021, Indeks Demokrasi Daerah tahun 2020 belum dirilis, sehingga angka yang digunakan adalah Indeks Demokrasi Daerah tahun 2019 yang merupakan update terakhir dari Badan Pusat Statistik Republik Indonesia. Capaian kinerja Indeks Demokrasi Daerah pada tahun 2020 tercapai sebesar 105,55 persen. Pada tahun 2020, Indeks Demokrasi Daerah ditargetkan sebesar 77,1 point dan terealisasi sebesar 81,38 point. Dibandingkan dengan target RPJMD, capaian kinerja indeks demokrasi daerah telah terealisasi sebesar 101,60 persen. Untuk mengetahui secara rinci komponen pembentuk Indeks Demokrasi Daerah Provinsi Bali dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

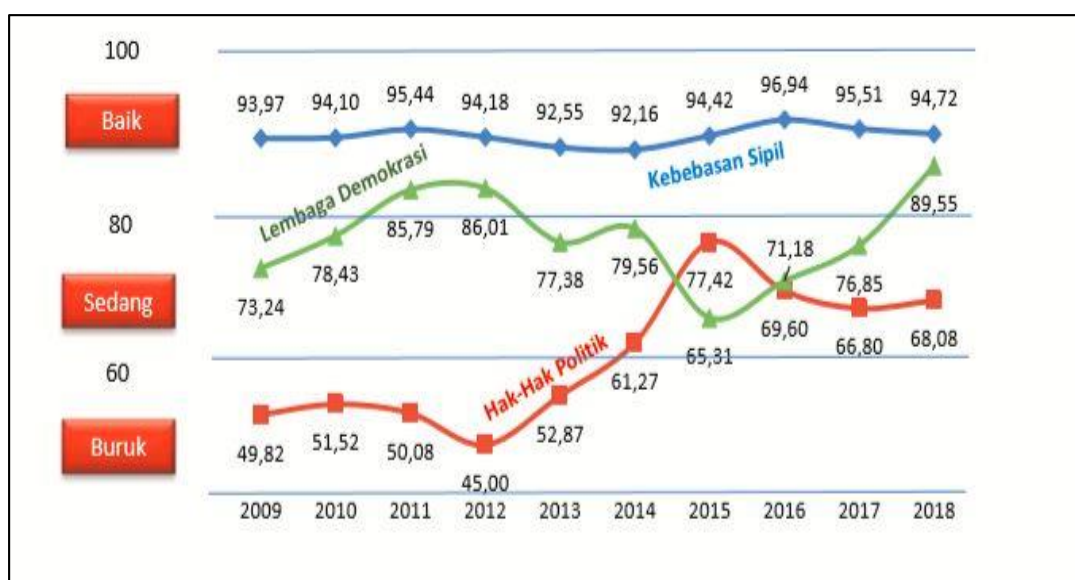
Tabel 3.26.
 Komponen Pembentuk Indeks Demokrasi Daerah Provinsi Bali, 2019

No	Komponen Indeks	Nilai (2018)	Nilai (2019)
1	Kebebasan Sipil (<i>Civil Liberty</i>)	94,72	90,60
2	Hak-Hak Politik (<i>Political Rights</i>)	68,08	68,38
3	Lembaga Demokrasi (<i>Institution of Democracy</i>)	89,55	90,42

Sumber: Statistik Indonesia 2021, Penyediaan Data Perencanaan Pembangunan



Capaian kinerja demokrasi Bali pada tahun 2019 berada pada kategori "Baik". Penurunan IDI 2019 dipengaruhi oleh penurunan aspek Kebebasan Sipil dari 94,72 menjadi 90,60. Sementara aspek kebebasan hak politik meningkat tidak signifikan dari 68,08 menjadi 68,38. Aspek lembaga demokrasi juga mengalami peningkatan dari 89,55 menjadi 90,42. Sepanjang tahun 2009 hingga 2018, tingkat demokrasi di Bali mengalami dinamika. Pada periode tahun 2009 – 2018, angka IDI tercatat berfluktuasi di kisaran angka terendah 70,35 pada tahun 2009 dan tertinggi tercatat sebesar 82,37 pada tahun 2018.



Sumber: BPS Provinsi Bali, 2020

Gambar 3.34 Indeks Demokrasi Provinsi Bali, 2009-2018

IDI Bali 2018 tercatat sebesar 82,37, menunjukkan bahwa demokrasi Bali berada pada kategori "baik". Nilai ini mengalami peningkatan sebesar 3,57 poin dibandingkan IDI Bali 2017 tercatat sebesar 78,80. Peningkatan nilai IDI 2018 dipengaruhi oleh peningkatan aspek Hak-hak Politik tercatat sebesar 1,28 poin (dari 66,80 menjadi 68,08) serta kenaikan aspek Lembaga Demokrasi tercatat sebesar 12,70 poin (dari 76,85 menjadi 89,55). Sementara itu, aspek Kebebasan Sipil tercatat mengalami penurunan sebesar -0,79 poin (dari 95,51 menjadi 94,72).

Menurut variabel penyusunnya, pada periode 2017-2018 tercatat lima variabel mengalami peningkatan, satu variabel mengalami penurunan, serta lima variabel lainnya tidak mengalami perubahan atau stagnan. Variabel yang tercatat mengalami peningkatan tertinggi yaitu variabel Peran Partai Politik yang meningkat sebesar



64,29 poin. Sementara itu, variabel yang mengalami penurunan yaitu variabel Kebebasan Berkumpul dan Berserikat yang tercatat turun sebesar -32,81 poin.

Untuk dapat memperoleh gambaran mengenai capaian kinerja Indeks Demokrasi Daerah secara nasional dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 3.27
 Indeks Demokrasi Seluruh Provinsi di Indonesia dan Nasional, 2011-2019

Provinsi Province	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Aceh	54,02	63,56	72,29	67,78	72,48	70,93	79,97	78,00
Sumatera Utara	58,51	58,80	68,02	69,01	67,37	68,08	64,33	67,65
Sumatera Barat	60,82	54,11	63,99	67,46	54,41	69,50	67,06	67,69
Riau	67,00	68,37	68,40	65,83	71,89	73,41	77,59	75,21
Jambi	68,81	64,41	71,15	70,68	68,89	74,12	68,71	69,76
Sumatera Selatan	73,17	67,12	74,82	79,81	80,95	74,04	77,14	78,96
Bengkulu	61,70	59,17	71,70	73,60	74,23	72,73	70,71	78,79
Lampung	72,26	63,13	71,62	65,95	61,00	72,01	68,67	72,56
Kepulauan Bangka Belitung	69,37	68,79	75,32	72,31	83,00	80,11	73,43	76,75
Kepulauan Riau	65,61	66,50	68,39	70,26	72,84	76,33	79,19	81,64
DKI Jakarta	77,72	71,18	84,70	85,32	70,85	84,73	85,08	88,29
Jawa Barat	57,05	65,18	71,52	73,04	66,82	68,78	65,50	69,09
Jawa Tengah	63,79	60,84	77,44	69,75	66,71	70,85	72,17	77,22
DI Yogyakarta	72,96	72,36	82,71	83,19	85,58	83,61	80,82	80,67
Jawa Timur	54,99	59,32	70,36	76,90	72,24	70,92	72,86	77,68
Banten	65,29	69,79	75,50	68,46	71,36	73,72	73,78	72,60
Bali	71,75	72,22	76,13	79,83	78,95	78,80	82,37	81,38
Nusa Tenggara Barat	57,97	57,22	62,62	65,08	65,41	76,04	73,63	76,64
Nusa Tenggara Timur	72,67	73,29	68,81	78,47	82,49	75,51	82,32	81,02
Kalimantan Barat	65,38	67,52	80,58	76,40	75,28	79,13	76,14	77,66
Kalimantan Tengah	65,78	64,15	79,00	73,46	74,77	76,12	71,27	81,16
Kalimantan Selatan	61,13	63,71	70,84	74,76	73,43	76,25	79,92	79,47
Kalimantan Timur	71,23	68,13	77,77	81,24	73,64	72,86	73,88	77,67
Kalimantan Utara ¹	—	—	—	80,16	76,98	81,06	81,07	83,45
Sulawesi Utara	76,50	73,11	83,94	79,40	76,34	75,76	77,77	77,08
Sulawesi Tengah	64,97	64,50	74,36	76,67	72,20	69,79	75,29	77,27
Sulawesi Selatan	68,55	65,20	75,30	67,90	68,53	70,79	70,88	70,58
Sulawesi Tenggara	57,26	52,61	70,13	69,44	71,13	68,51	74,32	65,21
Gorontalo	59,37	67,21	73,82	76,77	77,48	73,92	72,59	76,29
Sulawesi Barat	63,65	64,02	76,69	68,25	72,37	67,74	71,46	77,42
Maluku	59,68	66,23	72,72	65,90	78,20	77,45	75,51	68,22
Maluku Utara	66,83	64,06	67,90	61,52	73,27	70,73	72,10	69,89
Papua Barat	65,70	60,70	65,65	59,97	60,35	62,76	58,29	57,62
Papua	60,71	60,92	62,15	57,55	61,02	61,34	62,20	65,25
Indonesia	62,63	63,72	73,04	72,82	70,09	72,11	72,39	74,92

Sumber: Statistik Indonesia 2021, Penyediaan Data Perencanaan Pembangunan

Catatan : Indeks Demokrasi Indonesia merupakan agregat tertimbang dari Indeks Demokrasi di tingkat provinsi



Pada tahun 2019, provinsi Bali mencapai indeks Demokrasi Daerah sebesar 81,38 yang berada diatas rata-rata indeks demokrasi daerah seluruh provinsi di Indonesia/angka nasional yang sebesar 74,82. Capaian dari masing-masing komponen Indeks Demokrasi Daerah yang telah dilakukan oleh Kabupaten Klungkung adalah sebagai berikut :

Kebebasan Sipil (*Civil Liberty*)

Kebebasan sipil dapat diartikan menjadi bebasnya warga memperoleh semua hak-hak sipilnya dan diharapkan dapat menciptakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Untuk menjamin kebebasan sipil yang seluasnya bagi masyarakat, Pemerintah Kabupaten Klungkung melakukan pengendalian atas potensi konflik yang terjadi di wilayah Pemerintah Kabupaten Klungkung. Hal tersebut dilakukan dalam rangka menjaga hak-hak kebebasan sipil masyarakat tetap terpenuhi. Untuk mengetahui sebaran konflik yang ada di Kabupaten Klungkung berdasarkan kecamatan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 3.28
Potensi Konflik Berdasarkan Kecamatan di Kab.Klungkung

Kecamatan	2016	2017	2018	2019	2020
Klungkung	14	11	9	6	4
Banjarangkan	7	7	6	5	4
Dawan	8	7	6	5	4
Nusa Penida	8	7	6	6	6
Jumlah	37	32	27	22	18

Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Klungkung, 2021

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa pada tahun 2017 terdapat 32 potensi konflik di Kabupaten Klungkung dan pada tahun 2018 telah dapat terselesaikan 5 potensi konflik, sehingga sisa potensi konflik di tahun 2018 sebanyak 27 potensi konflik. Pada tahun 2020, telah diselesaikan 10 potensi konflik dengan rincian 4 di kecamatan Klungkung, 2 di Kecamatan Banjarangkan, 1 di Kecamatan Dawan dan 3 di Kecamatan Nusa Penida. Namun demikian, pada tahun 2020 telah muncul 6



potensi konflik sosial baru. Dalam usaha mencapai sasaran Menurunkan Potensi Konflik, Pemerintah Kabupaten Klungkung menemui kendala sebagai berikut:

1. Konflik sosial berkaitan erat dengan fenomena sosial yang terjadi pada tahun 2020 yang berpengaruh terhadap dunia termasuk Kabupaten Klungkung. Pandemi covid-19 memungkinkan munculnya potensi konflik sosial di masyarakat yang memerlukan penanganan semua pihak.
2. Kondisi geografis Kabupaten Klungkung yang terdiri dari kepulauan dengan kurang lebih 13 pelabuhan laut tradisional yang minim pengawasan dapat menjadi suatu kelemahan bagi Kabupaten Klungkung. Banyaknya alternative pelabuhan laut tradisional menjadi rawan penyelundupan dan penggelapan baik itu orang, narkoba, barang import dan berbagai kejahatan lainnya.
3. Masyarakat yang multi ras merupakan suatu tantangan tersendiri, dimana sangat rentan akan konflik antar umat beragama.
4. Didalam Lembaga adat sendiri, yang selama ini menjadi andalan dalam penyelesaian persoalan sosial di tingkat terbawah justru menjadi salah satu sumber pemicu konflik disebabkan perebutan hak tanah bahkan pura.

Upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Klungkung dalam mencapai sasaran Menurunkan Potensi Konflik, adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan peranan aparat keamanan, pemerintah kecamatan dan pemerintah desa, Majelis Madya Desa Pekraman, Majelis Alit Desa Pekraman dan Desa Pekraman, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), serta Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Kabupaten Klungkung dan Tim Terpadu Pemetaan Daerah Rawan Konflik Sosial kabupaten Klungkung dalam ikut menekan tumbuhnya potensi konflik.
2. Meningkatkan peranan masyarakat dalam memelihara situasi yang kondusif di lingkungan sekitarnya dengan memberikan sosialisasi pencegahan potensi konflik dan kegiatan monitoring lain yang langsung bersentuhan dengan masyarakat.
3. Melakukan fasilitasi penyelesaian konflik dengan menguatkan peranan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Kabupaten Klungkung yang dikendalikan langsung oleh Bupati Klungkung.

Terciptanya Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat akan menimbulkan terwujudnya suatu kepatuhan masyarakat terhadap penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah



sehingga akan dapat memberi dampak pada kelancaran pelaksanaan pembangunan daerah. Pelanggaran Peraturan dapat menjadi salah satu indikator ketaatan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan. Adapun jenis pelanggaran perda pada tahun 2015-2020 adalah sebagaimana dalam tabel di bawah inii

Tabel 3.29
Rincian Jumlah Pelanggaran Perda di Kabupaten Klungkung Tahun 2015-2020

No	Jenis Pelanggaran Perda	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Penduduk Pendetang (Perda No. 2 Tahun 2011)	250	511	261	479	7	50
2	IMB (Perda No. 4 Tahun 1974)	46	23	13	0	0	3
3	Ketertiban Umum / KTU (Perda No. 2 Tahun 2014)	518	498	187	52	73	179
4	Kawasan tanpa Rokok/ KTR (Perda No. 1 Tahun 2014)	7	3	0	0	0	0
5	Pengendalian Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan Hidup (Perda No. 2 Tahun 2010)	18	2	0	0	0	0
6	Pengelolaan Sampah (Perda No. 7 Tahun 2014)	-	-	-	-	3	0
	Jumlah	839	1.037	461	531	83	232

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kab. Klungkung, 2021

Pada tahun 2020 terdapat 232 pelanggaran Peraturan Daerah di Kabupaten Klungkung, yang terdiri atas 50 pelanggaran Perda Penduduk Pendetang, 3 Pelanggaran Perda Ijin Mendirikan Bangunan dan 179 Pelanggaran Perda Ketertiban Umum. Selain pelanggaran terhadap peraturan daerah, gangguan keamanan dapat menjadi indikator lain dari adanya penanganan terhadap kebebasan sipil. Perkataan aman dalam pemahaman tersebut mengandung 4 (empat) pengertian dasar, yaitu: Security yaitu perasaan bebas dari gangguan fisik dan psikis; Surety yaitu perasaan bebas dari kekhawatiran; Safety yaitu perasaan terlindung dari segala bahaya; dan Peace yaitu perasaan damai lahiriah dan batiniah. Gangguan keamanan yang terjadi di Kabupaten Klungkung disajikan sebagai berikut:



Tabel 3.30
Angka Gangguan Kamtibmas (Kasus) Per Kecamatan Tahun 2019-2020

No	Kecamatan	2019	2020	Keterangan
1	Nusa Penida	4	1	Data ini didapat dari Rekapitulasi Angka Gangguan yang didapat selama 1 Tahun di Bidang Linmas
2	Banjarangkan	0	0	
3	Klungkung	12	5	
4	Dawan	1	0	
	Jumlah	17	6	

Sumber : Satpol PP dan PMK Kab. Klungkung, 2021

Untuk meningkatkan ketaatan masyarakat terhadap peraturan perundangan, Pemerintah Kabupaten Klungkung melakukan upaya-upaya sebagai berikut:

1. Meningkatkan intensitas pendataan penduduk pendatang terutama rumah-rumah kost dengan melibatkan seluruh komponen keamanan seperti kepolisian, TNI, satpol PP, satuan Linmas, Pecalang, Kepala Lingkungan dan Tokoh Masyarakat.
2. Meningkatkan kapasitas Satuan Linmas dan Pecalang sebagai garda terbawah penjagaan keamanan lingkungan dengan memberikan pelatihan-pelatihan tanggap keamanan lingkungan.
3. Melaksanakan inspeksi mendadak untuk memantau kondisi keamanan wilayah.

Dalam menjaga kebebasan hak-hak sipil masyarakat, Pemerintah Kabupaten Klungkung mengalami kendala-kendala sebagai berikut:

1. Banyaknya penduduk pendatang yang hampir masuk ke semua wilayah Desa di Kabupaten Klungkung yang tidak memiliki Skill dan tujuan yang jelas akan dapat menimbulkan berbagai permasalahan.
2. Maraknya peredaran narkoba yang tidak saja terjadi di kota bahkan sudah sampai ke desa-desa sampai menyasar anak-anak sekolah.

Hak-Hak Politik (*Political Rights*)

Terpenuhinya hak-hak politik masyarakat merupakan salah satu indikator yang bisa menunjukkan kebebasan berdemokrasi. Suksesnya penyelenggaraan pemilihan umum dapat menjadi suatu indikator terpenuhinya hak-hak politik masyarakat. Penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2019 dapat menunjukkan



kondisi pemenuhan hak-hak politik di Kabupaten Klungkung. Dibawah ini disajikan data perolehan Perolehan Suara Sah Partai Politik Hasil Pemilu Legislatif 2019 Untuk DPRD Tingkat I di Kabupaten Klungkung.

Tabel 3.31
Perolehan Suara Sah Partai Politik Hasil Pemilu Legislatif 2019 untuk DPRD Tingkat I di Kabupaten Klungkung

Partai	Kab. Klungkung
Partai Kebangkitan Bangsa	1.125
Partai Gerindra	16.543
PDI Perjuangan	50.247
Partai Golkar	14.668
Partai Nasdem	3.466
Partai Garuda	1.212
Partai Berkarya	1.769
Partai Keadilan Sejahtera	600
Partai Perindo	1.498
Partai Persatuan Pembangunan	751
Partai Solidaritas Indonesia	1.694
Partai Amanat Nasional	678
Partai Hati Nurani Rakyat	2.984
Partai Demokrat	13.648
Partai Bulan Bintang	60
PKPI	1.206
Total	112.149

Sumber: Provinsi Bali Dalam Angka,2020

Dari data diatas dapat diketahui bahwa PDI Perjuangan, Partai Gerindra dan Partai Golkar merupakan tiga partai yang memperoleh suara terbanyak untuk Perolehan Suara Sah Partai Politik Hasil Pemilu Legislatif 2019 Untuk DPRD Tingkat I di Kabupaten Klungkung. Sementara untuk hasil pemilihan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Provinsi Bali Tahun 2018 pengguna hak pilih disajikan sebagai berikut:



Tabel 3.32
 Hasil Pemilihan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Provinsi Bali Tahun 2018 di
 Kabupaten Klungkung

Keterangan	Jumlah Suara
Jumlah Suara Untuk Nomor Urut 1*	39.653
Jumlah Suara Untuk Nomor Urut 2**	81.232
Suara Tidak Sah	4.279
Jumlah	125.164

Sumber: Provinsi Bali Dalam Angka 2020

Nomor Urut 1* : Dr. Ir. Wayan Koster, M.M

Dr. Ir. Tjok Oka Artha Ardhana Sukawati, M.Si

Nomor Urut 2* : Ida Bagus Rai Dharmawijaya Mantra, S.E, M.Si

Drs. I Ketut Sudikerta

Dari data diketahui bahwa pada pemilihan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Provinsi Bali Tahun 2018, di Kabupaten Klungkung pasangan Nomor urut 1 memperoleh 39.653 suara dan pasangan nomor urut 2 memperoleh 81.232 suara dengan 4.279 suara tidak sah.

Tabel 3.33
 Jumlah Perolehan Suara Pada Pemilihan Presiden Tahun 2019

Kabupaten/Kota	Jumlah Suara Untuk No Urut 1*	Jumlah Suara Untuk No Urut 2*	Suara Tidak Sah	Jumlah
Jembrana	153.126	33.829	3.628	190.583
Tabanan	302.441	18.013	5.413	325.867
Badung	312.813	23.357	4.389	340.559
Gianyar	318.536	12.627	5.135	336.298
Klungkung	118.237	10.486	4.485	133.208
Bangli	149.453	8.938	5.622	164.013
Karangasem	274.861	20.549	9.574	304.984
Buleleng	383.571	46.161	10.055	439.787
Denpasar	338.019	39.455	4.037	381.511
Jumlah	2.351.057	213.415	52.338	2.616.810

Sumber: Provinsi Bali Dalam Angka 2020

Nomor Urut 1* : Ir. H.Joko Widodo

Prof. Dr. (HC) KH. Ma'ruf Amin

Nomor Urut 2* : H. Prabowo Subianto

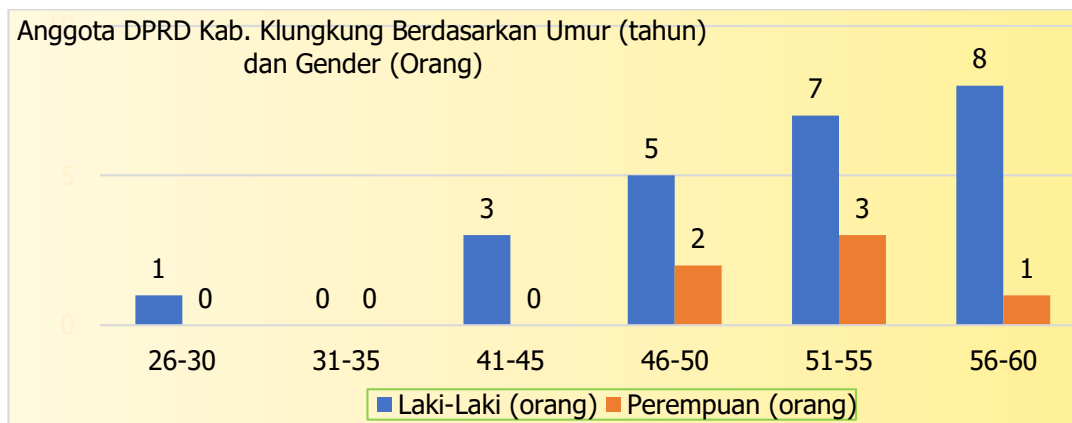
H. sandiaga Salahuddin Uno

Dari data diatas dapat diketahui bahwa di Kabupaten Klungkung jumlah pemilih nomor urut satu sebanyak 118.237 suara dan nomor urut 2 sebanyak 10.486 suara dengan 4.485 suara tidak sah



Lembaga Demokrasi (*Institution of Democracy*)

Kebebasan lembaga demokrasi merupakan salah satu komponen pembentuk Indeks Demokrasi Daerah. Untuk melihat capaian kinerja pada kebebasan lembaga demokrasi ini diantaranya dapat dilihat dari gambar di bawah ini :



Sumber: Sekretariat DPRD Kab. Klungkung, 2021

Gambar 3.35 Anggota DPRD Kabupaten Klungkung Berdasarkan Umur dan Gender

Berdasarkan hasil pemilihan anggota DPRD Kabupaten Klungkung Tahun 2019, Anggota DPRD Kabupaten Klungkung berjumlah 30 orang dengan 24 orang laki-laki dan 6 orang perempuan. Jika dilihat dari umur, terdapat 1 orang anggota DPRD dengan umur 26-30 tahun, 3 orang anggota DPRD dengan umur 41-45 tahun, 7 orang anggota DPRD dengan umur 46-50 tahun, 10 orang anggota DPRD dengan umur 51-55 tahun dan 9 orang anggota DPRD dengan umur 56-60 tahun. Hal tersebut dapat menunjukkan kinerja kaderisasi di partai politik peserta pemilu. Kaderisasi merupakan salah satu komponen penilaian kinerja lembaga demokrasi dalam penghitungan Indeks Demokrasi Daerah. Selain kaderisasi, peran serta perempuan juga merupakan salah satu komponen penilaian kinerja lembaga demokrasi. Untuk melihat kinerja lembaga demokrasi dapat dilihat dari jumlah peraturan daerah yang dikeluarkan. Di bawah ini diuraikan peraturan daerah yang disepakati bersama DPRD Kabupaten Klungkung

Tabel 3.34
 Peraturan Daerah Yang Disepakati Antara Eksekutif dan DPRD Kab. Klungkung Tahun 2020

No	Perda Nomor	Tanggal	Tentang
1.	Nomor 1 Tahun 2020	3 Maret 2020	Perubahan Atas Peraturan daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Bea



Pemerintah Kabupaten Klungkung
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2020

			Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan
2.	Nomor 2 Tahun 2020	15 April 2020	Perizinan Usaha Jasa Kontruksi
3.	Nomor 3 Tahun 2019	15 April 2020	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
4.	Nomor 4 Tahun 2019	17 April 2020	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah
5.	Nomor 5 Tahun 2020	16 Juli 2020	Retribusi Pelayanan Kesehatan
6.	Nomor 6 Tahun 2020	26 Agustus 2020	Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019
7.	Nomor 7 Tahun 2020	24 September 2020	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Tahun Anggaran 2020
8.	Nomor 8 Tahun 2020	16 Oktober 2020	Badan Permusyawaratan Desa
9.	Nomor 9 Tahun 2020	23 Desember 2020	Perubahan Atas Peraturan daerah Nomor 3 tahun 2012 tentang Pajak Hiburan

Sumber: Sekretariat DPRD Kab. Klungkung, 2021

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa selama tahun 2020 terdapat sembilan Peraturan Daerah yang telah disepakati antara Pemerintah Kabupaten Klungkung dan DPRD Kabupaten Klungkung.

Dalam melaksanakan pelayanan publik, Pemerintah Kabupaten Klungkung senantiasa dituntut untuk melaksanakan pelayanan dengan efektif dan efisien. Untuk mengukur tingkat efisiensi pencapaian sasaran, dapat dilakukan dengan melakukan Analisis Efisiensi. Analisis efisiensi difokuskan pada indikator input dan output dari suatu kegiatan. Dalam hal ini, diukur dari kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan *input* yang lebih sedikit dalam menghasilkan *output* yang sama/atau lebih besar, atau persentase capaian *output* sama tinggi daripada persentase capaian *input*. Efisiensi suatu kegiatan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE). Dibawah ini disajikan analisis tingkat efisiensi sasaran Terwujudnya Ketaatan Masyarakat Terhadap Peraturan Perundangan sebagai berikut :



Tabel 3.35
Tingkat Efisiensi
Terwujudnya Ketaatan Masyarakat Terhadap Peraturan Perundangan
Tahun 2020

Indikator Kinerja	Target Capaian Sasaran (%)	Target Capaian Keuangan (%)	Standar Efisiensi	Realisasi Capaian Sasaran (%)	Realisasi Capaian Keuangan (%)	Indeks Efisiensi	Tingkat Efisiensi	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Indeks Demokrasi Daerah	100	100	1.00	105.55	97	1.09	0.09	Efisien
Jumlah	100	100	1.00	105.55	97	1.09	0.09	Efisien

Sumber : data diolah

Dari hasil analisis dapat diketahui bahwa pada tahun 2019, tingkat efisiensi sasaran Terwujudnya Ketaatan Masyarakat Terhadap Peraturan Perundangan adalah sebesar 0,09 dimana indeks efisiensi lebih tinggi dari standar efisiensi. Pada tahun 2020 sasaran Terwujudnya Ketaatan Masyarakat Terhadap Peraturan Perundangan dicapai dengan efisien. Sasaran Terwujudnya Ketaatan Masyarakat Terhadap Peraturan Perundangan didukung dengan program pendukung sebagaimana tabel dibawah ini.

Tabel 3.36
Efisiensi Anggaran
Terwujudnya Ketaatan Masyarakat Terhadap Peraturan Perundangan
Tahun 2020

Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Efisiensi (Rp)	Capaian (%)	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Program Pendidikan Politik Masyarakat	39,002,350.00	39,002,350.00	0.00	100.00	Kesbangpol
Program Peningkatan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Masyarakat	46,029,550.00	45,226,400.00	803,150.00	98.26	Kesbangpol
Program Peningkatan Karakter, Ideologi dan Wawasan Kebangsaan	8,201,000.00	8,167,000.00	34,000.00	99.59	Kesbangpol
Program Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik	569,075,000.00	546,800,000.00	22,275,000.00	96.09	Kesbangpol
Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi	51,358,200.00	48,918,200.00	2,440,000.00	95.25	BPBD
Program Penanggulangan Bencana	99,604,000.00	97,786,500.00	1,817,500.00	98.18	BPBD
Program Penanganan Darurat Bencana	708,437,280.00	613,938,238.00	94,499,042.00	86.66	BPBD
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	123,016,156.00	106,040,885.00	16,975,271.00	86.20	Satpol PP



Pemerintah Kabupaten Klungkung
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) TAHUN 2020

Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Efisiensi (Rp)	Capaian (%)	Ket
Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	2,332,254,348.00	2,316,705,177.00	15,549,171.00	99.33	Satpol PP
Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	80,370,004.00	75,045,004.00	5,325,000.00	93.37	Satpol PP
Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	1,368,021,992.00	1,343,777,614.00	24,244,378.00	98.23	Satpol PP
Jumlah	5,425,369,880.00	5,241,407,368.00	183,962,512.00	96.61	

Sumber : SIMda Keuangan, 2021

Pada tahun 2020, Sasaran Terwujudnya Ketaatan Masyarakat Terhadap Peraturan Perundangan didukung dengan 11 program pendukung dengan pagu anggaran perubahan sebesar Rp. 5,425,369,880.00 dan terealisasi sebesar Rp. 5,241,407,368.00 atau terealisasi sebesar 96,61 persen. Sasaran ini didukung oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan seluruh Kecamatan di Kabupaten Klungkung.

DOKUMENTASI PENCAPAIAN SASARAN



Satpol PP Klungkung dalam aksi penegakan Pergub 42/2020 Prokes Covid-19



Satpol PP Klungkung dalam aksi penegakan Pergub 42/2020 Prokes Covid-19



Bupati Klungkung dalam aksi damai gugatan masyarakat terhadap ujaran anggota DPD RI Arya Wedakarna



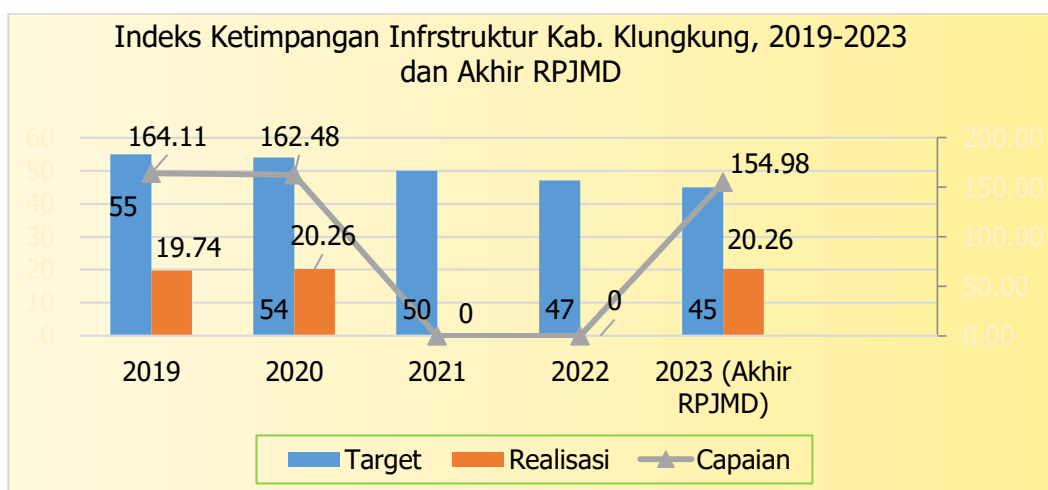
Bupati Klungkung inspeksi mendadak penegakan Protokol Kesehatan di malam hari



Sasaran 7

Mengurangi Ketimpangan Infrastruktur Antar Wilayah

Untuk memastikan seluruh lapisan masyarakat memperoleh pelayanan publik yang baik, Pemerintah Kabupaten Klungkung menetapkan sasaran Mengurangi Ketimpangan Infrastruktur Antar Wilayah yang diukur dengan indikator Indeks Ketimpangan Infrastruktur. Indeks Ketimpangan Infrastruktur merupakan indeks komposit yang memadukan dua indikator kinerja dibidang penyediaan prasarana publik yaitu : Rata-rata jalan rusak dan rusak berat di masing-masing kecamatan dan Persentase Trayek Angkutan Umum Yang Tidak Berfungsi. Rata-rata jalan rusak dan rusak berat di masing-masing kecamatan menyumbang bobot 80% terhadap Indeks Ketimpangan Infrastruktur Kabupaten, sementara Persentase Trayek Angkutan Umum Yang Tidak Berfungsi menyumbang bobot 20% terhadap Indeks Ketimpangan Infrastruktur Kabupaten. Rata-rata jalan rusak dan rusak berat di masing-masing kecamatan merupakan panjang jalan kecamatan dalam kondisi rusak dan rusak berat dibandingkan dengan panjang jalan di masing-masing kecamatan. Sementara Persentase trayek angkutan umum yang tidak berfungsi merupakan perbandingan antara jumlah trayek angkutan umum yang tidak berfungsi dibagi keseluruhan trayek angkutan umum di Kabupaten Klungkung. Capaian target indikator sasaran Mengurangi Ketimpangan Infrastruktur Antar Wilayah tahun 2020 disajikan pada grafik sebagai berikut:



Sumber : data diolah

Gambar 3.35 Indeks Ketimpangan Infrastruktur, 2019-2023 dan Capaian Akhir RPJMD.



Berdasarkan gambar diatas dapat diketahui bahwa capaian indikator Kinerja Indeks Ketimpangan Insfrastruktur di Kabupaten Klungkung pada tahun 2020 telah melewati target yang ditetapkan. Pada tahun 2020, Indeks Ketimpangan Insfrastruktur ditargetkan sebesar 54 poin dan terealisasi sebesar 20,26 atau dengan capaian 162,48 persen. Dibandingkan dengan target RPJMD, capaian akhir periode RPJMD telah tercapai sebesar 154,98 persen. Untuk itu diperlukan usaha-usaha untuk terus mempertahankan bahkan meningkatkan Indeks Ketimpangan Insfrastruktur di Kabupaten Klungkung.

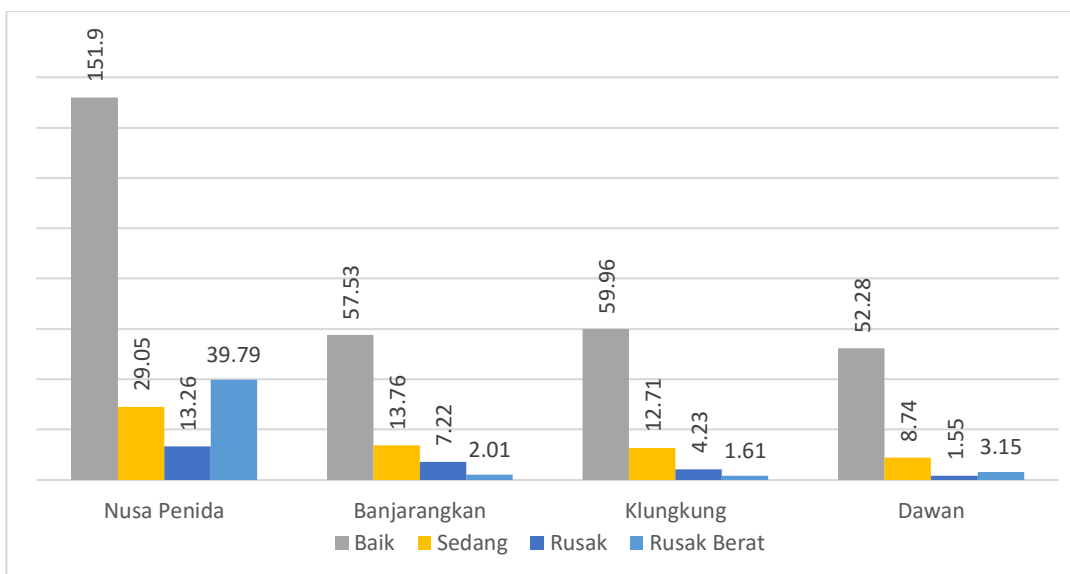
Ada dua komponen utama yang berpengaruh terhadap capaian kinerja pelayanan infrastruktur di Kabupaten Klungkung yaitu Rata-Rata Jalan Rusak dan Rusak Berat di masing-masing kecamatan serta berfungsinya trayek angkutan umum. Untuk mengetahui kinerja pelayanan jalan, kondisi jalan di masing-masing kecamatan ditampilkan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.37
Kondisi Jalan Kab. Klungkung (Km), 2020

NO	Kondisi Jalan	Panjang
1	Baik (Km)	363,02
2	Sedang (Km)	29,238
3	Rusak (Km)	31,192
4	Rusak Berat (Km)	30,354
5	Total (Km)	453,804
6	Rusak +Rusak Berat (Km)	61,546
7	Persentase Rusak + Rusak Berat (%)	13,562

Sumber: Klungkung dalam Angka 2021, Penyediaan data perencanaan pembangunan

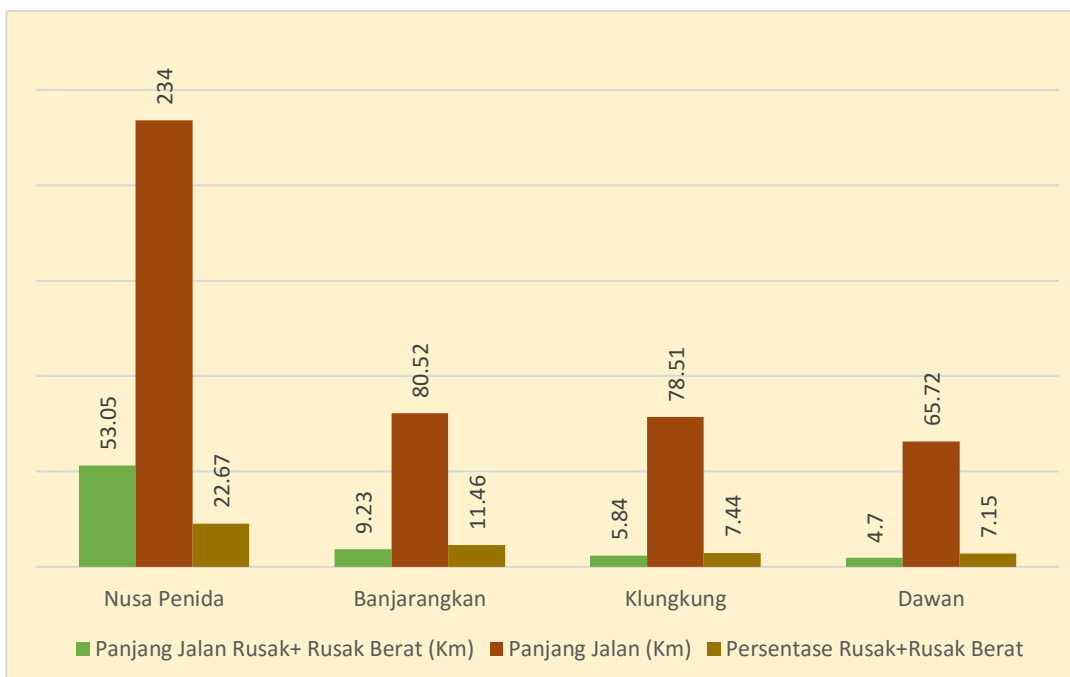
Pada tahun 2020, panjang jalan kewenangan Kabupaten Klungkung sepanjang 453,804 Km dengan kondisi baik sepanjang 363,02 Km, kondisi sedang 29,238 km, kondisi rusak 31,192 km dan kondisi rusak berat sepanjang 30,354 km. Untuk memperoleh perbandingan kinerja penyediaan jalan dalam kondisi baik pada tahun 2019, dapat dilihat pada grafik sebagai berikut :



Sumber : Kabupaten Klungkung Dalam Angka 2019

Gambar 3.36 Kondisi Jalan di masing-masing kecamatan (Km), 2019

Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa di Kecamatan Nusa Penida, jalan baik mencapai 151,9 Km dan merupakan persentase terbesar di Kabupaten Klungkung. Sementara jalan baik terpendek ada di Kecamatan Dawan dengan panjang 52,28 Km. Untuk mengetahui persentase jalan rusak dan rusak berat di masing-masing kecamatan dapat dilihat pada gambar dibawah

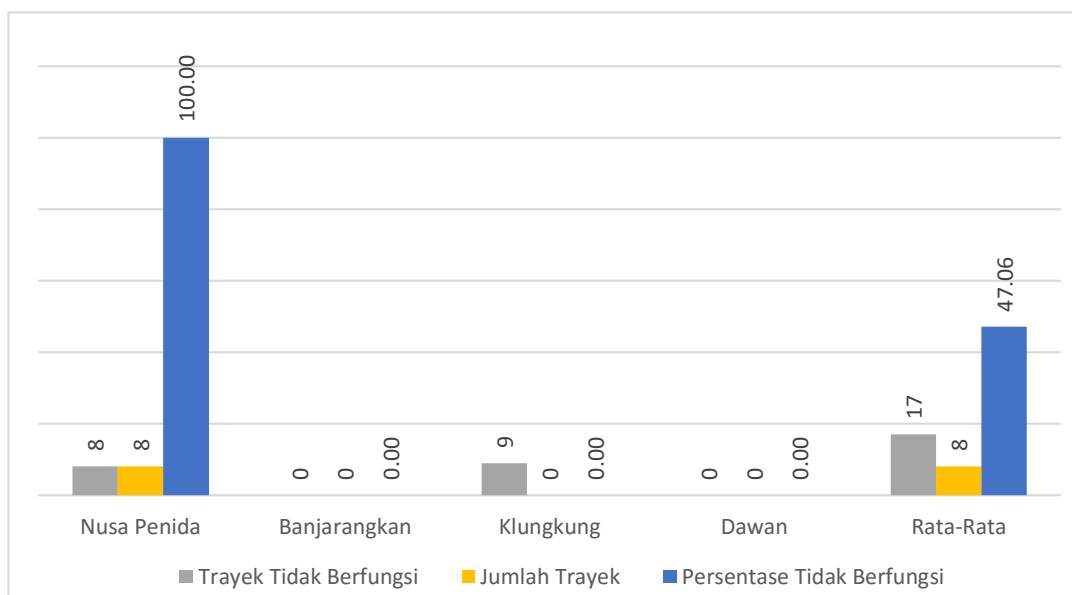


Sumber : Kabupaten Klungkung Dalam Angka 2019



Gambar 3.37 Persentase Jalan Rusak dan Rusak Berat di masing-masing kecamatan (Km), 2019

Kecamatan Nusa Penida sebagai kecamatan dengan luas terbanyak di Kabupaten Klungkung memiliki panjang jalan terpanjang dibandingkan dengan Kecamatan Lain di Kabupaten Klungkung. Seiring dengan kondisi tersebut, Kecamatan Nusa Penida juga memiliki panjang jalan rusak dan rusak berat terbanyak. Kecamatan Dawan memiliki panjang jalan terpendek diantara kecamatan lain di Kabupaten Klungkung. Seiring dengan kondisi tersebut, Kecamatan Dawan juga memiliki persentase jalan rusak dan rusak berat terkecil. Hal tersebut menunjukkan pemerataan penyediaan jalan dalam kondisi baik di setiap kecamatan telah diupayakan. Selain persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap, komponen penentu lain dari Indeks Ketimpangan Infrastruktur adalah persentase trayek angkutan umum yang tidak berfungsi. Dibawah ini ditampilkan grafik



Sumber : Dinas Perhubungan, 2021

Gambar 3.38 Trayek Angkutan Umum Yang Tidak Berfungsi (%), 2020

Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa trayek angkutan umum yang tidak berfungsi mencapai 47,06 persen dari keseluruhan trayek yang ada. Ini menandakan masih terdapat trayek angkutan umum yang belum beroperasi maksimal yaitu sebanyak 8 trayek angkutan umum. Dibawah ini disajikan trayek angkutan umum yang ada di Kabupaten Klungkung sebagai berikut:



Tabel 3.38
Trayek Angkutan Umum di Kabupaten Klungkung, 2020

No	Trayek Angkutan Umum	Wilayah Jaringan Trayek	Status Trayek Angkutan
1	Batununggul-Ped-Toyapakeh PP (Kode B1)	Nusa Penida	Tidak Berfungsi
2	Batununggul-Sakti-Bunga mekar PP (Kode B2)	Nusa Penida	Tidak Berfungsi
3	Batununggul-Kutampi Kaler-Klumpu PP (Kode B3)	Nusa Penida	Tidak Berfungsi
4	Batununggul-Batunadeg PP (Kode S1)	Nusa Penida	Tidak Berfungsi
5	Batununggul-Tanglad-Sekartaji PP (Kode S2)	Nusa Penida	Tidak Berfungsi
6	Batununggul-Kutampi PP (Kode S3)	Nusa Penida	Tidak Berfungsi
7	Batununggul-Batukandik PP (Kode S4)	Nusa Penida	Tidak Berfungsi
8	Batununggul-Suana-Pejukutan PP (Kode T)	Nusa Penida	Tidak Berfungsi
9	Semarapura-Akah-Selat	Klungkung	Berfungsi
10	Semarapura-Besang-Selisihan	Klungkung	Berfungsi
11	Semarapura-Aan-Nyangelan	Klungkung	Berfungsi
12	Semarapura-Banjarangkan-Bungbungan	Klungkung	Berfungsi
13	Semarapura-Takmung-Tegal Besar	Klungkung	Berfungsi
14	Semarapura-Gelgel-Jumpai	Klungkung	Berfungsi
15	Semarapura-Kusamba-Pesinggahan	Klungkung	Berfungsi
16	Semarapura-Dawan-Pikat-Besan	Klungkung	Berfungsi
17	Semarapura-Peninjoan-Paksebali	Klungkung	Berfungsi

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Klungkung, 2021

Dalam usaha mencapai sasaran Mengurangi Ketimpangan Infrastruktur Antar Wilayah, Pemerintah Kabupaten Klungkung menemui kendala sebagai berikut:

1. Kondisi geografis Kabupaten Klungkung yang terdiri atas beberapa kepulauan mengakibatkan biaya pembangunan infrastruktur di wilayah kepulauan lebih tinggi dari di daratan. Selain permasalahan biaya, akses menuju wilayah pembangunan juga masih tertutup sehingga membutuhkan waktu pembangunan yang lebih lama. Permasalahn kondisi geografis ini telah berdampak luas pada berbagai prasarana publik tidak hanya penyediaan jalan, jembatan, air bersih bahkan juga infrastruktur pendidikan, kesehatan dan sebagainya.
2. Kesadaran masyarakat dalam memelihara dan memanfaatkan infrastruktur publik secara swadaya masih kurang.
3. Pendanaan untuk perbaikan infrastruktur jalan, terminal dan infrasttuktur publik lain mengalami refocusing anggaran akibat adanya bencana covid-19.



Penganggaran lebih banyak diarahkan untuk bidang kesehatan dan focus pada penanganan pandemi. Sementara aspek perbaikan infrastruktur publik ditunda sampai keadaan pandemi membaik. Hal itu mengakibatkan beberapa infrastruktur tidak memperoleh pemeliharaan.

Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Klungkung dalam meningkatkan Indeks Ketimpangan Infrastruktur adalah sebagai berikut:

1. Mengupayakan keseimbangan pembangunan infrastruktur di Klungkung daratan dan Klungkung kepulauan sehingga ketimpangan infrastruktur dapat ditanggulangi.
2. Mengupayakan perbaikan infrastruktur yang sangat mendesak berdasarkan skala prioritas, untuk memperoleh penanganan pemeliharaan maupun penggantian.

Dalam melaksanakan pelayanan publik, Pemerintah Kabupaten Klungkung senantiasa dituntut untuk melaksanakan pelayanan dengan efektif dan efisien. Untuk mengukur tingkat efisiensi pencapaian sasaran, dapat dilakukan dengan melakukan Analisis Efisiensi. Analisis efisiensi difokuskan pada indikator input dan output dari suatu kegiatan. Dalam hal ini, diukur dari kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan input yang lebih sedikit dalam menghasilkan output yang sama/atau lebih besar, atau persentase capaian output sama tinggi daripada persentase capaian input. Efisiensi suatu kegiatan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE). Dibawah ini disajikan analisis tingkat efisiensi sasaran Mengurangi Ketimpangan Infrastruktur Antar Wilayah sebagai berikut:

Tabel 3.39
Tingkat Efisiensi
Mengurangi Ketimpangan Infrastruktur Antar Wilayah
Tahun 2020

Indikator Kinerja	Target Capaian Sasaran (%)	Target Capaian Keuangan (%)	Standar Efisiensi	Realisasi Capaian Sasaran (%)	Realisasi Capaian Keuangan (%)	Indeks Efisiensi	Tingkat Efisiensi	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Indeks Ketimpangan Infrastruktur	100	100	1.00	162.48	89	1.82	0.82	Efisien
Jumlah	100	100	1.00	162.48	89	1.82	0.82	Efisien

Sumber : data diolah



Dari hasil analisis dapat diketahui bahwa pada tahun 2020, tingkat efisiensi sasaran Mengurangi Ketimpangan Infrastruktur Antar Wilayah adalah sebesar 0,82 dimana indeks efisiensi lebih tinggi dari standar efisiensi. Pada tahun 2020 sasaran Mengurangi Ketimpangan Infrastruktur Antar Wilayah dicapai dengan efisien. Sasaran Mengurangi Ketimpangan Infrastruktur Antar Wilayah didukung dengan program pendukung sebagaimana tabel dibawah ini.

Tabel 3.40
Efisiensi Anggaran
Sasaran Mengurangi Ketimpangan Infrastruktur Antar Wilayah
Tahun 2020

Program (1)	Anggaran (Rp) (2)	Realisasi (Rp) (3)	Efisiensi (Rp) (4)	Capaian (%) (5)	Ket (6)
Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	2,125,838,162.00	2,086,890,350.00	38,947,812.00	98.17	Dinas Perhubungan
Pogram Peningkatan Pelayanan Angkutan	9,912,367,179.00	8,126,704,697.00	1,785,662,482.00	81.99	Dinas Perhubungan
Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	4,726,361,550.00	4,386,980,452.00	339,381,098.00	92.82	Dinas Perhubungan
Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Perhubungan	110,901,432.00	109,527,232.00	1,374,200.00	98.76	Dinas Perhubungan
Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	584,013,370.00	584,013,370.00	0.00	100.00	Dinas Pekerjaan Umum
Program Penataan Ruang	366,531,550.00	180,170,400.00	186,361,150.00	49.16	Dinas Pekerjaan Umum
Program Pengembangan Sumber Daya Air	7,123,694,988.00	5,376,732,393.00	1,746,962,595.00	75.48	Dinas Pekerjaan Umum
Program Pengembangan Keciptakaryaan	11,583,701,202.00	10,678,189,002.00	905,512,200.00	92.18	Dinas Pekerjaan Umum
Program Pengembangan Bina Konstruksi	143,787,500.00	116,761,250.00	27,026,250.00	81.20	Dinas Pekerjaan Umum
Program Pengembangan Jalan dan Jembatan	13,129,512,885.00	12,659,306,128.00	470,206,757.00	96.42	Dinas Pekerjaan Umum
Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan	0.00	0.00	0.00	0.00	Dinas Penanaman Modal
Program Pengembangan Perumahan Dan Kawasan Permukiman	1,828,283,150.00	1,820,418,150.00	7,865,000.00	99.57	Dinas Pekerjaan Umum
Jumlah	51,634,992,968.00	46,125,693,424.00	5,509,299,544.00	89.33	

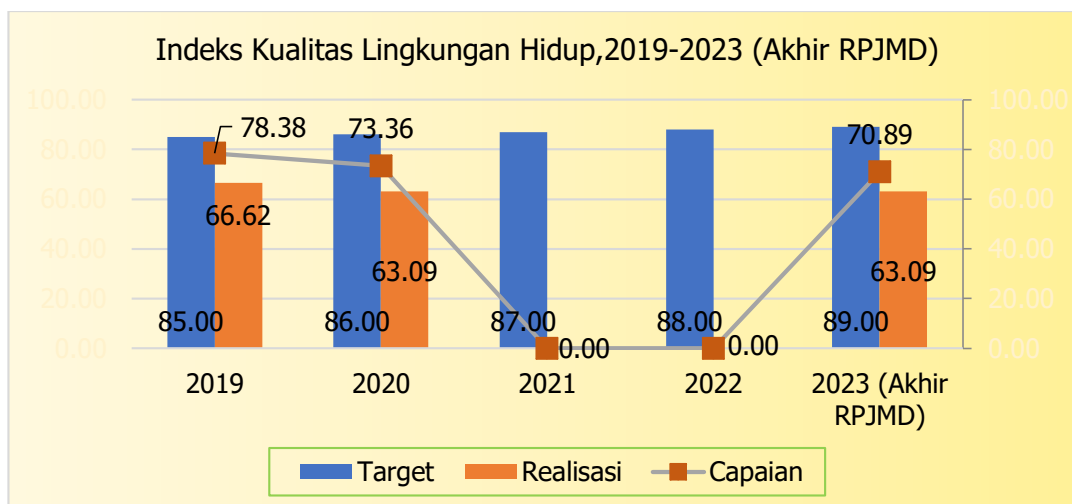
Sumber : SIMda Keuangan, 2021



Pada tahun 2020, Sasaran Mengurangi Ketimpangan Infrastruktur Antar Wilayah didukung dengan 12 program pendukung dengan pagu anggaran sebesar Rp. 51,634,992,968.00 dan terealisasi sebesar Rp. 46,125,693,424.00 dan sisa anggaran sebesar Rp. 5,509,299,544.00 atau terealisasi sebesar 89,33 persen. Sasaran ini didukung oleh Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Permukiman, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Dinas Perhubungan.

Sasaran 8 **Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup**

Manusia yang berkualitas bukan hanya dilihat dari segi pendidikan dan perilakunya sehari-hari namun dapat terlihat dari cara bagaimana seseorang memperlakukan wilayah atau tempat dimana dia tinggal. Tempat tinggal yang tertata rapih dan bersih akan senantiasa terlihat nyaman dan kondusif (aman) jika diimbangi dengan kondisi lingkungan sekitarnya yang bersih dan tertata rapih pula. Karenanya lingkungan hidup yang berkualitas merupakan suatu fokus utama pembangunan daerah. Pembangunan bidang Lingkungan Hidup di Kabupaten Klungkung diindikasikan dengan ditetapkannya sasaran Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup yang diukur dengan indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup merupakan indeks kinerja pengelolaan lingkungan hidup secara nasional, dimana IKLH merupakan generalisasi dari indeks lingkungan hidup seluruh kabupaten/kota dan provinsi di Indonesia. IKLH terdiri dari 3 indikator yaitu indikator Indeks kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL). Capaian target indikator sasaran Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup tahun 2020 disajikan pada grafik sebagai berikut :



Sumber : Statistik Lingkungan Hidup 2020 *Angka Realisasi adalah Angka Provinsi Bali,
*Angka tahun 2020

Gambar 3.39 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, 2019-2023 dan Capaian Akhir RPJMD

Berdasarkan gambar diatas dapat diketahui bahwa capaian indikator Kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup di Kabupaten Klungkung pada tahun 2020 belum dapat memenuhi target yang ditetapkan. Pada tahun 2020, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup ditargetkan sebesar 86,00 dan terealisasi sebesar 63,09 atau dengan capaian 73,36 persen. Dibandingkan dengan target RPJMD, capaian akhir RPJMD telah tercapai sebesar 70,89 persen. Untuk itu diperlukan usaha-usaha untuk terus mempertahankan bahkan meningkatkan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup di Kabupaten Klungkung. Mengingat belum dilakukannya pengukuran Indeks Kualitas Lingkungan Hidup di Kabupaten Klungkung, angka realisasi yang disajikan adalah angka Indeks Lingkungan Hidup Provinsi Bali pada tahun 2019 yang merupakan rilis terakhir Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Data tersebut terbit dalam publikasi buku Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 2020 yang rilis pada tanggal 30 Desember 2020 melalui website menlhk.go.id merupakan website resmi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Perkembangan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi Bali disajikan sebagai berikut :



Tabel 3.41
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi Bali, 2015-2019

Tahun	Nilai	Predikat
2015	73,71	Baik
2016	72,59	Baik
2017	70,11	Baik
2018	66,62	Cukup Baik
2019	63,09	Cukup Baik

Sumber : Statistik Lingkungan Hidup 2020, *Angka Provinsi Bali

Hasil pengukuran Indeks Kualitas Lingkungan Hidup di Provinsi Bali dari tahun ke tahun mengalami penurunan. Bahkan pada tahun 2019 mengalami penurunan peringkat dari peringkat baik menjadi cukup baik. Hal tersebut menandakan menurunnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup di Provinsi Bali.

Pada tahun 2019, terdapat 4 provinsi dengan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup sangat baik yaitu : Papua Barat, Papua, Kalimantan Tmur dan Sulawewsi Tengah. Terdapat 1 Provinsi dengan IKLH Sangat kurang Baik yaitu DKI Jakarta dan DI Yogyakarta. Provinsi Bali menempati indeks kualitas lingkungan hidup cukup baik dengan nilai 63,09 berada dibawah angka nasional yang sebesar 66,55. IKLH Provinsi se Indonesia dapat dilihat pada tabel di bawah ini :



Tabel 3.42
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi se Indonesia dan Angka Nasional

No	Provinsi	IKU	IKA	IKTL	IKLH
1	Aceh	91,08	60,56	76,57	76,12
2	Sumatera Utara	86,58	51,11	52,95	62,49
3	Sumatera Barat	89,40	53,19	67,16	69,64
4	Riau	90,47	53,55	48,15	62,47
5	Jambi	87,17	58,49	60,90	68,06
6	Sumatera Selatan	87,13	64,45	39,84	61,41
7	Bengkulu	92,69	47,64	55,78	64,41
8	Lampung	86,63	55,74	36,65	57,37
9	Bangka Belitung	91,94	69,29	41,21	64,85
10	Kepulauan Riau	90,59	54,00	59,06	67,00
11	DKI Jakarta	67,97	41,94	24,66	42,84
12	Jawa Barat	74,93	45,59	38,70	51,64
13	Jawa Tengah	84,81	51,64	50,08	60,97
14	DI Yogyakarta	85,19	35,37	32,69	49,24
15	Jawa Timur	83,06	50,79	50,23	60,25
16	Banten	74,98	43,11	39,16	51,09
17	Bali	89,85	65,33	41,34	63,09
18	Nusa Tenggara Barat	87,40	40,23	65,67	64,56
19	Nusa Tenggara Timur	88,18	59,48	63,42	69,67
20	Kalimantan Barat	90,07	50,00	59,76	65,92
21	Kalimantan Tengah	88,83	56,80	76,27	74,20
22	Kalimantan Selatan	88,78	55,31	46,78	61,94
23	Kalimantan Timur	90,31	62,01	87,94	80,87
24	Kalimantan Utara	93,79	52,22	87,94	78,98
25	Sulawesi Utara	92,41	45,48	59,45	65,15
26	Sulawesi Selatan	89,56	58,40	58,06	67,61
27	Sulawesi Tengah	92,98	62,59	83,89	80,23
28	Sulawesi Tenggara	90,01	50,55	74,67	72,03
29	Gorontalo	86,88	57,20	79,37	74,97
30	Sulawesi Barat	89,97	56,15	70,48	72,03
31	Maluku	88,72	57,56	89,17	79,55
32	Maluku Utara	92,38	53,61	86,61	78,44
33	Papua Barat	92,64	53,89	100,00	83,96
34	Papua	92,56	47,29	99,58	81,79
35	Indeks Nasional	86,56	52,62	62,00	66,55

Sumber: Statistik Lingkungan Hidup 2019, Rilis 30 Desember 2020

Dalam meningkatkan kualitas hutan di Kabupaten Klungkung, Pemerintah Republik Indonesia melalui Badan Litbang dan Inovasi melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan pengelolaan hutan, penelitian dan pengembangan peningkatan nilai tambah hasil hutan serta kegiatan penelitian lain yang dapat meningkatkan pemanfaatan hutan di Kabupaten Klungkung. Dalam pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan, Badan Litbang dan inovasi melaksanakan



kerjasama dengan berbagai pihak termasuk dengan Pemerintah Kabupaten Klungkung. Kerjasama yang dilakukan dalam bentuk kerjasama pengelolaan Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus (KHDTK). Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus yang dimanfaatkan oleh Badan Litbang dan Inovasi Kementerian Lingkungan Hidup adalah sebagaimana tabell berikut :

Tabel 3.43
Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus di Kabupaten Klungkung dan pemanfaatannya untuk Penelitian

No	Nama KHDTK/ Lokasi	Luas (Ha)	Jumlah Kegiatan Penelitian					Dasar Hukum Penunjukan KHDTK	Dasar Hukum Penetapan KHDTK
			2014	2015	2016	2017	2018		
1	Nusa Penida	157,7	6	6	5	4	5	SK Menhut No. 459/ Menhut-II/2005 Tanggal 13 Desember 2005	SK Menhut No. 459/ Menhut-II/2005 Tanggal 13 Desember 2005

Sumber: Statistik Lingkungan Hidup 2019, Rilis Kementerian Lingkungan Hidup RI

Dalam mewujudkan sasaran Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup, Pemerintah Kabupaten Klungkung menghadapi kendala:

1. Penggunaan plastic pada masa pandemi covid-19 cenderung meningkat, mengingat banyak alat-alat perlindungan diri yang berbahan plastic sebagai perlindungan terhadap media hidup virus yang berbentuk cair.
2. Fokus sosialisasi penanganan sampah plastic teralihkan dengan isu global covid-19. Penanganan beralih ke bidang kesehatan.
3. Tingginya alih fungsi lahan tegalan menjadi perumahan mengakibatkan berkurangnya vegetasi pohon di Kabupaten Klungkung.
4. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah di tingkat rumah tangga. Kesalahan pengelolaan itu termasuk membuang sampah ketempat yang tidak semestinya seperti sungai, laut, lahan kosong, mencampurkan sampah organik dan anorganik serta membakar sampah di wilayah permukiman.
5. Masih ada masyarakat yang tidak mendapatkan akses sanitasi yang berkualitas.
6. Terdapat industri rumah tangga makanan dan tekstil baik itu usaha skala rumah



tangga, menengah maupun usaha skala besar belum melakukan pengolahan limbah industrinya dengan tepat sehingga sangat berpotensi mencemari lingkungan.

7. Kabupaten Klungkung tidak lagi memiliki Tempat Pembuangan Akhir setelah diberlakukannya Undang Undang Nomor 18 Tahun 2008, TPA yang masih menerapkan Sistem Open Dumping secara bertahap harus merubah metode Pengelolaaannya menjadi Sistim Sanitary Landfill ataupun Sistim Control Landfill terhitung sejak UU tersebut diundangkan, akan tetapi karena terbatasnya Sumber Daya yang tersedia Pemerintah Kabupaten Klungkung masih menerapkan metode Open Dumping sehingga dampak buruk emisi Gas Methan tetap mengancam masyarakat. Secara langsung bahaya kebakaran timbunan sampah TPA mengakibatkan meningkatnya Penyakit ISPA.
8. Refocusing anggaran akibat pandemi covid-19 mengurangi anggaranbelanja pemerintah Kabupaten Klungkung untuk penanganan lingkungan hidup. Pelaksanaan kegiatan hanya untuk kegiatan operasional yang tidak dapat ditunda seperti penanganan sampah perkotaan, pertamanan dan pelayanan rutin lain.

Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Klungkung dalam Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut:

1. Sosialisasi penanganan sampah plastic secara online dan intensif ke masyarakat.
2. Sebagaimana diketahui bahwa Gas Methan adalah termasuk dalam kelompok Gas Rumah Kaca atau Green House Gas sebagai penyebab utama pemanasan global, bahkan Gas Methan memiliki kekuatan efek pemanasan 72 kali lebih kuat dari Gas Monoksida (CO) yang dihasilkan oleh pembakaran BBM dari mesin-mesin kendaraan dan pabrik-pabrik. Bertitik tolak dari data dan kondisi tersebut diatas maka Pemerintah Kabupaten Klungkung sejak Tahun 2015 berinisiatif untuk mengendalikan emisi Gas Methan pada TPA Sente untuk mengurangi dampak buruk yang diakibatkannya bahkan lebih jauh lagi dimanfaatkan sebagai sumber Bahan Bakar bagi masyarakat sekitar. Pemanfaatan gas methan sebagai bahan bakar disalurkan dari jam 07.00 – 10.00 (4 jam) setiap harinya dirasakan sangat membantu mengurangi pengeluaran untuk konsumsi bahan bakar minyak/gas.
3. Pemantauan kualitas air dilakukan untuk memastikan sumber-sumber air tidak mengandung cemaran yang dapat membahayakan masyarakat. Di Kabupaten Klungkung pemantauan kualitas air dilakukan terhadap kualitas air di tiga sungai



utama di Kabupaten Klungkung yaitu Tukad Unda, Tukad Jinah dan Tukad Bubuh pada tiga titik pengamatan yaitu hulu, tengah dan hilir sungai. Pengamatan dilakukan pada dua musim yaitu musim hujan dan musim kemarau. Dari hasil pemantauan terhadap kualitas air sungai tersebut dapat diambil kesimpulan mengenai penurunan beban pencemaran air di Kabupaten Klungkung.

4. Penanganan lahan kritis merupakan salah satu fokus Pemerintah Kabupaten Klungkung, mengingat lahan kritis yang tidak ditangani dapat menyebabkan kerusakan yang berkelanjutan terhadap lingkungan. Penanganan lahan kritis dilakukan dengan penanaman pohon pada wilayah yang kritis melalui pemberian bantuan bibit pohon yang kemudian ditanam dan dipelihara oleh masyarakat.
5. Program Tempat Olah Sampah Setempat (TOSS). Penerapan program ini akan menyebabkan tidak adanya proses pemilahan. Sampah akan diolah secara langsung melalui proses peyueumisasi, briketisasi/peletisasi, dan gasifikasi, dengan menggunakan bio aktivator. Dalam tiga hari, bau hilang, dan dalam sepuluh hari volume sampah sudah berkurang. Ini juga akan menghasilkan briket dan pellet yang dapat digunakan sebagai bahan bakar untuk proses memasak dan listrik. Pada tahun 2018, Program Aksi TOSS ini memperoleh penghargaan sebagai TOP 40 Inovasi Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Kementerian PAN dan RB Republik Indonesia.

Untuk mengukur tingkat efisiensi pencapaian sasaran, dapat dilakukan dengan melakukan Analisis Efisiensi. Dibawah ini disajikan analisis tingkat efisiensi sasaran Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup sebagai berikut:

Tabel 3.44
Tingkat Efisiensi
Sasaran Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup
Tahun 2020

Indikator Kinerja	Target Capaian Sasaran (%)	Target Capaian Keuangan (%)	Standar Efisiensi	Realisasi Capaian Sasaran (%)	Realisasi Capaian Keuangan (%)	Indeks Efisiensi	Tingkat Efisiensi	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	100	100	1.00	73.36	78.95	0.93	-0.07	Tidak Efisien
Jumlah	100	100	1.00	73.36	78.95	0.93	-0.07	Tidak Efisien

Sumber : data diolah



Dari hasil analisis dapat diketahui bahwa pada tahun 2020, tingkat efisiensi sasaran Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup adalah sebesar -0,07 dimana indeks efisiensi lebih rendah dari standar efisiensi. Pada tahun 2020 sasaran Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dicapai dengan tidak efisien. Sasaran Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup didukung dengan program pendukung sebagaimana tabel dibawah ini.

Tabel 3.45
Efisiensi Anggaran
Sasaran Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup
Tahun 2020

Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Efisiensi (Rp)	Capaian (%)	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	9,589,712,035.00	7,491,860,045.00	2,097,851,990.00	78.12	DLHP
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	93,379,008.00	82,771,195.00	10,607,813.00	88.64	DLHP
Program Penanganan dan Peningkatan Kualitas Lingkungan Melalui Penanganan Sampah, Limbah dan RTH	6,309,862,794.00	6,233,426,060.00	76,436,734.00	98.79	DLHP
Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan	154,250,223.58	17,216,210.00	137,034,013.58	11.16	DLHP
Jumlah	16,147,204,060.58	13,825,273,510.00	3,687,116,544.00	78.95	

Sumber : SIMDA Keuangan, 2021

Pada tahun 2020, Sasaran Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup didukung dengan 4 program pendukung dengan pagu anggaran sebesar Rp. 16,147,204,060.58 dan terealisasi sebesar Rp. 13,825,273,510.00 dan sisa anggaran sebesar Rp. 3,687,116,544.00 atau terealisasi sebesar 78.95 persen. Sasaran ini didukung oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan dan seluruh Kecamatan.



DOKUMENTASI PENCAPAIAN SASARAN



Instalasi Pengolahan Sampah Kab. Klungkung (TOSS)



Bupati Klungkung Inspeksi Pemilahan Sampah oleh Masyarakat



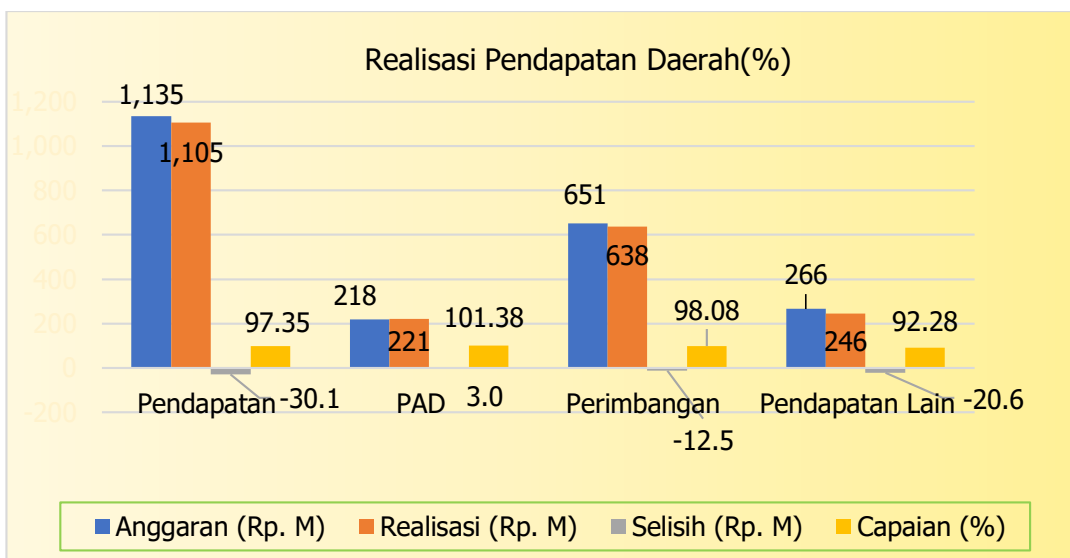
Penandatanganan Kerjasama Pemanfaatan Sampah dengan Indonesia Power



Bupati Klungkung Terima Penghargaan TOP 40 Inovasi Pelayanan Publik untuk *waste management*

3.3. Realisasi Anggaran

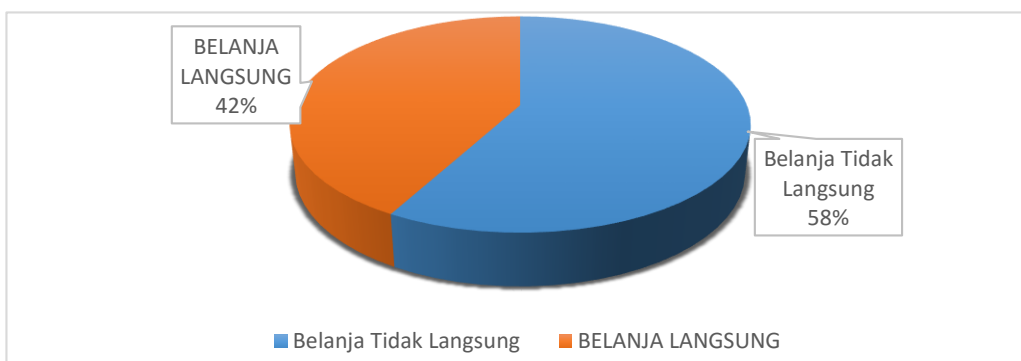
Selain Sumber Daya Manusia, Pemerintah Kabupaten Klungkung juga menggunakan Sumber Daya lain untuk mencapai sasaran serta target yang telah ditetapkan di Tahun 2020. Dana yang digunakan adalah salah satu sumber daya yang menjadi modal pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka pencapaian sasaran.



Sumber : Simda Keuangan, 2021

Gambar 3.40 Capaian Anggaran Pendapatan Kabupaten Klungkung, 2020 (%)

Pendapatan Kabupaten Klungkung dianggarkan sebesar Rp. 1.134.934.137.878,01 dan terealisasi sebesar Rp. 1.104.882.392.581,69 atau tercapai sebesar 97,35 persen. Pendapatan Asli Daerah direncanakan sebesar Rp. 217.893.860.361,97 terealisasi sebesar Rp. 220.891.875.118,99 atau tercapai sebesar 101,38 persen. Dana Perimbangan dianggarkan sebesar Rp. 650.648.263.075,00 terealisasi sebesar Rp. 638.167.354.263,00 atau tercapai sebesar 98,08 persen. Pendapatan Lain-Lain direncanakan sebesar Rp. 107.532.780.900,00 terealisasi sebesar Rp. 103.101.031.298,00 atau tercapai sebesar 95,88 persen. Selain merencanakan pendapatan, Pemerintah Kabupaten Klungkung juga merencanakan belanja yang disajikan sebagai berikut :

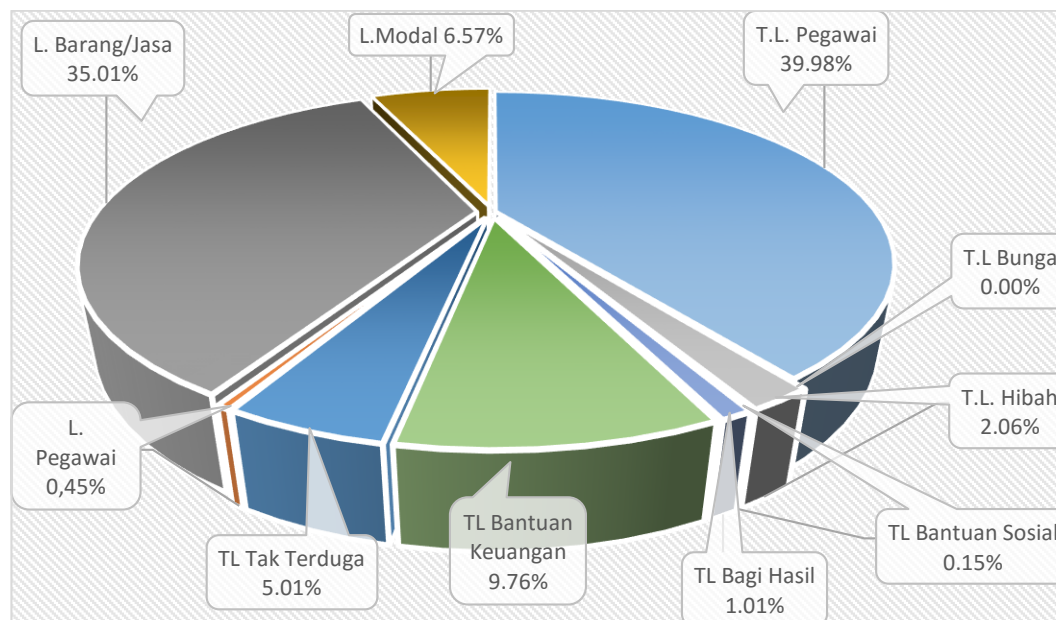


Sumber : Simda Keuangan, 2021

Gambar 3.41 Anggaran Belanja Kabupaten Klungkung, 2020 (%)



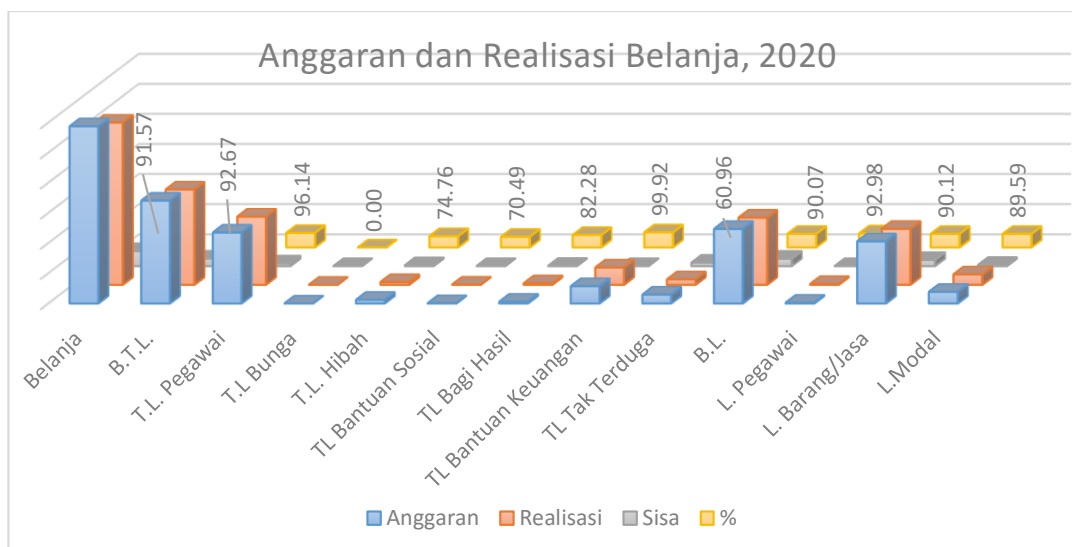
Dari gambar diatas dapat diketahui bahwa belanja langsung Pemerintah Kabupaten Klungkung masih lebih kecil dari belanja Tidak Langsung. Belanja Langsung sebesar 42 persen dan Belanja Tidak Langsung sebesar 58 persen. Berikut disajikan komposisi rinci dari anggaran belanja Pemerintah Kabupaten Klungkung.



Sumber : Simda Keuangan, 2021

Gambar 3.42 Anggaran Belanja Kabupaten Klungkung, Perubahan 2020 (%)

Dari gambar dapat diketahui bahwa Belanja Pegawai merupakan Belanja dengan persentase terbesar dari keseluruhan porsi belanja, disusul Belanja Barang/Jasa dan Belanja Bantuan Keuangan. Untuk mengetahui serapan anggaran masing-masing belanja tersebut dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



Sumber : Simda Keuangan, 2021 (Sebelum audit BPK)

Gambar 3.43 Capaian Anggaran Belanja Kabupaten Klungkung, 2020 (%)

Pada tahun 2020 Anggaran Belanja Pemerintah Kabupaten Klungkung terdiri atas Belanja Langsung dengan anggaran Rp. 494.182.906.762,73 terealisasi sebesar Rp. 445.098.232.338,50 atau capaian 90,07 persen, terdiri atas Belanja Pegawai dengan anggaran Rp. 5.274.091.877,08 terealisasi sebesar Rp. 4.903.600.176,00 atau tercapai sebesar 92,98 persen. Belanja Barang dan Jasa dengan anggaran Rp. 411.693.414.429,07 terealisasi sebesar Rp 371.014.336.573,50 atau capaian 90,12 persen dan Belanja Modal dengan anggaran Rp. 77.215.400.456,58 terealisasi sebesar Rp. 69.180.295.589 dengan capaian 89,59 persen. Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 694.207.854.318,64 dengan realisasi sebesar Rp. 677.296.378.016,80 atau tercapai sebesar 97,56 persen. Belanja Tidak Langsung terdiri atas Belanja Pegawai dengan anggaran Rp. 470.068.405.234,00 dengan realisasi sebesar Rp. 451.943.179.026,00 atau tercapai 96,14 persen. Belanja Hibah dengan anggaran Rp. 24.261.523.663,00 dengan realisasi sebesar Rp. 18.138.179.879,00 atau tercapai 74,76 persen. Belanja Bantuan Sosial dengan anggaran Rp. 1.812.300.000,00 realisasi sebesar Rp. 1.277.500.000,00 atau capaian sebesar 70,49 persen. Belanja Bagi Hasil dengan anggaran Rp. 11.846.584.627,00 dengan realisasi sebesar Rp. 9.747.912.519,00 dengan capaian 82,28 persen. Belanja Bantuan keuangan dengan anggaran Rp. 114.752.392.485,04 dengan realisasi Rp. 114.661.695.930,00 atau tercapai 99,92 persen. Belanja Tidak Terduga



Pemerintah Kabupaten Klungkung
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2020

dengan anggaran Rp. 58.959.584.960,00 terealisasi 35.941.299.403,00 atau tercapai 60,96 persen.



**CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN MASING-MASING SASARAN
TAHUN 2020**

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Jml Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)	Capaian Keuangan (%)	Tingkat Efisiensi	Ket
1	Lestari dan berkembangnya kebudayaan daerah	Cakupan Budaya yang lestari (%)	24.00	31.42	130.92	3	4,175,088,044	3,911,640,002	263,448,042	93.69	0.40	Efisien
2	Terwujudnya pembangunan manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	72.13	71.73	99.45	23	294,269,356,598	268,762,294,056	25,507,062,543	91.33	0.09	Efisien
3	Menurunnya angka kemiskinan dari 6,29% menjadi 3%	Persentase Penduduk Miskin (%)	4.34	4.87	87.79	10	7,324,414,331	6,043,281,776	1,281,132,555	82.51	0.06	Efisien
4	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi	Laju Pertumbuhan PDRB (%)	6.00	-6.35	-105.83	24	19,184,836,093	17,564,643,489	1,620,192,604	91.55	-2.16	Tidak Efisien
5	Terwujudnya Birokrasi yang Profesional, responsif, transparan, santun dan inovatif	Indek Reformasi Birokrasi	56.00	57.85	103.30	47	56,821,556,823	47,511,905,224	9,309,651,599	83.62	0.24	Efisien
6	Terwujudnya ketaatan masyarakat terhadap peraturan perundangan	Indeks Demokrasi Daerah	77.10	81.38	105.55	11	5,425,369,880	5,241,407,368	183,962,512	96.61	0.09	Efisien
7	Mengurangi ketimpangan infrastruktur antar wilayah	Indeks Ketimpangan Infrastruktur	54.00	20.26	162.48	12	51,634,992,968	46,125,693,424	5,509,299,544	89.33	0.82	Efisien
8	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan	86.00	63.09	73.36	4	16,147,204,061	13,825,273,510	3,687,116,544	78.95	-0.07	Tidak Efisien



Pemerintah Kabupaten Klungkung
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2020
